BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4.1 Peta Vietnam

Sumber: www.thenaturalsapphirecompany.com/ (2023)

Republik Sosialis Vietnam (*Socialist Republic of Vietnam*) memiliki wilayah negara sepanjang pantai timur semenanjung Indochina (*Indochinese*) dengan luas 331.210 km^2 yang terletak pada 8,5°LU - 23,5°LU dan 102°BT - 109°BT dengan perbatasan disebelah utara Cina, sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan Laut Cina Selatan, sebelah barat daya Kamboja dan sebelah barat laut Laos. Vietnam memiliki laut yang berbatasan laut Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand (Nations Online, 2023). IMF melansir jumlah penduduk Vietnam tahun 2023 sebesar 100,345 juta jiwa. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi dengan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Vietnam adalah negara berbentuk

Republik Komunis dengan Kepala Negara adalah Presiden dan Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sistem pemerintahan Vietnam disebut *Single Party Constitutional Republic* yang seluruh organisasi dan seluruh organ pemerintah serta perjanjian negara dan undang-undang dikontrol oleh Partai Komunis Vietnam (DPR RI, 2010).

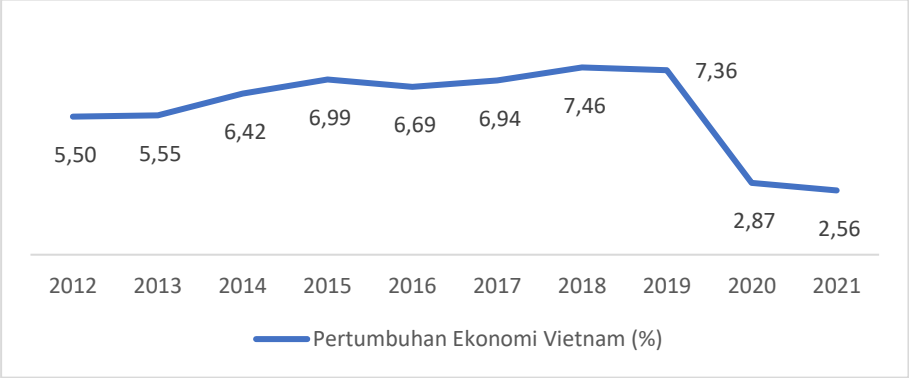

Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Vietnam 2012-2021

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Pertumbuhan ekonomi Vietnam selama periode 2012-2021 berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2019. Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2019 sebesar 7,36% yang merupakan tingkat tertinggi pertumbuhan ekonomi Vietnam serta merupakan pencapaian membanggakan bagi Vietnam di tengah krisis akibat dampak perang dagang Amerika Serikat dan China. Vietnam dan seluruh negara di dunia pada tahun 2020 mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yaitu tingkat pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 2,87% namun angka tersebut masih menjadi sebuah pecapaian bagi Vietnam karena berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi negaranya ditengah resesi dunia akibat pandemi. Pada tahun 2021 setelah pandemi COVID-19, pemulihan pertumbuhan ekonomi Vietnam masih belum dapat terealisasikan sehingga menurun di tingkat pertumbuhan ekonomi 2,56% karena dampak pandemi COVID-19 di Vietnam masih dirasakan sehingga melemahkan ekonomi dan sektor jasa atau pelayanan secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam di dorong dengan perdagangan luar negeri komoditas-komoditas Vietnam. Selain itu, Vietnam mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terdiri dari bermacam-macam suku di seluruh wilayah negara Vietnam sehingga perekonomian negara dapat berjalan dengan baik (Kedutaan Besar RI, 2023). Vietnam percaya bahwa sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di blok sosial sangat penting sehingga Vietnam berusaha melakukan kerja sama dengan negara-negara lain (Path, 2012).

4.1.1 Ekspor-Impor Vietnam

Ekspor-impor merupakan salah satu unsur dalam menghitung GDP suatu negara sehingga memilliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Tingkat aktivitas ekspor dan impor memberikan informasi mengenai seberapa kompetitif dan pentingnya industri lokal dalam dinamika perdagangan global sehingga dapat memperkuat perekonomian suatu negara.

Pada tahun 2019 hingga 2021, Vietnam merupakan negara kedua yang memiliki nilai ekspor terbesar di ASEAN dibawah Singapura. Tahun 2012 nilai eskpor Vietnam hanya sebesar USD114.511.000.000 dan dalam kurun waktu 9 tahun mengalami kenaikan hampir 300% menjadi USD335.793.000.000,- pada tahun 2021. Prestasi ekspor Vietnam tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kegiatan perdagangan internasional dengan memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan volume ekspor ke berbagai pasar global. Grafik dibawah ini merujuk data ASEAN Statistical Yearbook 2022 yang menunjukkan nilai ekspor barang negara-negara ASEAN dalam periode 2012 sampai dengan 2021:

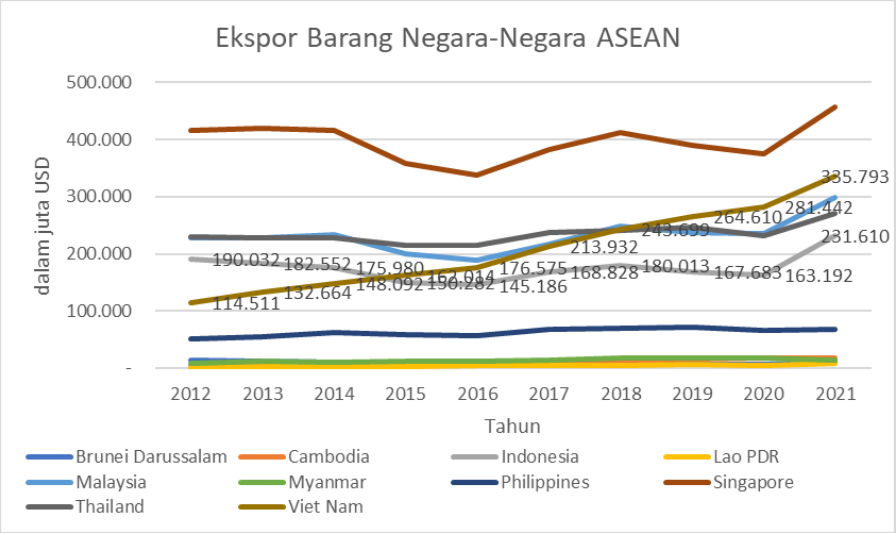

Grafik 4.2 Ekspor Barang Negara-Negara ASEAN

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Vietnam juga merupakan negara kedua yang memiliki nilai impor terbesar di ASEAN periode 2018 hingga 2021 bawah Singapura. Tahun 2012 nilai impor Vietnam hanya sebesar USD113.282.500.000 dan dalam kurun waktu 9 tahun mengalami kenaikan hampir 300% menjadi USD330.752.300.000 pada tahun 2021. Grafik dibawah ini merujuk data ASEAN Statistical Yearbook 2022 yang menunjukkan nilai impor barang negara-negara ASEAN dalam periode 2012 sampai dengan 2021:

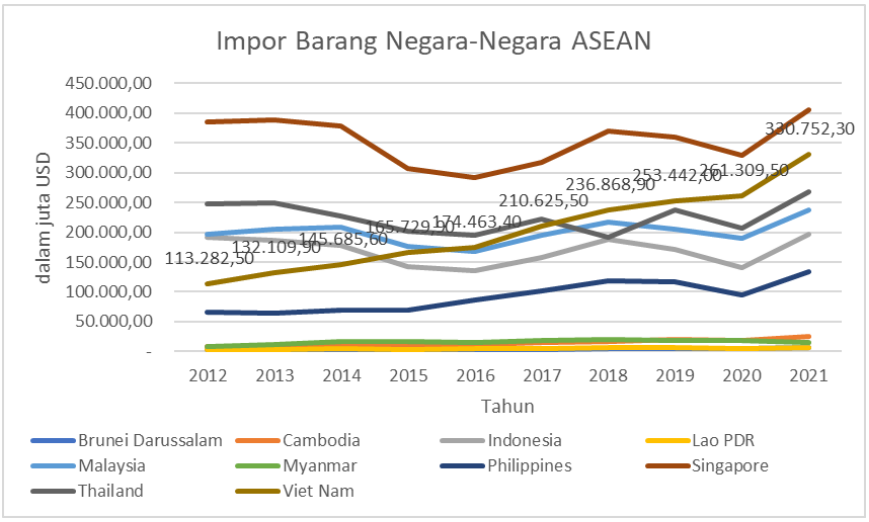

Grafik 4.3 Impor Barang Negara-Negara ASEAN

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.1.2 Foreign Direct Investment

Investasi merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu bentuk investasi yang masuk ke dalam suatu negara adalah *foreign direct investment.* ASEAN merupakan wilayah tujuan para investor dimana setiap negeri berusaha agar menciptakan iklim usaha yang kondusif. Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang menunjukkan FDI net inflows (% of GDP) pada negara-negara di ASEAN dalam kurun waktu 1987 sampai dengan 2022:

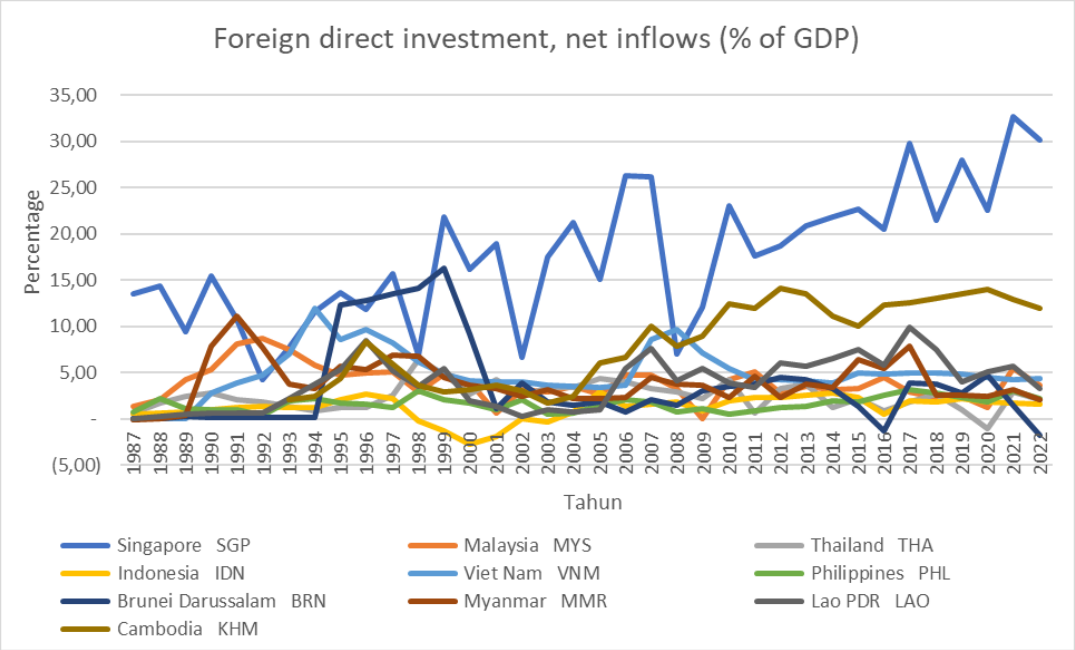

Grafik 4.4 Foreign Direct Investment, net inflow

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Vietnam berada diurutan ketiga dengan FDI net inflows (% of GDP) sebesar 4,38% dibawah Singapura (30,17) dan Kamboja (11,95%). Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir FDI net inflows (% of GDP) selalu diatas 4%.

4.1.3 Pertahanan Negara Vietnam

The Ministry of Defense of the Socialist Republic of Vietnam atau Kementerian pertahanan Vietnam memiliki fungsi untuk mengelola

pertahanan nasional seluruh rakyat, tentara rakyat (*people's army*), misili (*militia*), dan pasukan bela diri (*self-defence force*) Vietnam dibawah kepemimpinan partai komunis Vietnam yang menggunakan sistem perang rakyat untuk menanggulanig ancaman serta melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Vietnam (MINDEF Vietnam, 2023). Vietnam memiliki sistem pertahanan rakyat secara menyeluruh sebagai pedoman seluruh rakyat Vietnam yaitu *Nền quốc phòng toàn dân (national defense of the whole people)* yang tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan negara Vietnam No. 22/2018/QH14 yang menjelaskan tentang pertahanan negara adalah usaha bela negara dengan gabungan kekuatan seluruh bangsa yang mencakup seluruh kegiatan organisasi, persiapan dan praktek di bidang politik, spiritualitas, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, teknologi, militer, keamanan dan hubungan luar negeri.

Angkatan bersenjata Vietnam atau Tentara Rakyat Vietnam disebut dengan *Vietnam People's Army* (VPA) dikontrol secara penuh dibawah Partai Komunis Vietnam atau disebut *Communis Party of Vietnam* (CPV) dengan sistem organisasi partai, rantai komando, sistem organisasi politik, kader politik, dan organisasi massa serta prinsip-prinsip usaha pertahanan Vietnam yaitu: (UU Pertahanan, 2018)

a. Patuh kepada konstitusi dan Undang-Undang negara dibawah kepemimpinan terpusat Partai Komunis Vietnam
b. Memobilisasi seluruh kekuatan gabungan dari seluruh bangsa dan sistem politik
c. Membangun postur pertahanan nasional berbasis rakyat
d. Integrasi pertahanan negara dengan aspek sosial ekonomi dan sebaliknya
e. Keterkaitan pertahanan, keamanan dan urusan luar negeri

Pemerintah Vietnam menunjukkan komitmen sumber daya keuangan dalam mendukung keamanan dan pertahanan nasioal sesuai

dengan Undang-Undang Pertahanan negara Vietnam No. 22/2018/QH14 pasal 30 ayat 1 menyatakan "*Negara menjamin anggaran pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN; memprioritaskan investasi di kawasan perbatasan, pulau-pulau, kawasan strategis, kawasan utama, kawasan kunci untuk pertahanan negara dan sebagian kekuatan Tentara Rakyat menuju modernitas*" dan pasal 33 yang menyatakan "*Negara menjamin kebutuhan keuangan aset yang digunakan untuk pertahanan nasional, keamanan dan rezim serta tujuan lainnya*".

Penentuan besarnya anggaran pertahanan di Vietnam ditentukan oleh kebijakan dari *Communis Party of Vietnam*/CPV (Partai Komunis Vietnam). Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang menunjukkan anggaran pertahanan di Vietnam:

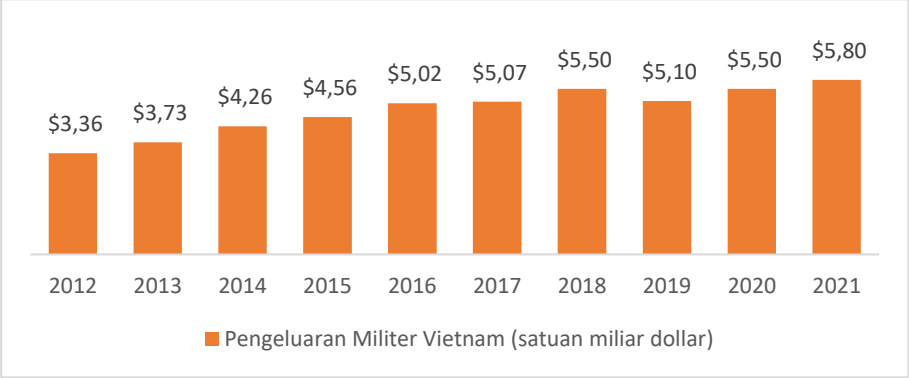

Grafik 4.5 Pengeluaran Militer Vietnam 2012-2021

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Grafik diatas menunjukkan bahwa pengeluaran militer Vietnam berfluktuasi namun relatif naik hanya pada tahun 2019 mengalami penurunan dan seluruh anggaran tetap difokuskan untuk pengadaan persenjataan misalnya di tahun 2019 sebesar 32,5% (Bussineswire, 2019). Sebagian besar dari alokasi anggaran Vietnam digunakan untuk memastikan kesejahteraan anggota militer, baik perwira, bintara, prajurit, maupun karyawan di sektor pertahanan serta untuk mendukung

operasional industri pertahanan dan mempertahankan kesiapan Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam (VPA).

Buku Putih Pertahanan Vietnam tahun 2019 menyatakan Vietnam menerapkan kebijakan non-blok yang dikenal sebagai empat tidak yaitu tidak ada aliansi militer; tidak memihak satu negara terhadap negara lain; tidak ada pangkalan militer asing atau tidak menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara lain; dan tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional.

Vietnam mengeluarkan Kebijakan Maritim pada tahun 2011 yang menerangkan strategi maritim terperinci untuk tahun 2011-2020. Kebijakan tersebut menjadikan perlindungan kedaulatan maritim dan ekonomi maritim sebagai pilar utama keamanan nasional. Kemudian Resolusi 36 tahun 2018 kembali menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan ekonomi kelautan yang terkait dengan pertahanan nasional merupakan misi inti pembangunan ekonomi Vietnam pada tahun 2030-2045.

4.1.4 Sejarah Vietnam

Pada abad ke-11 sebelum Masehi Sejarah Vietnam dimulai sejak dijajah oleh Tiongkok lebih dari seribu tahun sejak abad ke 11 sebelum masehi yang mayoritas wilayah bagian utara Vietnam dikuasai oleh Kekaisaran Tiongkok. (Thu, 2018).

Pada abad ke- 7 Sebelum Masehi negara bagian Vietnam yang disebut Van Lang memulai peradaban baru sebagai salah satu pusat pertanian dan membangun sosial ekonomi di Era Dong Son atau sekitar abad ke-7 SM. Masyarakat Vietnam saat itu menciptakan sebuah peradaban dan membentuk sebuah negara yang mempengaruhi wilayah Asia Tenggara dengan evolusi ekonomi dan peradaban maju atau dikenal dengan peradaban Sungai Merah (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Masyarakat Vietnam saat itu disebut sebagai Masyarakat Lac dan mendiami wilayah Vietnam Utara (Buttinger et al., 2023).

Pada abad ke-2 dan 3 Sebelum Masehi. Sejak abad ke-2 SM wilayah-wilayah Vietnam telah didominasi oleh dinasti-dinasti feudal Tiongkok sehingga menimbulkan perlawanan rakyat yang berjuang mempertahanan bangsa dan intisari kebudayaannya. Vietnam menghadapi agresi asing pada abad ke- 3 sebelum masehi dengan perlawanan terhadap Dinasti Qin dengan menerapkan pertahanan nasional rakyat Vietnam (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023).

Pada abad ke 10 M. Setelah itu, Vietnam berhasil memerdekakan kerajaan-kerajaan Vietnam sekitar tahun 938M (Thu, 2018). Kemenangan perlawan rakyat Vietnam di era Bach Dang tahun 938M akhirnya membentuk negara feudal Vietnam yang merdeka, melaksanakan pembangunan, dan pertahanan negaranya. Negara adiminstratif terpusat bernama Da Viet didirikan dibawah beberapa dinasti yaitu Dinasti Ngo (938-965), Dinh (969-976), dan Le (980-1009) (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Penjajaahan yang berlangsung berabad-abad membuat sistem politik, ekonomi, dan sosial Vietnam banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Tiongkok (Ahmad, 1991).

Pada abad ke 11 – 15 M. Da Viet merupakan negara dikenal makmur pada saat itu memasuki masa renaissance dan pembangunan saat Dinasti Ly (1009-1226), Tran (1226-1400), Ho (1400-1407), dan Le So (1428-1527). Pada era ini Vietnam mencapai masa puncak kejayaan dengan perkembangan pertanian dan irigasi yang maju. Pada masa Dinasti Ly hingga Tran, huruf Nom atau aksara Vietnam muli diperkenalkan yang menunjukkan perkembangan pesat pada sistem pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, budaya, sejarah, dan hukum, di Vietnam. Pada masa ini Thang Long (Hanoi) secara resmi menjadi ibuk kota Kekaisaran Da Viet tepatnya pada tahun 1010 dengan proklamasi pemindahan oleh Ly Thai To. (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023)

Pada abad ke-16 M, Da Viet mengalami kemunduran sehingga terjebak dalam perang saudara yang menghambat evolusi pertumbuhan

ekonomi dan perdagangan internasional Vietnam pada saat itu (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Persaingan 2 wilayah Vietnam yaitu dibawah keluarga Nguyen di selatan dan keluarga Trinh di utara menjadi awal terbukanya jalan Perancis menguasai Vietnam (Buttinger et al., 2023).

Abad ke-18 tahun 1857, Napoleon III memutuskan untuk menginvasi Vietnam karena keinginan menguasai sumber daya dan pasar di Vietnam dan kebangkitan kapitalisme Perancis. Vietnam melakukan perlawanan namun tidak mampu menghadapi penjajah Perancis karena keterbatasan persenjataan sehingga daerah-daerah Vietnam mulai ditaklukan pada tahun 1862 dan pada tahun 1987 pemerintahan Perancis diberlakukan secara keseluruhan di semua tingkat pemerintahan Vietnam (Buttinger et al., 2023).

Pada abad ke 19, negara Barat mulai memasuki masa imperialism dan kolonialisme melalui misionaris dan perdagangan. Prancis berupaya menguasai ekonomi dan sumber daya alam Vietnam selama hampir satu abad dengan sistem penjajahan yang keras seperti pengambilan hak atas tanah warga dan eksploitasi tenaga kerja (Hariyadi, 2018). Intelektual Vietnam telah menyadari perlunya reformasi untuk menyelamatkan kemerdekaan negara dengan merencanakan reformasi yang diusulkan ke Dinasti Ngunyen namun ditolak sehingga Vietnam terjerumus dalam keterbelakangan dan menjadi koloni selama hampir 100 tahun (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023).

Pada abad ke-20M sekitar tahun 1920, gerakan perlawanan terhadap Perancis mulai berkembang dengan munculnya partai-partai politik seperti Persatuan Revolusi Pemuda Vietnam (Viet Nam Thanh Nien Cach Menh Hoi) pada tahun 1925 (Higgins, 1975). Pada 3 Februari 1930, Partai Komunis Vietnam didirikan yang menjadi momentum utama sejarah Vietnam dan bangkitnya nasionalisme rakyat Vietnam yang diprakarsai oleh Nguyen Ai Quoc atau dikenal dengan Ho Chi Minh (Buttinger et al., 2023).

Setelah pemerintahan Prancis berakhir, Jepang kemudian menguasai Vietnam hingga Perang Dunia II berakhir (Hariyadi, 2018). Pada Agustus 1945, dibawah Partai Komunis Vietnam yang dipimpin oleh Presiden Ho Chi Minh rakyat Vietnam berjuang merebut kemerdekaan atas negaranya sehingga pada 2 September 1945 Vietnam berhasil merebut kekuasaan dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023)

Setelah merdeka tanggal 2 September 1945, Vietnam kemudian terpecah karena Perjanjian Genewa pada tahun 1954 yang membagi Vietnam menjadi 2 yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan (Hariyadi, 2018). Perjanjian yang disepakati oleh perwakilan Perancis dan Viet Minh menetapkan gencatan senjata dan penetapan zona militer pada garis lintang 17 derajat LU atau disebut paralel ke-17 (Buttinger et al., 2023).

Gambar 4.2 Peta Vietnam Selatan dan Utara

Sumber: Buttinger et al., (2023)

Vietnam Utara dan Vietnam Selatan memiliki ideologi yang berbeda sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan dukungan dari negara besar. Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok sementara Vietnam Selatan didukung oleh Amerika. (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023)

Pada 1947, Vietnam yang telah di pisah sepanjang Paralel Utara ke-17 diharapkan dapat disatukan kembali melalui pemilihan umum sehingga memicu tumbuhnya Front Pembebasan Nasional di Vietnam Selatan pada 20 Desember 1964 (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023).

Perang Vietnam dimulai saat pengebomam Vietnam Utara oleh Vietnam Selatan pada tahun 1964 hingga pasukan Amerika Serikat dipaksa pergi di tahun 1973 melalui perjanjian Paris. Selanjutnya pada 1975 perang Vietnam kembali pecah saat Vietnam Utara atau disebut Tentara Patriotik Vietnam menyerang rezim Saigon (Vietnam Selatan) sehingga Vietnam dapat disatukan kembali (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Kemudian setelah Vietnam Utara berhasil memenangkan perang dan secara resmi Bersatu kembali di tahun 1976 di bawah kekuasaan Partai Komunis Vietnam (Hariyadi, 2018).

Republik Demokratik Vietnam berganti nama menjadi Republik Sosialis Vietnam (*Socialist Republic of Vietnam*) pada tanggal 25 April 1976 dan dilanjutkan dengan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) pada 1977 dan mengusahakan kebangkitan Vietnam secara sosial dan ekonomi pasca perang (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023).

Mengenai hubungan Vietnam dan Amerika Serikat yang semakin erat baik dalam aspek militer maupun ekonomi, Vietnam memiliki kebijakan pertahanan non blok yang didasarkan pada 3 prinsip yaitu tidak ada aliansi miltier, tidak ada pasukan asing di tanah Vietnam, dan tidak bermitra dengan kekuasaan asing untuk memerangi negara lain (Thu, 2018). Selain itu, Vietnam jug membangun hubungan dengan Uni Eropa, Jepang dan

India dalam usahanya mendivesifikasi hubungan internasionalnya dan menyeimbangkan hubungannya dengan dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan China (Council on Foreign Relations, 2023).

4.1.5 Sejarah Hubungan Vietnam dan Cina

Sejak abad ke-3 SM, suku Viet telah berinteraksi dengan dinasti Tiongkok yang mempengaruhi sebagian besar kebudayaan di Vietnam (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Pada sekitar tahun 1870 hingga 1880-an, laskar China yang dikenal sebagai “Black Flags” memainkan peran penting dalam pelawanan Vietnam Utara terhadap Perancis Setelah terlepas dari Perancis tepatnya pada 1950, China merupakan negara pertama yang mengakui Republik Demokratik Vietnam dan terlibat dalam promosi revolusi Vietnam dan jauh lebih terlibat secara langsung untuk mendukung Vietnam

Pada 1951, hubungan perdagangan antara China dan Vietnam didirikan dan diresmikan pada 1952 namun ekspor banyak dilakukan dari China ke Vietnam yang sebagian besarnya merupakan bantuan dari pada perdagangan. Setelah tahun 1975, Vietnam dan China memiliki banyak sengketa khususnya sengketa teritorial contohnya Vietnam menolak klaim Cina atas kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly (Path, 2012). Wilayah perbatasan saat itu sangat penting bagi Vietnam untuk revolusi dan geografi pertahanan sehingga pada 1979 terjadi perang singkat antara Vietnam dan China di perbatasan (Womack, 2000).

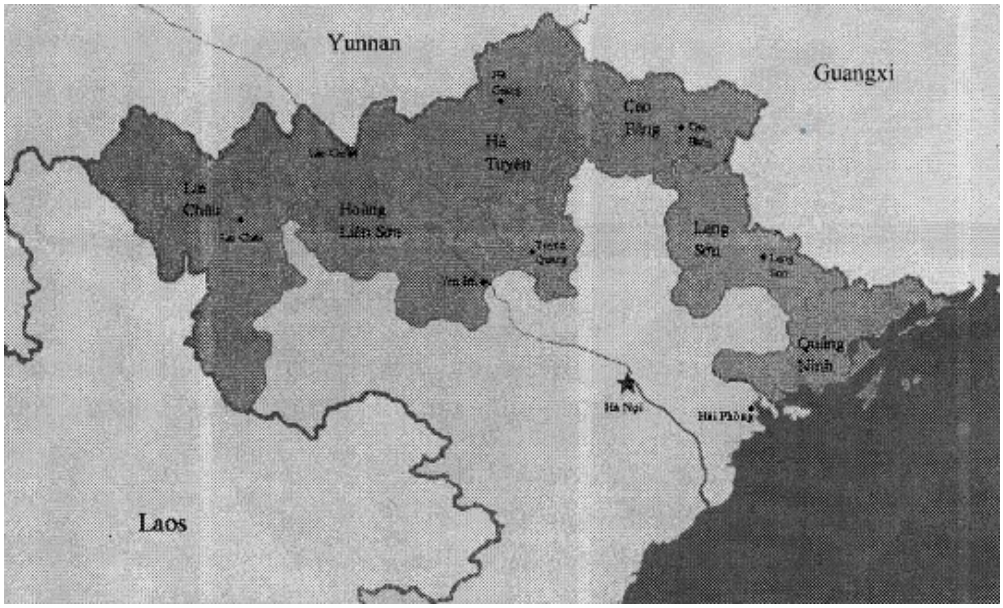

Gambar 4.3 Peta Perbatasan Vietnam dan Cina

Sumber: Womack (2000)

Setelah wilayah Vietnam terpecah menjadi Vietnam Utara dan Selatan pada 1954, kedua negara Vietnam membangun kembali wilayah pasca perang dengan bantuan Uni Soviet dan Tiongkok (Buttinger et al., 2023). Pada 1991, Vietnam melakukan normalisasi hubungan dengan China setelah perang di perbatasan dengan mempromosikan kerjasama bilateral yaitu “good neighbors, good friends, good comrades and good partners” dan berupaya terhadap peluang-peluang ekonomi baru (Thu, 2018) (Devi, 2018) (Womack, 2000). Komoditas Vietnam yang di ekspor ke China berupa berbagai macam bahan mentah, hasil laut, hasil pertanian, serta batu bara sebagai sumber energi untuk industrinya (Devi, 2018). Februai 1999, Vietnam dan China besepakat untuk mempererat hubungan yang dibangun dengan beberapa prinsip yaitu ”*friendly neighbourhood, comprehensive cooperation, durable tability and fututе-oriented outlook*” dan penandatangan beberapa pernjanjian terutama tentang kemanan dan pertahanan (Do, 2007). Kemudian, Vietnam dan China mencapai kesepakatan tentang daerah perbatasan pada 30 Desember 1999, 50 tahun setelah pembentukan Republik Rakyat China dan Republik Demokratik Vietnam (Womack, 2000)

Sejak normalisasi hingga tahun 2005, hubungan bilateral antara Vietnam dan China khususnya pada perdagangan, investasi, dan pariwisata meningkat lebih dari 200 kali lipat. Pada tahun 2005, nilai ekspor Vietnam ke China mencapai nilai US 2,55 miliar dan nilai ekspor China ke Vietnam mencapai US 5 miliar (Do, 2007). Pada 2021 terjadi pembicaraan daring antara Ketua Majelis Nasional Vietnam dan Ketua Kongres Rakya Nasional Tiongkok dimana saling berkontribusi dalam orientasi strategis, menciptakan motivasi dan jaminan politik untuk memperkuat hubungan kedua negara

Pada Desember 2023, Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Hanoi. Dilansir dalam Kompas.com tanggal 28 Desember 2023, pada kunjungan tersebut telah dilakukan penandatanganan atas 37 perjanjian kerja sama antara China dan Vietnam dimana salah satu kesepakatan utamanya adalah proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kunming di Provinsi Yunnan (China) dengan Pelabuhan Haipong di Hanoi dan pengembangan jalur kereta api cepat yang menghubungkan Hanoi dan Ho Chi Minh sekitar sepanjang 1.545 kilometer dengan perkiraan biaya mencapai 62 miliar dolar AS.

4.1.6. Sejarah Hubungan Vietnam dan Amerika

Pada Tahun 1954, Amerika mengirimkan bantuan militer kepada Vietnam Selatan untuk mempertahanankan kedudukan Vietnam Selatan saat proses pembebasan dan unifikasi nasional (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan atau disebut rezim Saigon pada 1960 dengan memberikan bantuan keuangan dan melatih tentara Vietnam Selatan (Buttinger et al., 2023). Pasukan Amerika Serikat kemudian mengerahkan pasukannya ke Vietnam pada tahun 1964 dengan tujuan untuk membendung penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara (Council on Foreign Relations, 2023).

Pada Tahun 1973, Perjanjian Paris yang ditandatangani memulihkan perdamaian di Vietnam pasukan dari Amerika Serikata ditarik sehingga perang saudara di Vietnam dihentikan (Consulate of The Socialist Republic of Vietnam, 2023). Sejak perang Vietnam selesai, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi dan memutus hubungan diplomatik dengan Vietnam sehingga Vietnam dan Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik selama lebih dari 15 tahun (babson, 2022). Sejak 30 April 1975, embargo perdagngan Amerika Serikat diberlakukan ke seluruh Vietnam (Vietnam Consulate, 2023). Pada 1970 hingga 1980, perekonomian Vietnam sangat lemah karena besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk militer dengan sistem ekonomi komandonya sehingga menyebabkan Vietnam sangat bergantung pada Uni Soviet (Council on Foreign Relations, 2023). Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, Vietnam mulai memperbaiki hubungan dengan negara-negara untuk menyelamatkan ekonominya dan mengahiri isolasinya (Rwanda, 2019).

Pada 29 September 1978 Holbrokee, Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Asia Timur Amerika Serikat, dan Nguyen Co Thach, Pejabat Tinggi Vietnam, menetujui normalisasi hubungan antar Vietnam dan Amerika Serikat namun masih ditangguhkan karena beberapa keraguan dari Amerika Serikat yaitu: (Nangoi, 2023)

a. Amerika Serikat tidak menyetujui tuntutan dari Vietnam untuk membayar biaya rampasan perang sebesar 3,5 miliar dollar.
b. Amerika Serikat memprioritaskan hubungan baiknya dengan China untuk menanggulangi ancaman dari Uni Soviet melihat hubungan Vietnam dan China memburuk.
c. Amandeemen undang-undang bantuan luar negeri tidak mendukung normasilsasi dengan Vietnam

Pada 1 Agustus 1987, Jenderal John Vessey sebagai utusan Presiden mengunjungi Vietnam untuk membahas isu kemanusiaan (Vietnam Consulate, 2023). Vietnam dan Amerika Serikat mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan melakukan kerjasama terkait

prisoner of war/missing in action (POW/MIA) pada 1987. Prisoner of war/missing in action adalah informasi terkait tahanan atau tentara Amerika Serikat yang hilang saat perang. Selain itu, Amerika Serikat juga membayar bantuan rekontruksi setelah perang kepada Vietnam (Buttinger et al., 2023).

Pada 1986, Vietnam mulai melakukan reformasi ekonomi besar-besaran yang disebut Doi Moi untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi, menciptakan peluang bagi sektor swasta, dan memulihkan hubungan internasionalnya (Buttinger et al., 2023; Vietnam Consulate, 2023). Sejak tahun 1989, Amerika Serikat mendukung pemberian bantuan kepada Vietnam terkait penanggulangan dampak dari persenjataan yang tidak meledak saat perang serta dampak lingkungan dari Agen Orange yang disemprotkan pasukan Amerika Serikat selama perang (Congressional Research Service, 2023). Secara resmi Vietnam dan Amerika memperbaiki hubungan diplomatiknya pada 1991 dengan mengizinkan turis, veteran, jurnalis, dan pengusaha untuk mengunjungi Vietnam (Vietnam Consulate, 2023). Amerika Serikat menawarkan pengingkatan kerjasama dan membangun hubungan diplomatik dengan Vietnam meliputi: (Congressional Research Service, 2023)

a. Bekerjasama mengenai prisoner of war/missing in action (POW/MIA)
b. Mengosongkan kamp-kamp dan mengizinkan pengungsi dari Amerika Serikat Kembali
c. Penyelesaian konflik dan membantu pencapaian perjanjian damai di Kamboja
d. Bantuan kemanusiaan untuk Vietnam
e. Pelonggaran embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Vietnam

Sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa bernama “Vatico” berdiri pertama kali di Vietnam pada 25 April 1993. Pada tahun yang sama, Presiden Amerika Serikat memberikan bantuan

keuangan internasional kepada Vietnam dan selanjutnya diikuti dengan pencabutan embargo perdagangan (Vietnam Consulate, 2023). Pada 11 Juli 1995, Presiden Amerika Serikat Cliton dan Perdana Menteri Vietnam Vo Van Kiet mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik kembali antara Amerika Serikat dan Vietnam. Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Warren Christopher di Hanoi (Vietnam Consulate, 2023). Sejak saat itu, Vietnam diberikan pengecualian oleh Amerika Serikat terkait kebijakan luar negerinya. Seperti pada Januari 1999, Amerika Serikat memberikan “most favored status” atau status paling diutamakan untuk perusahaan Amerika Serikat yang berada di Vietnam. Selain itu pada 25 Juli 1999, Vietnam dan Amerika Serikat menandatangi perjanjian perdagangan bilateral secara prinsip di Hanoi (Vietnam Consulate, 2023).

Pada 2001, Vietnam dan Amerika Serikat banyak melakukan hubungan diplomatik di berbagai aspek. Salah satunya yaitu Amerika Serikat dan Vietnam mengadakan pertemuan yang membahas tentang Bilateral Trade Agreement (BTA) yang diberlakukan pada Desember 2001 sehingga hubungan antara Vietnam dan Amerika Seritkat di bidang perdagangan internasional semakin dekat (Vietnam Consulate, 2023) (Nguyen, 2023). Bilateral Trade Agreement (BTA) adalah perjanjian perdagnagn bilateral Amerika Serikat dan Vietnam berupa dokumen komprehensif yang mencakup perdagangan barang, perlindungan hak kekayaan intelektual, perdagangan jasa, perlindungan investasi, fasilitasi bisnis, dan tranparansi (U.S. Mission Vietnam, 2023). Tahun 2006, Vietnam dan Amerika Serikat menandatangai Trade and Iestment Framework Agreement (Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi) dan membentuk US-Vietnam Council on Trade and Investment (Dewan Perdagangan dan Investasi AS-Vietnam) yang diketuai oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat dan Kementerian Perdagangan Vietnam (USTR, 2007).

Pada 2007, Vietnam berhasil bergabung dalam WTO (World Trade Organization) setelah perekonomiannya berkembang pesat yang salah satunya dikarenakan membaiknya hubungan dengan Amerika Serikat (Vietnam Consulate, 2023). Pada 2009, hubungan diplomatik dan perdagangan yang semakin membaik menjadikan Amerika Serikat menjadi investor asing terbesar di Vietnam dengan total investasi sebesaar 9,8 miliar USD (Vietnam Consulate, 2023). Selain itu sejak 2010, Amerika Serikat dan Vietnam membentuk kemitraan dalam banyak aspek termasuk aspek keamanan dan ekonomi yang didorong oleh kepetingan bersama terhadap pengaruh China (Congressional Research Service, 2023).

Hubungan antara Vietnam dan Amerika Serikat terus membaik dengan berlangsungnya perjanjian dan kongres bilateral maupun multilateral (Vietnam Consulate, 2023). Pemulihan hubungan merupakan upaya Vietnam untuk mengatasi ancaman dari keunggulan China khususnya terkait Laut China Selatan (Council on Foreign Relations, 2023). Investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Amerika Serikat terus meningkat sejak memburuknya hubungan Amerika Serikat dan China (Nguyen, 2023).

Neraca perdagangan Vietnam terus meningkat dan menjadi pemasok Amerika Serikat terbesar ke-6 dan pasar ekspor Amerika Serikat ke-28 pada tahun 2020. Sejak tahun 2012, ekspor Vietnam menyumbang 60% PDB dan terus meningkat akibat ketegangan politik dan ekonomi Amerika Serikat dan China (Nguyen, 2023). Masalah perdagangan antara Amerika Serikat dan Vietnam mulai muncul. Pada 2020, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengidentifikasi bahwa Vietnam terlah memanipulasi mata uang. Selain itu, terdapat beberapa masalah seperti tidak sesuaian mutu ekspor ikan lele, sengketa kayu illegal, dan sebagainya (Nguyen, 2023).

Saat ini, Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar Vietnam dengan nilai ekspor mencapai 97 miliar dolar pada tahun 2021 yang membantu pertumbuhan ekonomi dan sumber investasi asing bagi

Vietnam (International Trade Administration, 2022). Pada September 2023, Presiden Amerika Serikat Joseph Biden mengunjungi Hanoi dan bertemu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam untuk membahas kemitraan Amerika Serikat dan Vietnam dan meningkatkan status hubungan bilateralnya dari “kemitraan komprhensif” (comprehensive partnership) menjadi “kemitraan strategis komperhensif” (comprehensive strategic partnership) (Congressional Research Service, 2023). Dilansir dalam Kompas.com tanggal 28 Desember 2023 bahwa pada kunjungan tersebut telah ditandatangani beberapa kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi dan teknologi yakni kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing 737 Max senilai 7,8 miliar dolar AS, kerjasama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI) antara Microsoft, Nvidia, dan Intel dengan sebuah perusahaan teknologi di Vietnam, serta pengembangan industri semikonduktor untuk pasar global secara terpusat di Vietnam.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik-teknik ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait yang memahami objek penelitian yaitu Kedutaan Besar Indonesia di Vietnam, Pusat Informasi Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, dan akademisi. Berikut Coding informan dalam proses pengumpulan data dengan tehnik wawancara:

Tabel 4.1 *Coding Informan*

No	Teori	Kode	Dimensi	Indikator	Pejabat
1	Teori Pertahanan	AA 1	Pertahanan Nirmiliter	Kebijakan	A1, B1
			Pertahanan Militer	Kebijakan	A1, B1
2	Teori Ekonomi Internasional	AA 2	Perjanjian Dagang	Perjanjian Dagang Bilateral	A1, C1
				Perjanjian Dagang Regional dan Multilateral	A1, C1
3	Teori Ekonomi Pertahanan	AA 3	Aspek	Ekonomi	A1, B1, C1
				Pertahanan	A1, B1
4	Teori Manajemen Pertahanan	AA 4	Aspek	Manajemen Pertahanan	A1, B1
5	Teori Pertumbuhan Ekonomi	AA 5	PDB	Pendekatan Pengeluaran	A1, C1
6	Teori Foreign Direct Investment	AA 6	Nilai	Nilai	A1, B1
			Sektor	Sektor	A1
			Sumber	Sumber	A1
			Nilai Mata Uang	Nilai Tukar Dong terhadap USD	A1, B1, C1
			Stabilitas Politik dan Birokrasi	Bentuk Pemerintahan	A1, B1, C1
				Kondisi Politik	A1, B1, C1
				Kepatuhan dan Dukungan Masyarakat	A1, B1
				Birokrasi	A1, C1
			Insentif Pajak dan Dukungan	Kebijakan Insentif Pajak	A1, C1
				Dukungan Pemerintah	A1, C1
			Lokasi	Lokasi	A1, C1
			SDM	Upah Tenaga Kerja	A1, B1, C1
				Angkatan Kerja	A1, C1
				Pendidikan	A1, C1
				Produktivitas Tenaga Kerja	A1, C1

No	Teori	Kode	Dimensi	Indikator	Pejabat
			Infrastruktur	Infrastruktur	A1, C1
			Stabilitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	A1, C1
7	Ekspor-Impor	AA7	Ekspor Impor	Produk	A1, C1
				Nilai	A1, C1
			Impor Kebijakan	Produk	A1, C1
				Kebijakan	A1, C1
			Kebijakan	FDI	A1, B1, D1
8	Strategi	AA8	Kebijakan Infrastruktur	Ekspor-Impor	A1, B1
				Infrastruktur	A1, D1
			Sumber Daya	Bahan Baku	A1, D1
			Sumber Daya Politik dan Birokrasi	SDM	A1, D1
				Integritas	A1, D1
			Politik dan Birokrasi Industri Pendukung	Birokrasi	A1, D1
				Sektor Keuangan	A1
			Industri Pendukung	Sektor Ekspedisi	A1, D1

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Keterangan Informan:

A1 : Atase Pertahanan dan Atase Perdagangan Kedubes Indonesia di Vietnam;

B1 : Kabid Asia Pasifik Pusinfo Strahan Kemhan beserta tim;

C1 : Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kemendag beserta tim;

D1 : Akademisi/ Dosen Universitas Trisakti

4.2.1 Ekspor-Impor

4.2.1.1 Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina

Perdagangan Amerika Serikat dengan Cina telah menjadi bagian integral dari dinamika perdagangan global sehingga hubungan dagang

mereka telah mempengaruhi pasar global, rantai pasokan, serta kebijakan perdagangan internasional. Namun dinamika perdagangan antara kedua negara tersebut tidak selalu lancar disebabkan beberapa isu alasan yakni keinginan AS untuk mengurangi perdagangan; perlindungan kekayaan intelektual dan teknologi; pencegahan pertumbuhan kekuatan militer Cina; dan pengurangan defisit anggaran AS (Kapustina L. et al, (2020). Pada tahun 2018, kedua negara tersebut mulai terlibat konflik (Kalsie & Arora, 2019). Ketegangan perdagangan yang disebut Perang Dagang AS-Cina telah menyebabkan ketidakstabilan di pasar global dan hubungan ekonomi global. Ini bermula dari ketidakpuasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas defisit perdagangan dengan Cina. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menggambarkan defisit perdagangan AS-Cina:

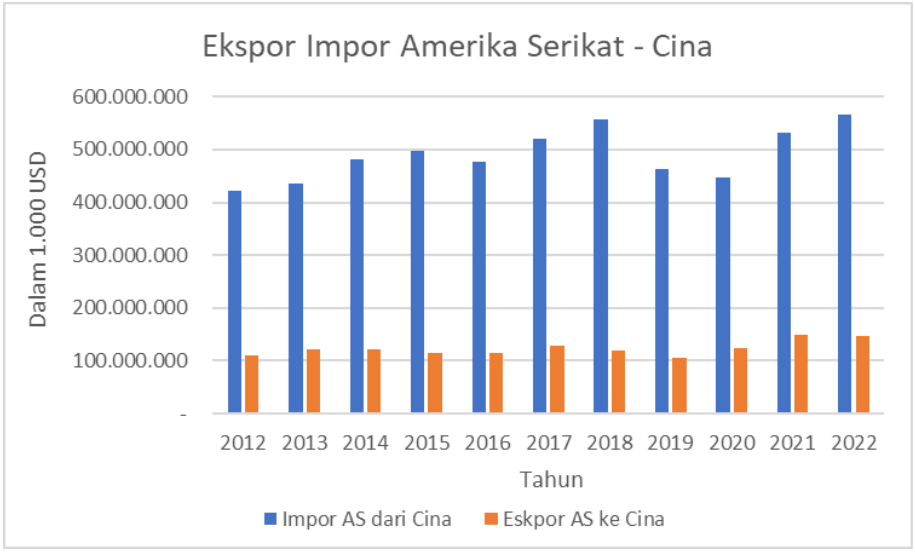

Grafik 4.6 Ekspor Impor Amerika Serikat - Cina

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina kurang berhasil mengurangi defisit secara signifikan bagi Amerika Serikat. Perang dagang ini tidak memiliki pemenang dan dapat menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi global (Kapustina L. et al, (2020). Donald Trump melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi defisit perdagangan dengan Cina, salah satunya

menerapkan kenaikan tarif impor. Cina juga melakukan hal yang sama untuk membalas kebijakan tersebut. Bown (2021) merangkum kebijakan pengenaan tarif impor beserta pembalasannya yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Cina selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kebijakan Tarif AS-Cina Tahun 2018 – 2021

Tahun 2018	
7 Feb	AS menaikan tarif pasal 201 panel surya dan mesin cuci
23 Mar	AS menaikkan tarif pasal 232 baja dan aluminium (sementara waktu kecuali Argentina, Australia, Brasil, Uni Eropa, Kanada, Meksiko dan Korsel)
2 Apr	Pembalasan Cina terhadap tarif pasal 232
1 Mei	Cina menetapkan pemotongan tarif Most Favored Nation (MFN) obat-obatan
1 Jun	AS mengakhiri pengecualian tarif pasal 232 untuk baja dan aluminium kepada Uni Eropa, Kanada dan Meksiko (Argentina, Brazil dan Korea Selatan kesepakatan kuota)
1 Jul	Cina menetapkan pemotongan tarif MFN untuk produk konsumsi, otomotif dan produk IT
6 Jul	AS menaikkan tarif pasal 301 sebesar 25% ($34miliar) dan pembalasan Cina ($34miliar)
13 Agus	AS menaikkan tarif pasal 232 menjadi 50% baja dari Turki
23 Agus	AS menaikkan tarif pasal 301 sebesar 25% ($16miliar) dan pembalasan Cina ($34miliar)
24 Sept	AS menaikkan tarif pasal 301 sebesar 10% ($200miliar) dan pembalasan Cina ($60miliar)
1 Nov	Cina menetapkan pemotongan tarif MFN untuk barang industri
Tahun 2019	
1 Jan	Cina menangguhkan tarif balasan atas impor mobil dan suku cadang AS yang berlaku 6 Juli 2018
1 Jan	Cina mengurangi tarif MFN
7 Feb	AS mengurangi tarif Pasal 201 panel surya dan mesin cuci (sesuai awal)
20 Mei	AS mengecualikan Kanada dan Meksiko atas tarif Pasal 232 untuk baja dan aluminium
21 Mei	AS mengurangi tarif Pasal 232 atas impor baja dari Turki menjadi 25% dari 50%
1 Jun	AS menaikkan tarif Pasal 301 menjadi 25% dari 10% atas impor senilai $200 miliar

	Cina membalas dengan menaikkan tarif pada sebagian dari daftar produk yang terkena tarif tanggal 24 September 2018
1 Jul	Cina mengurangi tarif MFN produk TI
1 Sept	AS mengenakan tarif 15% atas impor dari Cina senilai $101 miliar Cina membalas dengan menaikkan tarif impor dari AS senilai $75 miliar
18 Okt	AS mengenakan tarif Pasal 301 pada impor produk Eropa tertentu setelah WTO mengizinkan pembalasan dalam sengketa Pesawat Terbang Sipil Besar Uni Eropa
13 Des	AS mengumumkan kesepakatan dengan Cina yang akan ditandatangani Januari 2020. AS membatalkannya penerapan tarif 15% atas impor dari Cina senilai $151 miliar, dan Cina juga membatalkan rencana pembalasan.
Tahun 2020	
1 Jan	Cina mengurangi tarif MFN pada produk tertentu. AS mengurangi tarif beberapa impor dari Jepang seiring berlakunya Perjanjian Perdagangan AS-Jepang
15 Jan	AS dan Cina menandatangani Perjanjian Tahap Satu di Washington, yang mulai berlaku pada 14 Februari 2020. Cina setuju untuk membeli tambahan ekspor barang dan jasa AS senilai $200 miliar 2020 dan 2021.
7 Feb	AS mengurangi tarif Pasal 201 pada panel surya dan mesin cuc
8 Feb	AS memperluas tarif Pasal 232 untuk beberapa impor produk yang menggunakan baja dan aluminium termasuk dari Cina
14 Feb	Perjanjian Tahap Satu mulai berlaku AS mengurangi tarif impor dari Tiongkok senilai $101 miliar menjadi 7,5% dari 15%. Cina mengurangi tarif pembalasan yang diberlakukan pada 1 September 2019 sebesar 50%.
5 Maret	AS menyesuaikan tarif Pasal 301 pada impor produk Eropa tertentu sebagai bagian dari otorisasi WTO pembalasan dalam sengketa Pesawat Terbang Sipil Besar Uni Eropa
1 Jul	Cina memotong tarif MFN pada produk TI
16 Agus	AS menerapkan kembali tarif Pasal 232 sebesar 10% pada produk aluminium tertentu yang diimpor dari Kanada
1 Sept	AS menghapuskan pengenaan kembali tarif Pasal 232 sebesar 10% produk aluminium tertentu diimpor dari Kanada (diumumkan 27 Oktober 2020 dan berlaku surut).

Tahun 2021	
1 Jan	Cina mengurangi tarif MFN pada produk-produk tertentu. AS mengurangi tarif terhadap beberapa impor dari Jepang seiring dengan diberlakukannya Perjanjian Perdagangan AS-Jepang
12 Jan	AS menyesuaikan tarif Pasal 301 pada impor produk Eropa tertentu sebagai bagian dari otorisasi WTO pembalasan dalam sengketa Pesawat Terbang Sipil Besar Uni Eropa
20 Jan	Pemerintahan Trump meninggalkan jabatannya.

Sumber: Bown (2021)

Perang dagang AS-Cina yang dimulai tahun 2018 mulai berpengaruh pada tahun 2019 dimana nilai impor AS dari Cina sebesar USD 463.874.377.000 mengalami penurunan sebesar 17% dari nilai impor tahun 2018 sebesar USD 556.164.827.000. Tren menurun impor tersebut berlanjut ke tahun 2020 dimana nilai impor AS dari Cina sebesar USD 447.361.852.000 mengalami penurunan sebesar 4% dari nilai impor sebesar tahun 2019 sebesar USD 463.874.377.000. Namun tren penurunan tersebut terhenti pada tahun 2020, impor AS dari Cina kembali naik pada tahun 2021 menjadi sebesar USD 531.579.970.000 dimana mengalami kenaikan 19% dari nilai impor 2020 sebesar USD 447.361.852.000. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan impor Amerika Serikat dari Cina periode 2012 sampai 2022:

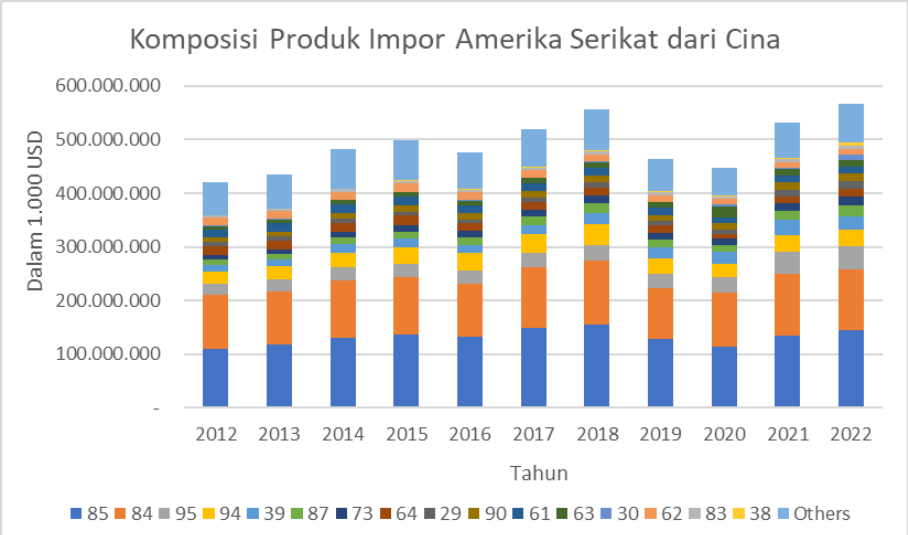

Grafik 4.7 Komposisi Produk Impor Amerika Serikat - Cina

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Tabel diatas juga menunjukkan komposisi produk Impor Amerika Serikat dari Cina berdasarkan klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) merupakan produk impor terbesar dengan nilai impor pada tahun 2022 sebesar USD145.944.233.000 atau 26% dari total nilai impor sebesar USD565.694.449.000. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk impor Amerika Serikat yaitu HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) dengan nilai impor tahun 2022 sebesar USD112.807.226.000 dan HS Code 95 (Perlengkapan mainan, permainan dan olah raga; bagian dan aksesorisnya) USD 24.553.246.000.

Sedangkan efek perang dagang terhadap ekspor Amerika Serikat ke Cina mulai terpengaruh pada tahun 2018 dimana nilai ekspor AS dari Cina sebesar USD 119.007.808.000 mengalami penurunan sebesar 7,5% dari nilai ekspor tahun 2017 sebesar USD 128.625.154. Tren menurun ekspor tersebut berlanjut ke tahun 2019 dimana nilai ekspor AS dari Cina sebesar USD 105.473.129.000 mengalami penurunan sebesar 11% dari nilai ekspor sebesar tahun 2018 sebesar USD 119.007.808.000. Namun tren penurunan tersebut terhenti pada tahun 2019, ekspor AS dari Cina kembali naik pada tahun 2020 menjadi sebesar USD 123.436.942.000 dimana mengalami kenaikan 17% dari nilai ekspor 2019 sebesar USD 105.473.129.000. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan ekspor Amerika Serikat ke Cina periode 2012 sampai dengan 2022:

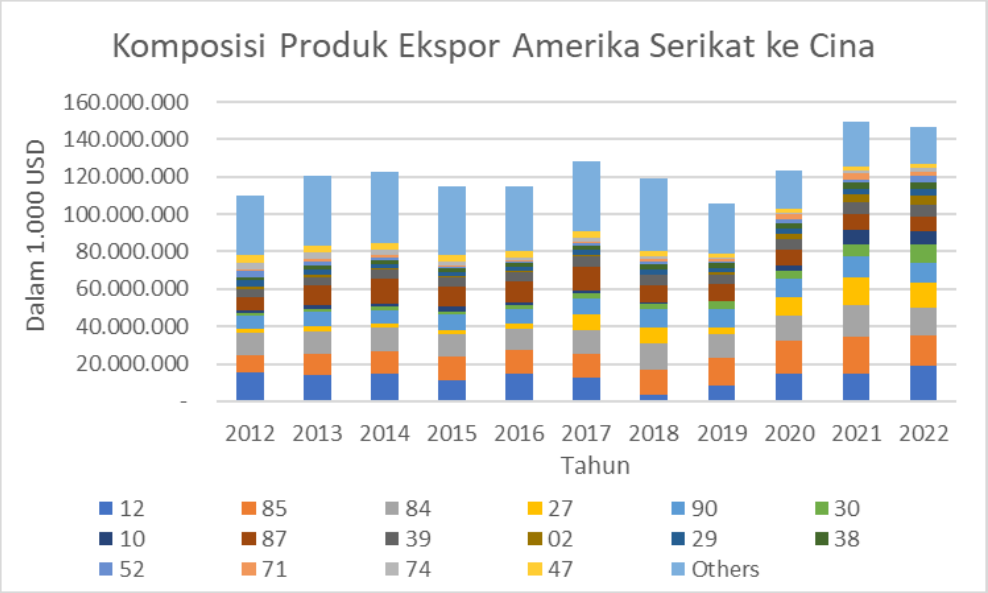

Grafik 4.8 Komposisi Produk Ekspor Amerika Serikat ke Cina

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan ekspor Amerika Serikat ke Cina dalam klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 12 (Biji minyak dan buah-buahan yang mengandung minyak; aneka biji-bijian, biji-bijian dan buah-buahan, tanaman industri atau obat-obatan; jerami dan pakan ternak) merupakan produk ekspor andalan AS dengan nilai ekspor pada tahun 2022 sebesar USD18.878.727.000 atau 12,87% dari total nilai ekspor sebesar USD146.639.300.000. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk ekspor andalan AS yaitu HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar USD16.012.282.000 dan HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) USD 14.916.840.000.

4.2.1.2 Kondisi Ekspor Impor Vietnam

Nilai ekspor Vietnam semakin meningkat setiap tahun. Nilai ekspor Vietnam meningkat mencapai 220% dalam kurun watu 10 tahun dimana nilai ekspor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar USD114.159.551.730,- naik hingga USD365.198.624.200 pada tahun 2022. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang membanggakan bagi negara Vietnam.

Ekspor Vietnam dalam klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) merupakan produk ekspor andalan Vietnam dengan nilai ekspor pada tahun 2022 sebesar USD140.341.805.990,- atau 38% dari total nilai ekspor sebesar USD365.198.624.200,-. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk ekspor andalan Vietnam yaitu HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar USD29.506.865.160,- dan HS Code 64 (Alas kaki; pelindung kaki dan sejenisnya) USD 24.553.246.000,-. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan komposisi ekspor Vietnam berdasarkan klasifikasi jenis produk:

Grafik 4.9 Ekspor Vietnam Periode 2012 s.d 2022

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Kenaikan impor Vietnam juga selaras dengan kenaikan ekspor meskipun persentasenya lebih rendah sebesar 210% dalam kurun waktu 10 tahun. Nilai impor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar USD113.428.218.950 naik hingga USD352.411.027.920 pada tahun 2022.

Produk dengan HS Code 85 (mesin dan peralatan listrik serta bagiannya) juga merupakan produk impor terbesar Vietnam dengan nilai impor pada tahun 2022 sebesar USD122.722.679.900 atau 34,8% dari total impor sebesar USD352.411.027.920. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk impor terbesar Vietnam yaitu HS Code 27 (Bahan bakar mineral, minyak mineral dan hasil penyulingannya) dengan nilai impor tahun 2022 sebesar USD26.884.109.700 dan HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) USD 25.656.451.080. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan komposisi impor Vietnam berdasarkan klasifikasi jenis produk:

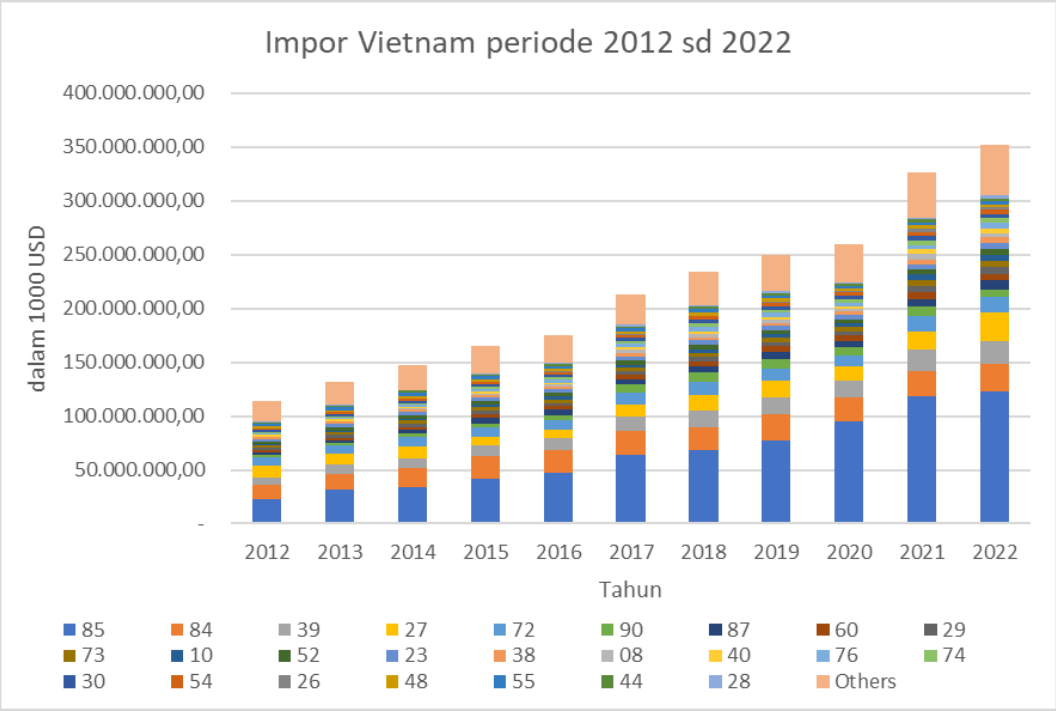

Grafik 4.10 Impor Vietnam Periode 2012 s.d 2022

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.2.2 *Foreign Direct Investment*

4.2.2.1 Strategi *Foreign Direct Investment* Vietnam periode 2021-2030

Pemerintah Vietnam telah menetapkan Strategi *Foreign Direct Investment* periode 2021-2030 sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengarahkan dan merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola investasi langsung asing (FDI) dengan optimal selama satu dekade yang akan datang. Strategi ini memiliki empat tujuan sebagai berikut:

a. Penguatan lembaga dan kebijakan, serta peningkatan kualitas dan efektivitas kerja sama dalam penanaman modal asing hingga tahun 2030.
b. Meningkatkan persentase investasi dari negara dan kawasan tertentu di beberapa daerah sebesar lebih dari 70% pada periode 2021-2025 dan mencapai 75% pada periode 2026-2030. Negara dan kawasan tersebut melibatkan Korea, Jepang, Singapura, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Filipina, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
c. Menambah jumlah perusahaan multinasional yang masuk dalam 500 perusahaan terbesar di dunia versi Majalah Fortune (AS) di Vietnam sebanyak 50%.
d. Pada tahun 2030, Vietnam bertujuan menjadi salah satu dari tiga negara terkemuka di ASEAN dan berada dalam kelompok 60 negara terkemuka di dunia menurut peringkat lingkungan bisnis dari Bank Dunia.

Strategi Pemerintah Vietnam dalam meningkatkan kerjasama FDI periode 2021-2030 adalah sebagai berikut:

a. Pengimplementasian peraturan yang telah dikeluarkan yaitu Keputusan Politbiro No. 50-NQ TW; Keputusan Kementerian Pemerintah No. 23-NQ/TW, dan Resolusi Komite Eksekutif Pusat ke-12 tanggal 3 Juni 2017 No. 10-NQTW; Keputusan Pemerintah No. 58/NQ-CP; Keputusan Perdana Menteri No. 1851UQD-TTg; Keputusan Perdana Menteri No. 67/QD-TTg.

b. Perbaikan lingkungan investasi dunia usaha, meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya saing perekonomian. Strategi ini berfokus pada peningkatan indikator daya saing Vietnam sesuai dengan kriteria penilaian Bank Dunia, Organisasi Kekayaan Intelektual dan Forum Ekonomi Dunia; indikator institusi, infrastruktur dan pasar komoditas. Strategi yang diterapkan sebagai berikut:

    1) Institusi

        Beberapa langkah untuk memperkuat institusi yaitu memperkuat partisipasi kementerian, cabang, dan daerah yang proaktif, kuat, seragam, dan substantif; meningkatkan prediktabilitas dan transparansi dalam pengembangan dokumen hukum; menerapkan prosedur investasi bisnis fleksibel pasca pemeriksaan; mengontrol ketat pemberlakuan persyaratan investasi bisnis; penyempurnaan peraturan hukum perselisihan penanaman modal; menciptakan koridor hukum bagi pengembangan dan pengelolaan bentuk serta metode investasi baru sesuai dengan praktik internasional; mengontrol ketat perilaku ramah terhadap investor asing dalam proyek besar dan sektor strategis dengan perhatian khusus pada risiko dampak negatif terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum; mempercepat implementasi dan pengembangan e-Government; dan

mengevaluasi solusi kelembagaan unggul yang telah diujicobakan atau diterapkan.

2) Infrastruktur

Beberapa langkah diterapkan untuk meningkatkan infrastruktur yaitu merencanakan pembangunan infrastruktur secara sinkronisasi modern dan strategis; menerapkan mekanisme dan kebijakan menguntungkan bagi sektor perekonomian, termasuk sektor penanaman modal asing di bidang infrastruktur; dan mengeluarkan daftar proyek prioritas dalam infrastruktur untuk menarik investor.

3) Pasar komoditas

Beberapa langkah dalam pasar komoditas yaitu melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatang; meninjau kebijakan dan hambatan tarif dan non-tarif; membentuk wadah dan memastikan semua jenis pasar beroperasi efektif; dan memperkuat liberalisasi pasar faktor produksi.

c. Pengembangan Ekosistem Iptek dan Inovasi Kreatif

Beberapa langkah dalam pengembangan ekosistem iptek dan inovasi kreatif yaitu membangun dan mengembangkan Pusat Inovasi Nasional; menerapkan Program Aksi untuk berpartisipasi proaktif dalam Revolusi Industri Keempat sesuaiKeputusan Pemerintah Nomor 50/NQ-CP dan Keputusan Politbiro Nomor 52-NQ/TW; membangun dan mengembangkan ekosistem sains, teknologi, dan inovasi dengan mekanisme manajemen yang fleksibel; memiliki kebijakan untuk mendorong kerja sama, transfer teknologi, dan tata kelola berdasarkan kesepakatan dan kesukarelaan bagi dunia usaha Vietnam; menyelesaikan kerangka hukum

untuk menetapkan, melindungi dan mengkomersialkan hak kekayaan intelektual.

d. Melakukan Inovasi dan meningkatkan Persaingan dalam Menarik Investasi Asing

Beberapa langkah yang dilakukan yaitu mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan investasi asing dengan cara yang adil antar daerah dan sesuai dengan orientasi, perencanaan, kebutuhan pembangunan, dan dalam rantai produksi global; kebijakan insentif investasi akan dipertimbangkan berdasarkan output (nilai tambah, komponen berteknologi tinggi, penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, dan partisipasi dalam rantai pasok global); pengembangan kelembagaan dan kebijakan kawasan ekonomi, industri, dan teknologi tinggi.

e. Pengembangan Industri Pendukung dan Terkait

Beberapa langkah yang dilakukan yaitu mengembangkan industri pendukung guna menghindari investasi yang stagnan, menyebar dan tidak efektif; mengembangkan mekanisme insentif investasi untuk meningkatkan hubungan antara investasi asing dan investasi dalam negeri; peningkatan hukum untuk teknologi tinggi.

f. Peningkatan Kapasitas Internal dan Keunggulan Kompetitif

Beberapa Langkah yang dilakukan yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja dan faktor produksi berupa membentuk Komite Produktivitas Nasional, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi pendidikan dan platihan dan memperkuat Kerjasama internasional di bidang pelatihan; pengembangan bisnis dengan produk yang memiliki keunggulan kompetitif; melakukan penelitian untuk membangun pusat keuangan daerah; meningkatkan kapasitas perusahaan dalam negeri berupa mengembangkan

bisnis yang terintegrasi internasional, mempromosikan prerusahaan dalam negeri, membangin database perusahaan dalam negeri guna sumber informasi bagi investor asing; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa memperbaiki institusi ketenagakerjaan sesuai praktik internasional, memperkuat pelatihan professional, mendorong pelatihan online, mendorong perusahaan penanaman modal asing memingkatkan kualitas pekerja lokal, menggunakan talenta pekerja yang telah bekerja atau pelatihan di luar negei, mendorong Pendidikan kejuruan global, membangun sistem informasi pasar tenaga kerja.

g. Peningkatan integrasi ekonomi dan posisi Vietnam secara Internasional

   Beberapa langkah yang dilakukan yaitu proaktif terlibat dalam integrasi internasional, mendukung dunia usaha dalam integrasi ekonomi internasional, melindungi kepentingan Vietnam dalam perselisihan ekonomi ninternasional, melindungi kekayaan intelektual Vietnam.

h. Modernisasi dan diversifikasi upaya promosi investasi

   Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan inovasi dalam efektivitas promosi investasi, proaktif melakukan pendekatan melalui berbagai cara,

i. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan negara terhadap penanaman modal asing

   Beberapa langkah yang dilakukan yaitu meninjai implementasi kebijakan yang tidak konsisten antar daerah, menjamin efisiensi ekonomi-sosial-lingkungan sesuai perencanaan, mengkonsolidasikan aparatur di seluruh tingkat pemerintahan secara efektif, efisien dan bijaksana, menyederhanakan pelaporan berkala perusahaan kepada otoritas yang berwenang, penanganan secara efektif proyek

yang menyebabkan pencemaran lingkungan hingga proyek yang tidak memenuhi komitmen, dan integrasi database sistem penanaman modal pada otoritas yang terkait (ketanakerjaan, pertanahan, konstruksi, pajak, kepabeanan, perbankan, devisa, sekuritas dan daerah).

Pemerintah Vietnam telah menetapkan strategi secara kompleks yaitu arahan mengimplemnetasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan; memperbaiki lingkungan investasi; mengembangkan iptek dan inovasi kreatif; inovasi dalam menarik investasi asing; mengembangkan industry pendukung dan terkait; meningkatkan kapasitas internal; meningkatkan efektivitas integrasi ekonomi internasional; modernisasi dan diversifikasi promosi investasi; dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan negara terhadap penanaman modal asing. Semua langkah ini diarahkan pada pencapaian tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Vietnam, menarik investasi asing, meningkatkan inovasi dan infrastruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat posisi internasional Vietnam dalam ekonomi global.

4.2.2.2 Regulasi *Foreign Direct Investment*

Vietnam belum memiliki Undang-Undang yang mengatur *Foreign Direct Investment* secara spesifik, namun berupa Undang-Undang mengenai penanananaman modal yang berlaku bagi investor asing dan domestik. Pada tanggal 17 Juni 2020, Pemerintah Vietnam telah menerbitkan kebijakan baru dengan menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya No. 67/2014/QH13 yaitu Undang-Undang No. 61/2020/QH14 (LOI 2020) mengenai Penanaman Modal yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Aturan mengenai pelaksanaan UU tersebut berupa SK No 31/2021/ND-CP tanggal 26 Maret 2021. Dengan penerbitan regulasi terbaru ini, Pemerintah Vietnam berupaya untuk

meningkatkan daya tarik bagi investasi asing, menciptakan keselarasan dari berbagai aturan, dan tetap mempertimbangkan tinjauan pertahanan dan keamanan nasional dalam mengelola investasi asing.

Terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal Vietnam (LOI 2020) sudah pasti memberikan dampak signifikan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI). Beberapa poin penting dalam aturan tersebut yaitu:

a. Menetapkan sektor dan kegiatan perdagangan yang dilarang

   LOI 2020 menerangkan sektor-sektor dan kegiatan perdagangan yang dilarang untuk menerima investasi yaitu zat narkotika, bahan kimia dan mineral tertentu, serta spesimen spesies fauna dan flora liar; prostitusi; perdagangan manusia; cloning manusia; petasan dan jasa penagih hutang. Pemerintah Vietnam menetapkan "daftar negatif" untuk investasi asing menunjukan semua sektor terbuka untuk investasi asing kecuali sektor yang secara spesifik dilarang sehingga memberikan kejelasan lebih besar bagi investor asing tentang sektor dan kegiatan perdagangan untuk investasi. LOI ini menguatkan struktur hukum investasi dan prinsip moral Vietnam dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang dilarang dalam investasi. Hal ini menegaskan keseriusan Vietnam dalam memastikan bahwa investasi yang diterima tidak merugikan aspek-aspek sosial, moral, pertahanan, dan keamanan negara.

b. Menetapkan sektor dan kegiatan perdagangan pada investasi bersyarat

   Vietnam menegaskan bahwa kegiatan investasi harus memenuhi persyaratan khusus guna menjaga pertahanan dan keamanan negara, memelihara ketertiban serta keselamatan masyarakat, mendukung nilai-nilai etika sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat 227 sektor dan perdagangan investasi

bersyarat sebagaimana terperinci dalam lampiran 4 LOI 2020 dan dipublikasikan di Portal Registrasi Bisnis Nasional. LOI 2020 menekankan pentingnya transparansi dan pengungkapan syarat-syarat investasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

c. Menetapkan akses pasar bagi investor asing

Pemerintah Vietnam memberlakukan pembatasan akses pasar bagi investor asing. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat persentase kepemilikan investor asing, bentuk investasi, lingkup investasi, kapasitas investor, serta situasi lainnya. Hal ini menegaskan upaya Pemerintah Vietnam untuk melindungi industri lokal; mengelola risiko ekonomi; serta mengatur dan mengelola arus investasi asing sesuai dengan kebijakan serta kepentingan ekonomi, politik, dan sosial.

d. Jaminan Investasi

Pemerintah Vietnam menjaminan investasi guna melindungi hak dan kepentingan investor; menjamin penyelesaian yang adil dalam kasus perselisihan; dan perlindungan terhadap ekspropriasi yakni aset investor asing tidak dapat disita oleh pemerintah tanpa kompensasi yang adil dan memadai. Jaminan-jaminan investasi tersebut yaitu jaminan kepemilikan harta; jaminan kegiatan penanaman modal usaha; jaminan pengalihan harta kekayaan penanam modal asing ke luar negeri; jaminan penanaman modal usaha apabila terjadi perubahan undang-undang; dan penyelesaian perselisihan penanaman modal. Namun yang berbeda pada LOI 2020 dibanding LOI 2014 adalah penghapusan jaminan pemerintah terhadap beberapa proyek penting. Dengan menghapus jaminan tersebut, pemerintah Vietnam mempertimbangkan

faktor prioritas dan resiko keuangan yang dihadapi demi menjaga stabilitas moneter.

e. Insentif dan dukungan Investasi

Berbagai insentif investasi yang diberikan pemerintah Vietnam antara lain insentif pajak penghasilan badan; pembebasan bea masuk; pembebasan atau pengurangan retribusi; dan penyusutan yang dipercepat. Adapun subjek yang menerima insentif tersebut adalah proyek investasi di sektor perdagangan yang memenuhi syarat; proyek investasi di wilayah geografis yang memenuhi syarat; proyek investasi berkapitalisasi VND 6 triliun atau lebih dengan omset paling sedikit VND 10 triliun/tahun setelah 3 tahun atau memiliki lebih dari 3.000 pekerja; proyek investasi perumahan sosial, pedesaan dengan mempekerjakan 500 pekerja atau mempekerjakan penyandang disabilitas; perusahaan teknologi tinggi yang melibatkan transfer teknologi; proyek investasi awal yang inovatif; dan investasi yang memiliki rantai distribusi produk usaha kecil dan menengah. Namun insentif bea masuk, pembebasan/pengurangan retribusi dan penyusutan tidak diberikan pada proyek mineral, barang/jasa yang dikenakan pajak dalam UU Cukai, dan proyek rumah komensial. LOI 2020 juga mengatur sektor dan perdagangan yang menerima insentif dan wilayah geografis yang layak menerima insentif. Bentuk dukungan pemerintah Vietnam terhadap investasi sebagai berikut pengembangan sistem infrastruktur teknis dan sosial proyek investasi; pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; kredit; relokasi tempat produksi dan usaha; transfer ilmu pengetahuan, Teknik dan teknologi; pengembangan pasar dan infromasi; dan penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Vietnam juga memberikan insentif dan dukungan investasi khusus dimana proyek penanamanan modal memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Dua kriteria proyek penerima insentif dan dukungan investasi khusus yaitu pusat inovasi baru/ penelitian dan pengembangan dengan modal sebesar VND 3 triliun atau lebih sesuai sertifikat keputusan Perdana Menteri; dan sektor atau perdagangan yang memenuhi syarat dengan kapitalisasi VND 30 triliun atau lebih sesuai kebijakan investasi.

f. Bentuk Investasi di Vietnam

Bentuk penanaman modal antara lain mendirikan organisasi ekonomi; menambah modal; proyek investasi, dalam bentuk Business Cooperation Contract (BCC); dan bentuk penanaman modal baru dan organisasi ekonomi jenis baru. LOI 2020 menerangkan perusahaan dengan kepemilikan asing sebesar 50% yang dapat menerima insentif dan dukungan investasi. Persentase tersebut mengalami penurunan dibanding LOI 2014 sebesar 51%.

g. Keputusan Kebijakan Investasi dan Seleksi Investor

LOI 2020 mengatur persetujuan kebijakan penanaman modal dalam tiga kewenangan yaitu The National Assembly; The Prime Minister’s; and Provincial-level People’s Committees. Kewenangan The National Assembly masih sama dengan LOI 2014. Sedangkan kewenangan The Prime Minister’s menambahkan prasyarat dari proyek yang telah ditentukan dan persetujuan proyek yang memerlukan persetujuan dua atau lebih and Provincial-level People’s Committees.

Perubahan kewenangan Provincial-level People’s Committees yaitu pada proyek menggunakan atau sewa tanah negara tanpa lelang; membangun perumahan dengan luas dibawah 50 hektar di perkotaan, dibawah 100 hektar di

non-perkotaan; pembangunan area golf; penanaman modal asing di daerah.

Pembagian kewenangan tersebut, memberikan manfaat yaitu pengaturan yang lebih jelas atas perlindungan lingkungan yang lebih baik, mendorong investasi asing karena memberikan kepastian hukum kepada investor, mengurangi risiko saling tindih kewenangan dalam kebijakan investasi dan pemerataan pembangunan regional karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

4.2.3 Hasil Wawancara

Penjaringan data primer berupa wawancara lebih difokuskan pada informan yang dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Pemilihan informan mengacu pada kebutuhan data primer penelitian berdasarkan pemahaman mendalam terhadap latar belakang informan dan kemampuan mereka dalam merespons setiap pertanyaan yang diajukan. Dalam konteks fenomenologi, penting bagi informan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pada pengalaman pribadi terhadap fenomena penelitian.

4.2.3.1 Teori Pertahanan

Suatu negara mengimplementasikan pertahanan guna menjaga kedaulatan dan stabilitas negara tersebut. Pertahanan tidak hanya terkait dengan militer, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial (Boulding, 2018). Pertahanan militer negara Vietnam menurut informan A1 menjelaskan

Pertahanan militer Vietnam dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2019 jelas mencermin kebijakan pertahanan Vietnam dengan prinsip "4 No" menyatakan bahwa Vietnam tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun; tidak memihak satu negara untuk

melawan negara lain; tidak mengizinkan negara asing mendirikan pangkalan militer atau menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara ketiga; serta tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Kebijakan "4 No" ini merupakan sebuah pesan perdamaian, yang secara mendalam mengungkapkan aspirasi perdamaian rakyat Vietnam kepada semua negara di dunia. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa Vietnam memang tidak membentuk aliansi dengan negara manapun, dan Vietnam juga tidak menentang Tiongkok. Kebijakan pertahanan Vietnam adalah menjaga netralitas yang hingga saat ini paling menguntungkan bagi Vietnam. Vietnam juga menerapkan kebijakan "One depend" digambarkan sebagai tergantung pada kondisi tertentu, dimana negara akan mempertimbangkan pengembangan hubungan pertahanan dan militer yang diperlukan dengan negara lain pada tingkat yang sesuai, sehingga memberikan ruang untuk manuver militer. Strategi ini menunjukkan keteguhan Vietnam dalam perlindungan teritorial, menjaga stabilitas keamanan regional dan diversifikasi kerja sama pertahanan internasional.

Informan B1 juga memberikan informasi yang **selaras** mengenai pertahanan militer Vietnam yang menyatakan

Menurut Buku Putih Pertahanan Vietnam pada tahun 2019, Vietnam menerapkan kebijakan non-blok yang dikenal sebagai empat tidak dan satu ketergantungan/ tidak ada aliansi militer, tidak memihak satu negara terhadap negara lain, tidak ada pangkalan militer asing atau tidak menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara lain, tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Pada keadaan tertentu vietnam akan

mempertimbangkan terkait pengembangan hubungan pertahanan dan militer yang di perlukan dengan negara lain pada tingkat tertentu , hal ini merupakan strategi untuk memberikan manuver militer dan keteguhan Vietnam dalam perlindungan teritorial, menjaga stabilitas keamanan regional dan internasinal.

Pertahanan nirmiliter Pemerintah Vietnam menurut informan 1 menjelaskan

Kebijakan pertahanan nirmiliter negara Republik Sosialis Vietnam di bidang ekonomi adalah dengan mengembangkan zona-zona pertahanan-ekonomi untuk mengkonsolidasikan situasi pertahanan-keamanan di daerah-daerah strategis, khususnya wilayah perbatasan, laut dan kepulauan, yang bertujuan untuk membantu membentuk benteng yang kuat untuk melindungi negara. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan No.22/2021/ND-CP tentang pembangunan zona pertahanan-ekonomi yang ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam, mengenai penataan ulang kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, laut, dan kepulauan yang berperan penting dalam pertahanan dan keamanan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk setempat.

Pembangunan zona pertahanan ekonomi akan menjadi landasan yang kokoh bagi masyarakat lokal dan kekuatan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan, laut, dan kepulauan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa infrastruktur penting harus dibangun di wilayah-wilayah tersebut untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, sekaligus menstabilkan pertahanan-keamanan negara. Keputusan tersebut menekankan bahwa pengembangan zona ekonomi-pertahanan bertujuan untuk bekerja sama dengan kekuatan lokal untuk membangun postur pertahanan seluruh rakyat

yang dikombinasikan dengan postur keamanan berbasis kerakyatan dan kebersamaan. Berikut daftar Zona Ekonomi-Pertahanan Vietnam:

Tabel 4.3 Daftar Zona Ekonomi-Pertahanan Vietnam

No	*Name*	*Location*
1	*Mau Son Economic - Defence Zone*	*Lang Son Province*
2	*Bao Lac-Bao Lam Economic - Defence Zone*	*Cao Bang Province*
3	*Muong Cha Economic - Defence Zone*	*Dien Bien Province*
4	*Vi Xuyen Economic - Defence Zone*	*Ha Giang Province*
5	*Xin Man Economic - Defence Zone*	*Ha Giang Province*
6	*Bat Sat Economic - Defence Zone*	*Lao Cai Province*
7	*Song Ma Economic - Defence Zone*	*Son La Province*
8	*Phong Tho Economic - Defence Zone*	*Lai Chau Province*
9	*Bac Hai Son Economic - Defence Zone*	*Quang Ninh Province*
10	*Binh Lieu-Quang Ha-Mong Cai Economic - Defence Zone*	*Quang Ninh Province*
11	*Khe Sanh Economic - Defence Zone*	*Quang Tri Province*
12	*Aso-Aluoi Economic - Defence Zone*	*Thua Thien-Hue Province*
13	*Ky Son Economic - Defence Zone*	*Nghe An Province*
14	*Muong Lat Economic - Defence Zone*	*Thanh Hoa Province*
15	*Cumga Economic - Defence Zone*	*Dak Lak Province*
16	*Tay Giang Economic - Defence Zone*	*Quang Nam Province*
17	*Bu Gia Phuc-Bu Gia Map Economic - Defence Zone*	*Binh Phuoc Province*
18	*Bac Lam Dong Economic - Defence Zone*	*Lam Dong Province*
19	*Tan Hong Economic - Defence Zone*	*Dong Thap Province*
20	*Quang Son Economic - Defence Zone*	*Dak Lak Province*
21	*Economic - Defence Zone of the 15th corps*	*Gia Lai, Kontum, Dak Lak (Central Highland Province)*
22	*Economic - Defence Zone of the 16th corps*	*Dak Lak, Binh Phuoc Province*

Sumber: Atase Pertahanan Kedubes Indonesia di Hanoi, Vietnam (2023)

Sedangkan pertahanan nirmiliter Pemerintah Vietnam menurut informan B1 menjelaskan

"Dalam white paper resmi berjudul 2019 Vietnam National Defence, dijelaskan tentang strategi nasional Vietnam yang disebut The Strategy to Safeguard the Homeland. Strategi tersebut terfokus pada mempertahankan lingkungan yang damai dan stabil bagi perkembangan sosio-ekonomi Vietnam; serta menggabungkan dua tugas strategis dalam pertahanan dan konstruksi nasional yang akan bermuara pada kekuatan internal sebagai faktor penentu yang kemudian akan mengutamakan pembangunan ekonomi dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional sebagai bagian tugas yang penting.

Kebijakan pertahanan nirmiliter di bidang ekonomi di Vietnam mencakup sejumlah inisiatif dan tindakan yang dirancang untuk mengamankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, seperti:

a. *Perlindungan Sumber Daya Maritim serta Perlindungan Perbatasan dan Keamanan: Vietnam memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok dan negara-negara lain. Dalam hal ini, pertahanan nirmiliter diarahkan untuk melindungi sumber daya alam di perairan tersebut. Menurut white paper Vietnam National Defence 2019, Vietnam bermaksud untuk mengatur dan mempercepat pembangunan sebuah negara makmur yang dipadukan dengan pembangunan sebuah pertahanan negara yang kuat secara sinkron dan seragam, yang dijamin oleh pedoman dan kebijakannya, ditetapkan melalui langkah-langkah khusus dari pemerintah Pusat hingga daerah. Vietnam mempunyai rencana untuk berinvestasi dalam mempertahankan dan meningkatkan otonomi dan ketahanan ekonominya serta menggabungkan pembangunan sosial-ekonomi dan budaya dengan penguatan pertahanan dan keamanan negara, penyesuaian master rencana kawasan*

strategis yang selaras dengan pertahanan negara dan keamanan, sekaligus mengembangkan ekonomi maritim dengan menjaga kedaulatan laut dan pulau.

b. *Pengembangan Infrastruktur Terkait Maritim: Vietnam menginvestasikan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas maritim untuk mendukung perdagangan dan transportasi, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Vietnam diperkirakan memerlukan biaya sekitar 80 triliun-100 triliun dong, atau senilai US$3,44 miliar-US$4,31 miliar untuk mengembangkan pelabuhannya. Untuk meminimalisir dampak merugikan dari hambatan di pelabuhan, pemerintah Vietnam perlu melakukan investasi besar-besaran untuk pengadaan gudang, pelabuhan, terminal kereta api, dan depo peti kemas darat, sebagai permulaan. Vietnam bertekad untuk mengembangkan negara yang berorientasi sosialis pada potensi ekonomi pertahanan negara dan mempercepat industrialisasi serta modernisasi negara. Vietnam juga secara aktif dan secara proaktif berintegrasi ke dalam perekonomian dunia. Ini berusaha untuk melakukan multilateralisasi dan mendiversifikasi hubungan ekonomi internasional menghindari ketergantungan pada pasar atau mitra tertentu. Vietnam mengambil inisiatif dalam persiapan untuk menangani secara efektif dampak buruk serta tekanan ekonomi eksternal.*

c. *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kebijakan nirmiliter juga melibatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi dikaitkan dengan penyediaan sosial kemajuan dan keadilan serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan dan sumber daya manusia yang dipersiapkan*

untuk mobilisasi pertahanan negara. Dengan membangun kekuatan APF (All People Forces) yang terdiri dari membangun kekuatan penuh waktu, kekuatan paruh waktu, dan kekuatan massa di semua cabang dan sektor sesuai dengan mekanisme ekonomi pasar yang berorientasi sosialis serta bentuk organisasi sosial ekonomi dan kondisi wilayah tertentu. Kegiatan pendidikan dan komunikasi yang teratur diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan misi pertahanan negara. Selain itu, VPA (Vietnam People Army) juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di hubungan dengan pertahanan nasional, dengan mempromosikan perdagangan pertahanan kerjasama dan meningkatkan investasi untuk menghasilkan sumber daya untuk membangun VPA. Ia juga melaksanakan program-program besar dan proyek, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknis. VPA mendukung penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dan penguasaan teknologi di bidang manufaktur beberapa modern senjata dan peralatan, maju ke arah perancangan dan memproduksi beberapa senjata mutakhir, platform dan peralatan".

4.2.3.2 Teori Ekonomi Internasional

Pembahasan ekonomi internasional tentunya tidak lepas dari perdagangan internasional dan ekspor impor. Perdagangan internasional antar negara di dunia akan dipengaruhi perjanjian perdagangan bebas (*freetrade agreement*). Perjanjian perdagangan bebas akan memberikan keuntungan dengan tarif preferensi yang disepakati negara yang terikat sehingga membuka peluang atas pangsa pasar yang lebih besar. Vietnam telah melakukan berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati oleh Vietnam dengan Amerika Serikat dan Cina menurut informan A1 menjelaskan "*Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat. Vietnam belum memiliki perjanjian bilateral dengan Cina. Vietnam tidak memberikan karpet merah kepada Cina".* Namun informan C1 memberikan informasi yang **berbeda** yakni "*Vietnam memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Amerika Serikat (US-Vietnam Bilateral Trade Agreement/ BTA). Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Cina".*

Perjanjian perdagangan bilateral antara Vietnam dengan Amerika Serikat dan Cina tentunya akan memberikan manfaat bagi negaranya. Perjanjian perdagangan bilateral tentunya akan memberikan dampak, informan A1 menyatakan "*kerjasama bilateral memperbesar peluang perdagangan diantara kedua negara".* Manfaat tersebut juga **selaras** dengan informan C1 yang menyatakan *"kerjasama bilateral membuat hubungan perdagangan menjadi lebih dekat dan kemudahan dalam berkompromi mengenai tarif preferensi"*.

Selain secara bilateral, Vietnam juga melakukan perjanjian perdagangan bebas secara regional dan multilateral. Informan A1 memberikan informasi bahwa *Vietnam memiliki FTA lebih strategis dibanding Indonesia sehingga membantu mempermudah ekspor ke negara-negara tersebut*. Hal tersebut **selaras** dengan informan C1 yang menyatakan *Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bebas lebih banyak daripada Indonesia*

Perjanjian perdagangan bebas secara regional dan multilateral yang dimiliki Vietnam tentunya akan memberikan manfaat dalam panggung internasional. Manfaat perjanjian tersebut menurut informan A1 menjelaskan menyatakan *negara yang memiliki lebih banyak perjanjian akan dimanfaatkan lebih baik dalam melakukan perdagangan*. Manfaat tersebut **selaras** dengan informan C1 yang menyatakan *Vietnam yang*

memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas akan membuka pasar yang lebih luas

4.2.3.3 Teori Ekonomi Pertahanan

Transaksi dalam perdagangan internasional tentunya mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang baik akan mendorong menciptakan pertahanan demi kedaulatan dan stabilitas negara. Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekonomi Vietnam menurut informan A1 menyatakan

> *"Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,46%. Setelah Perang Vietnam pada tahun 1975, AS dan Vietnam mengumumkan hubungan diplomatik normal pada tanggal 11 Juli 1995. Pada bulan Juli tahun ini, AS dan Vietnam memperingati 28 tahun hubungan diplomatik dan AS menegaskan kembali dukungannya terhadap Vietnam termasuk penyelesaian sengketa LTS secara damai, supremasi hukum, kebebasan bernavigasi, dan perdagangan tanpa hambatan. Vietnam terus berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan AS, melalui peningkatan hubungan ekonomi, dan bagaimana perusahaan-perusahaan AS dapat memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari pemindahan produksi mereka dari Tiongkok ke Vietnam. Selama dua dekade terakhir, perdagangan antara kedua negara telah berkembang pesat, dan dengan produsen dan merek dagang AS yang secara aktif mencari diversifikasi di luar Tiongkok, dimana Vietnam berada pada posisi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan perang dagang AS-Tiongkok.*
>
> *Sejak meresmikan hubungan diplomatik, AS dan Vietnam telah memperkuat hubungan mereka dengan perdagangan bilateral yang meningkat dari US$450 juta pada tahun 1994 menjadi US$77 miliar pada tahun 2019, dan Pada tahun 2022, volume perdagangan bilateral antara kedua negara ini melonjak hingga mencapai*

US$123 miliar. AS telah menjadi pasar ekspor terbesar bagi Vietnam dan Vietnam menjadi pasar ekspor AS yang tumbuh paling cepat".

Informan B1 menjelaskan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekonomi Vietnam dilihat dari perspektif ekspor, FDI dan PDB dengan penjelasan sebagai berikut:

"Ekspor Vietnam ke Amerika Serikat mencakup barang-barang konsumsi seperti pakaian, sepatu kulit, telepon, furnitur, dan makanan laut. Secara keseluruhan, ekspor Vietnam ke AS meningkat sebesar 27,3% dalam enam bulan pertama 2019, sebagai akibat dari perang dagang.

Vietnam menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) sehingga sangat memberikan banyak keuntungan dan berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi Vietnam. Dengan banyaknya investasi asing langsung, mendorong ekspor Vietnam semakin tinggi, dan pastinya membuka lapangan pekerjaan lebih banyak bagi masyarakat Vietnam.

Keuntungan yang didapat oleh Vietnam dari Perang Dagang Amerika Serikat-Cina pada bidang investasi tahun 2018, komitmen investasi asing langsung (FDI) di Vietnam mencapai US$35,46 miliar atau setara dengan 98,8% dari angka tahun 2017. Dari angka tersebut, FDI yang memperoleh lisensi baru mencapai 3,046 proyek dengan nilai US$18 miliar; penambahan modal bagi 1.056 proyek yang telah beroperasi mencapai US$7,58 miliar, dan dalam bentuk pembelian saham mencapai US$9,88 miliar. Sementara itu, realisasi investasi mencapai US$19,10 miliar yang merupakan realisasi terbesar sejak 30 tahun terakhir. Tahun 2018 terdapat 129 negara (countries and territories) yang berinvestasi di Vietnam. Negara investor terbesar adalah Jepang dengan komitmen investasi sebesar US$7,99 miliar, Korea Selatan US$6,88 miliar,

Singapura US$4,16 miliar, British Virgin Islands US$1,84 miliar, Cina US$1,81 miliar; Hongkong US$ 1,72 miliar; Taiwan US$ 1 miliar; Thailand US$739,97 juta, Australia US$596,79 juta, dan Perancis US$521,68 juta.

Selanjutnya pada tahun 2019. PDB Vietnam pada tahun 2019 tetap berada pada angka 7%, tertinggi di Asia Tenggara, dan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat melonjak tinggi 34,8% pada sembilan bulan pertama tahun 2019. Akibat dari perang dagang ini, Amerika Serikat menjadi pasar ekspor terbesar bagi Vietnam diikuti Uni Eropa, dan Cina. Menurut General Statistics Office (GSO) Vietnam, pada tahun 2019 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam mencapai 7,02%. Pada kuartal I tahun 2019 PDB Vietnam tumbuh 6,82%, kuartal II 6,73%, kuartal III 7,48%, dan kuartal IV 6,97%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 2,01% dan memberikan kontribusi sebesar 4,6% terhadap pertumbuhan PDB. Sektor industri dan konstruksi tumbuh 8,90% dan memberikan kontribusi 50,4% terhadap PDB; serta sektor jasa tumbuh 7,3% dan memberikan kontribusi 45% terhadap PDB".

Informan *C1* menjelaskan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekonomi Vietnam dari perspektif peralihan perdagangan yang menyatakan

"Negara ASEAN yang menikmati peralihan perdagangan dari AS dan Cina adalah: Vietnam (7,9% GDP), Malaysia (1,3% GDP), Singapura (0,7% GDP), Thailand (0,5% GDP), dan Filipina (0,1% GDP). Negara Asia Timur yang memiliki peluang terbesar untuk menggantikan penurunan ekspor Cina ke AS adalah Vietnam sebesar 10,9% GDP, sedangkan Indonesia hanya diperkirakan memperoleh tambahan manfaat sebesar 1,3% GDP. Salah satu alasannya karena Vietnam memiliki derajat kesamaan produk

ekspor dengan Cina yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia atas produk yang dikenakan kenaikan tarif-nya oleh AS."

Sedangkan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap pertahanan Vietnam menurut informan A1 menyatakan

"Vietnam dan Amerika Serikat telah merayakan 28 tahun hubungan diplomatik pada bulan Juli tahun ini, sebuah bukti peningkatan hubungan bilateral dan ekonomi sejak Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975. Vietnam telah muncul sebagai tujuan manufaktur alternatif yang ideal bagi bisnis AS selain Tiongkok, salah satunya karena perang dagang AS-Tiongkok dan terganggunya rantai pasokan akibat pandemi virus corona, krisis Russia-Ukraina, serta persengketaan di LTS, khususnya terkait dengan kebebasan bernavigasi di kawasan tersebut dimana Tiongkok telah menetapkan secara sepihak nine dash line.

Pada tahun 2018, USS Carl Vinson, kapal induk Angkatan Laut AS, melaksanakan kunjungan pelabuhan bersejarah di Vietnam. Pada tahun yang sama, Vietnam juga untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam Rim of the Pacific (RIMPAC), sebuah latihan militer maritim yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh AS. AS juga telah mencabut larangan penjualan senjata legal ke Vietnam pada tahun 2016; kedua negara telah menjalin hubungan militer yang lebih erat dan pertukaran militer tingkat tinggi. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2023 yang lalu, 3 kapal perang AS, yakni kapal induk USS Ronald Reagan, kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga USS Antietam (CG 54) dan USS Robert Smalls (CG 62). Bagi Vietnam, hal ini bertujuan untuk menentang sikap assertive Tiongkok di kawasan, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.

Bagi Vietnam yang memegang kunci keseimbangan kekuatan di kawasan, maka perang dagang antara AS-Tiongkok ini tentunya

juga akan sangat menguntung baik dari segi politis, pertahanan maupun ekonomi dan perdagangan. Perselisihan perdagangan antara AS dan Tiongkok berdampak besar pada Vietnam. Eksportir Vietnam mengalami peningkatan permintaan terhadap produk mereka, khususnya garmen dan tekstil. Vietnam telah muncul sebagai alternatif selain Tiongkok bagi investor yang mendapatkan manfaat dari Tiongkok ditambah satu strategi yang melibatkan perpindahan atau perluasan investor ke negara lain untuk meningkatkan akses pasar".

Informan B1 menjelaskan bahwa perang dagang AS-Cina **tidak** berpengaruh terhadap pertahanan Vietnam namun adanya peningkatan belanja militer dengan penjelasan sebagai berikut:

"Tidak ditemukan adanya data pengaruh perang dagang AS-China terhadap pertahanan militer Vietnam, namun menurut Stockholm International Peace Research Institute, Vietnam mengalami peningkatan belanja militer terbesar di Asia Tenggara antara tahun 2003 dan 2018 dimana belanja militer Vietnam meningkat hampir 700 persen, dari USD 841 juta pada tahun 2003 menjadi USD 5,5 miliar pada tahun 2018 atau 8,1% dari total belanja pemerintah dan 2,3% PDB. Selama periode 2018-2020, belanja militer Vietnam diperkirakan mengalami peningkatan tahunan rata-rata 8,78% menurut laporan yang diterbitkan oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS)".

4.2.3.4 Teori Manajemen Pertahanan

Manajemen pertahanan merupakan kebijakan suatu negara untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Manajemen pertahanan Vietnam menurut informan A1 menyatakan:

"*Doktrin dan strategi pertahanan Vietnam adalah dengan membangun kekuatan pertahanan nasionalnya berdasarkan kekuatan keseluruhan bangsa dan solidaritas massa yang besar, dengan demikian mengkonsolidasikan dan memperkuat persatuan nasional (Permesta). Kebijakan Pertahanan Nasional negara ini bersifat damai dan menekankan pembelaan diri serta kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat secara tegas, dan secara konsisten melalui cara-cara damai. Vietnam menjalin dan mengembangkan hubungan pertahanan dengan semua negara, terutama negara tetangga, mitra strategis, mitra komprehensif, membangun kepercayaan, dan menggalang dukungan serta bantuan internasional untuk mencegah dan merespons risiko perang.*

Menurut Resolusi No.129/2020/QH14 tanggal 13 November 2020, Vietnam berencana mengeluarkan dana sebesar US$6,4 miliar untuk pertahanan, atau sekitar 13,9% dari perkiraan pengeluaran negara pada tahun 2021. Laporan GlobalData pada awal tahun 2022 mengungkapkan bahwa pengeluaran militer Vietnam untuk akuisisi adalah sekitar US$1,1 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh sebesar 8,1% per tahun hingga mencapai US$1,8 miliar antara tahun 2023 – 2027. Laporan tersebut memperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat sebesar 8,5% tahun-ke-tahun, mencapai $8,5 miliar pada tahun 2027.

Vietnam memfokuskan militernya pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keamanan maritim. Upaya-upaya ini mencakup kemampuan angkatan udara, pertahanan udara, kapal permukaan, dan kapal bawah permukaan. Pemasok dan subkontraktor peralatan pertahanan diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan untuk kombatan angkatan laut, pertahanan udara, sistem intelijen, dan peralatan pengawasan dan pengintaian (ISR). Perusahaan-perusahaan industri pertahanan AS melihat adanya

potensi terhadap pasar seiring dengan membaiknya kerangka peraturan untuk mengekspor peralatan dan jasa pertahanan AS ke Vietnam, sehingga membuka peluang komersial yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan AS. Perubahan kebijakan ini dicapai pada kunjungan resmi Presiden Obama ke Vietnam pada bulan Mei 2016, diaman AS secara resmi mengumumkan pencabutan embargo senjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap negara tersebut.

Vietnam memiliki garis pantai sepanjang 2.000 mil yang menghadap ke Laut Tiongkok Selatan dan kontribusi besar sektor ekonomi kelautan terhadap GDP, pemerintah Vietnam memandang maritim sebagai target pertahanan prioritasnya dalam konteks ketegangan kedaulatan yang terus-menerus di Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2011, Vietnam mengeluarkan strategi maritim terperinci untuk tahun 2011-2020, yang menjadikan perlindungan kedaulatan maritim dan ekonomi maritim sebagai pilar utama keamanan nasional. Resolusi No.36 tahun 2018 menekankan bahwa pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang terkait dengan pertahanan nasional merupakan misi inti pembangunan ekonomi Vietnam pada tahun 2030-2045.

Setelah Kongres Nasional ke-13 pada bulan Februari 2021, Vietnam telah menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya pada tahun 2030 dengan Tentara Rakyat dan Keamanan Rakyat yang kompak dan kuat dengan prioritas diberikan kepada kekuatan berikut: Angkatan Udara, Angkatan Laut, Penjaga Pantai, Sinyal, Peperangan Elektronik, Pengintaian Teknis, Perang Dunia Maya, dan Sandi. Vietnam juga membuat amandemen Undang-Undang untuk memperluas peralatan Pasukan Keamanan Publik, yang memungkinkan mereka memperoleh pesawat terbang dan kapal selain senjata, bahan peledak, peralatan pendukung, serta kendaraan taktis.

Meskipun ada upaya investasi dalam pengembangan teknologi pertahanan, Vietnam masih harus bergantung pada mitra asing untuk peralatan dan perangkat pertahanan berteknologi tinggi karena kemampuan produsen dalam negeri yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. Vietnam secara bertahap memperluas basis industri pertahanan nasionalnya melalui kemitraan luar negeri dan transfer teknologi dengan negara-negara asing termasuk Rusia, Belarusia, Ukraina, Korut, Spanyol, Perancis, Israel, Belanda, India, Jepang dan Korea Selatan".

Manajemen pertahanan Vietnam menurut informan B1 menyatakan:

"Menurut Vietnam Defence White Paper 2019, Vietnam melakukan investasi selektif di beberapa perusahaan industri pertahanan yang maju yang bertujuan untuk membentuk kelompok atau kompleks industri pertahanan yang memiliki kendali mandiri, berteknologi tinggi, dan penggunaan ganda. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sosio-ekonomi, Vietnam menentukan anggaran pertahanan nasional untuk memenuhi tuntutan penguatan potensi pertahanan nasional untuk menjaga tanah air dan memastikan tidak jatuh ke dalam perlombaan senjata atau membuat anggaran pertahanan menjadi beban ekonomi.

Unit pertahanan ekonomi Vietnam People's Army (VPA) selalu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tetap, menyediakan pekerjaan bagi ratusan ribu orang. Selain itu, telah memenuhi kewajiban finansial untuk anggaran negara dan memproduksi produk teknologi dengan nilai ganda dan tinggi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan menyelesaikan tugas menggabungkan pembangunan sosial ekonomi dengan konsolidasi pertahanan.

Anggaran pertahanan Vietnam diproyeksikan mencapai CAGR sebesar 9,43% pada tahun 2020-2024, dan mencapai US$7,9 miliar pada tahun 2024. Pemerintah Vietnam mengalokasikan US$ 5,1 miliar untuk belanja militer pada tahun 2019, dimana 32,5% dialokasikan untuk pengadaan peralatan pertahanan. Belanja pertahanan negara ini meningkat dengan CAGR sebesar 7,34% selama tahun 2015-2019.

Upaya modernisasi militer Vietnam difokuskan untuk mencegah Tiongkok mengambil alih wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Selama periode perkiraan, Vietnam diperkirakan akan membeli pesawat tempur dan pesawat multi-peran, kendaraan lapis baja, kapal angkatan laut, kapal patroli, pesawat patroli maritim, dan peralatan pengawasan. Pengeluaran pertahanan negara ini diproyeksikan meningkat dari US$5,5 miliar pada tahun 2020 menjadi US$7,9 miliar pada tahun 2024, meningkat dengan CAGR sebesar 9,43%".

4.2.3.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara dalam konteks ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap pertumbuhan ekonomi Vietnam menurut informan A1 menyatakan

"*Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,46%. Nilai Ekspor Vietnam ke dunia sebear USD400miliar lebih besar USD100miliar dibanding ekspor Indonesia ke dunia sebesar $300miliar. GDP Vietnam sama dengan nilai ekspor Vietnam. Namun impor juga banyak karena banyak bahan baku impor. Ekspor Vietnam bersumber dari FDI. Ekspor terbesar ke dunia adalah produk industri khususnya elektronik. 20% nilai ekspor Vietnam ke Dunia dari satu perusahaan*

yaitu Samsung (Korea Selatan) dimana 50% ekspor produk samsung ke dunia berasal dari Vietnam".

Informan C1 menjelaskan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap pertumbuhan ekonomi Vietnam dilihat dari perspektif nilai GDP dan nilai GDP per Capita yakni *"GDP Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD329miliar menjadi USD428miliar pada tahun 2023. GDP per capita Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD3.415 menjadi USD4.276,-".*

4.2.3.6 Teori Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas dari satu negara ke negara lain. FDI sering menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap FDI Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Pertumbuhan FDI yang masuk ke Vietnam semakin meningkat*". Hal tersebut **selaras** dengan informan B1 yang menerangkan:

"*Keuntungan yang didapat oleh Vietnam dari Perang Dagang Amerika Serikat-Cina pada bidang investasi tahun 2018, komitmen investasi asing langsung (FDI) di Vietnam mencapai US$35,46 miliar atau setara dengan 98,8% dari angka tahun 2017. Dari angka tersebut, FDI yang memperoleh lisensi baru mencapai 3,046 proyek dengan nilai US$18 miliar; penambahan modal bagi 1.056 proyek yang telah beroperasi mencapai US$7,58 miliar, dan dalam bentuk pembelian saham mencapai US$9,88 miliar. Sementara itu, realisasi investasi mencapai US$19,10 miliar yang merupakan realisasi terbesar sejak 30 tahun terakhir. Tahun 2018 terdapat 129 negara (countries and territories) yang berinvestasi di Vietnam. Negara investor terbesar adalah Jepang dengan komitmen investasi sebesar US$7,99 miliar, Korea Selatan US$6,88 miliar, Singapura US$4,16 miliar, British Virgin Islands US$1,84 miliar,*

Cina US$1,81 miliar; Hongkong US$ 1,72 miliar; Taiwan US$ 1 miliar; Thailand US$739,97 juta, Australia US$596,79 juta, dan Perancis US$521,68 juta".

Sektor yang menerima FDI terbesar menurut informan A1 adalah "*sektor manufaktur dengan posisi saat itu sumber negara FDI terbesar adalah Korea Selatan*".

Mata uang negara Vietnam adalah Dong. Kekuatan nilai mata uang Dong terhadap USD menurut informan A1 menyatakan "*Dong merupakan mata uang terlemah di ASEAN. Meski begitu, dalam 8 tahun nilai Dong hanya melemah sebesar 15% terhadap USD dikarenakan kebijakan moneter di Vietnam sangat ketat sehingga lebih terjaga"*. Hal serupa juga **selaras** dengan informan B1 yang mengungkapkan "*Mata uang dong adalah mata uang terlemah di ASEAN*" dan informan C1 "*Mata uang Vietnam yaitu Dong adalah mata uang dengan nilai tukar terlemah di ASEAN".*

Vietnam menjaga mempertahankan stabilitas politik yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi. Informan A1, B1, dan C1 menyatakan bahwa "*pemerintah Vietnam menganut Republik Komunis*". Kondisi politik di Vietnam menurut informan 1 menyatakan "*Meskipun komunis, Vietnam mengikuti perkembangan perkonomian dunia. Pemerintahan komunis Vietnam dimana hanya memiliki satu partai yang berada pada semua lini pemerintahan dimulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Keputusan Strategis di Vietnam diputuskan oleh Polite Biro yang berisikan 18 orang yang terdiri dari akademisi, partai, pemerintah. Di Vietnam jabatan yang paling penting adalah sekjen partai. Sekjen partai yang memilih perdana menteri dan presiden. Pemilu tetap dilaksanakan di Vietnam dengan satu partai"*. Hal tersebut **selaras** dengan informan B1 yang menyatakan "*Vietnam adalah republik sosialis dengan sistem partai tunggal, diperintah oleh Partai Komunis Vietnam. Sistem politik negara ini dicirikan oleh dominasi Partai Komunis yang memegang*

peran utama dalam semua organisasi pemerintahan, politik, dan sosial. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis yang diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sekretaris Jenderal Partai Komunis adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengendalikan organisasi nasional partai dan perjanjian negara, serta mengawasi hukum. Situasi politik di Vietnam mencerminkan sistem partai tunggal dengan pengaruh kuat Partai Komunis di berbagai aspek pemerintahan dan Masyarakat". Informan C1 mengungkapkan hal yang **sama** bahwa "*Vietnam merupakan negara komunis yang hanya memiliki 1 partai"*.

Respon masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*pemerintahan komunis Vietnam berada di semua lini pemerintahan yakni kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat sehingga segala kebijakan yang telah ditetapkankan oleh Pemerintah Pusat maka penerapan dan pengawasannya sampai dengan kabupaten. Vietnam tidak ada ormas dan pungli"*. Hal **serupa** juga disampaikan B1 bahwa "*kebijakan pemerintah Vietnam dapat diimplementasikan di masyarakat*".

Perihal korupsi di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*korupsi masih ada. Gaji PNS di Vietnam masih rendah Vietnam sedang menggalakan bebas korupsi dikalangan pemerintahan*".

Kemudahan birokrasi di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah Vietnam, maka penerapan sesuai peraturan tersebut. Setiap perusahaan yang ingin berinvestasi di Vietnam, akan ditanya rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jika rencana tersebut terpenuhi maka perusahaan tersebut akan mendapatkan fasilitas yang telah ditetapkan Pemerintah Vietnam. Sebagai contoh satu perusahaan Indonesia setelah 3 tahun seharusnya tidak sewa pabrik tapi sudah membangun pabrik dikarenakan permasalahan izinnya belum keluar kemudian pabrik tersebut mau disegel*

oleh pemerintah daerah. Pemerintah-pemerintah daerah di Vietnam bersaing untuk mendapatkan investasi sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan". Hal **selaras** juga diungkapkan informan C1 yang menyatakan "*FDI yang tinggi ditunjang dari kemudahan berinvestasi yang baik"*.

Kebijakan insentif pajak *Foreign Direct Investment* di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Pemerintah Vietnam memberikan berbagai insentif investasi antara lain insentif pajak penghasilan badan; pembebasan bea masuk; pembebasan atau pengurangan retribusi; dan penyusutan yang dipercepat*". Hal **serupa** juga diungkapkan oleh informan C1 yakni "*Pemerintah Vietnam memberikan insentif investasi berupa insentif pajak penghasilan badan yakni tarif preferensial dan tax holiday; insentif di kawasan ekonomi; insentif pajak berbasis industri; insentif industri penunjang; insentif bea masuk dan sewa tanah*".

Pemerintah Vietnam juga memberikan dukungan untuk mendorong FDI sesuai informan A1 yang menyatakan "*Bentuk dukungan pemerintah Vietnam terhadap investasi sebagai berikut pengembangan sistem infrastruktur teknis dan sosial proyek investasi; pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; kredit; relokasi tempat produksi dan usaha; transfer ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi; pengembangan pasar dan infromasi; dan penelitian dan pengembangan*". Hal **serupa** juga disampaikan informan C1 yang menyatakan "*Pemerintah Vietnam memberikan berbagai dukungan untuk menarik investor melakukan investasi*".

Vietnam merupakan negara yang memiliki lokasi yang strategis sesuai dengan informan A1 yang menyatakan "*Vietnam memiliki posisi geografis yang menguntungkan bagi perdagangan global dan dekat dengan rantai pasok Asia. Selain itu Vietnam dekat dengan Cina, dimana transportasi dari sana menggunakan trucking*". Informan 2 selaras juga mengungkapkan bahwa "*Vietnam merupakan negara dengan posisi*

geografis yang menguntungkan bagi perdagangan global serta memiliki garis pantai yang panjang".

Upah tenaga kerja Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*UMR di Vietnam dibagi menjadi 4 zona. Upah lebih murah daripada di Indonesia. Zona 1 (terbaik) nominalnya sama namun berbeda mata uang nya misalnya di Jakarta UMR Rp4.000.000 disana juga 4.000.000 Dong sehingga dirupiahkan 4.000.000 Dong dikali 0,6 sebesar Rp2.400.000 Karena FDI besar dan lapangan pekerjaan banyak, turnover pekerja tinggi. Pekerja tidak melakukan protes ke perusahaan, namun jika sudah tidak sesuai, merka pindah pekerjaan karena lapangan pekerjaan banyak*". Hal tersebut juga ***selaras*** dengan yang disampaikan informan B1 "Upah pekerja di Vietnam murah" dan informan C1 "*Upah pekerja di Vietnam lebih rendah dibandingkan Indonesia*".

Jumlah penduduk dan populasi tenaga kerja di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*populasi tenaga kerja di Vietnam sebesar 50,9% dari populasi*". Informan C1 menyatakan "*Vietnam memiliki jumlah penduduk 100,10 juta jiwa (IMF)*". Produktivitas tenaga kerja di Vietnam menurut informan A1 "*produktivitas pekerja Vietnam meningkat setiap tahunnya*" sedangkan informan C1 menyatakan "*produktivitas Indonesia lebih baik daripada Vietnam*".

Kualitas pendidikan pekerja di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*tingkat literasi di Indonesia lebih bagus dari Vietnam, pekerja pada sektor pelayanan yang di kota besar beum tentu bisa bahasa inggris*" dan informan C1 menyatakan "*tingkat persentase pendaftaran ke perguruan tinggi semakin tinggi*".

Etos kerja di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "k*arakter pekerja Vietnam seperti robot sesuai SOP namun ketika ada masalah atau tidak sesuai SOP, mereka tidak mampu menyelesaikan masalah atau tragedi yang terjadi*". Hal **serupa** juga disampaikan informan C1 yang menyatakan "*tenaga kerja Vietnam bekerja sesuai arahan*".

Infrastruktur di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "'*kondisi kereta masih lambat dan kurang memadai. Cost logistik "certain" jadi bisa lebih murah, sedangkan biaya logistik di Indonesia lebih uncertain. Infrastruktur kurang terlalu bagus, tol antara utara ke selatan belum nyambung. Jalan OK, namun tidak bagus banget. Vietnam memiliki kawasan industri dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan kurang lebih sama seperti di Indonesia*". Hal **serupa** juga diungkapkan informan C1 yang menyatakan "*Vietnam memiliki kawasan industri*".

Stabilitas ekonomi di Vietnam menuurut informan A1 menyatakan "*Pertumbuhan GDP Vietnam tahun 2017 sebesar 6,94% naik pada tahun 2018 sebesar 7,46% dan 7,36 pada tahun 2019*". Informan C1 melihat stabilitas ekonomi dari perspektif GDP dan GDP per capita "*GDP Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD329miliar menjadi USD428miliar pada tahun 2023. GDP per capita Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD3.415 menjadi USD4.276,-*".

4.2.3.7 Teori Ekspor-Impor

Ekspor dan impor merupakan dua elemen utama dalam perdagangan internasional yang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Ekspor impor mencerminkan aktivitas perdagangan barang dan jasa antar negara di seluruh dunia sehingga mendukung kekuatan ekonomi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan sektor industri.

Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekspor Vietnam ke AS dan Cina menurut informan A1 yang menyatakan "*nilai eskpor Vietnam ke Amerika Serikat mengalami kenaikan yang signifikan pada saat perang dagang. Nilai eskpor Vietnam ke Cina mengalami kenaikan pada saat perang dagang meskipun tidak sebesar ke AS"*. Informan C1 juga menyampaikan hal yang **serupa** "*Nilai ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat sangat signifikan dimana tahun 2013 hanya sebesar USD 25.904.256.000 menjadi USD135.876.564.000 pada tahun 2022. Nilai*

ekspor Vietnam ke Cinat meningkat s dimana tahun 2013 sebesar USD16.891.893.000 menjadi USD87.960.626.000 pada tahun 2022". Produk ekspor yang mengalami peningkatan menurut informan A1 dan C1 "*HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya); HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya); dan HS Code 64 (alas kaki; pelindung kaki dan sejenisnya)*".

Sedangkan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap impor Vietnam ke AS dan Cina menurut informan A1 dan C1 yang menyatakan "*nilai impor Vietnam dari Amerika Serikat dan Cina mengalami kenaikan pada saat perang dagang*". Produk impor yang mengalami peningkatan menurut informan A1 dan C1 "*HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya), HS Code 27 (Bahan bakar mineral, minyak mineral dan hasil penyulingannya) dan HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya)*".

Kebijakan dan perjanjian perdagangan Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Vietnam tidak memberikan karpet merah kepada Cina. Semenjak perang dagang AS-Cina, banyak perusahaan Cina pindah lokasi, salah satu negara tujuan adalah Vietnam. Vietnam telah menandatangani berbagai kerjasama perjanjian perdagangan bebas baik secara bilateral, regional maupun multilateral demi meningkatkan potensi pasar*". Hal **selaras** juga diungkapkan informan C1 yang menyatakan "*FDI, ekspor dan perjanjian perdagangan Vietnam memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Vietnam memiliki banyak perjanjian perdagangan yang membuka pasar secara lebih luas untuk menjual produk yang dihasilkan*".

4.2.3.8 Teori Strategi

Negara tentu akan merancang strategi diperlukan untuk meningkatkan *foreign direct investment* dan surplus exim. Strategi suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal baik berupa dinamika politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi strategi tentu membutuhkan kerjasama lintas sektor, perencanaan yang matang,

alokasi sumber daya yang tepat, dan evaluasi berkala terhadap kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi Vietnam dalam meningkatkan *foreign direct investment* menurut informan A1 menyatakan "*pemerintah Vietnam menetapkan kebijakan investasi yang beradaptasi dan mempersiapkan dengan perubahan jaman*". Informan C1 mengemukakan strategi dari perspektif perjanjian perdagangan "*ikut serta dalam perjanjian perdagangan yang strategis dan mempengaruhi perluasan ekspor produk Vietnam. Melakukan mengevaluasi kemudahan berbisnis di Vietnam secara periodik untuk memperbaiki segala hambatan dan kekurangan".* Sedangkan informan D1 mengemukakan strategi dari perspektif insentif pajak dan diversifikasi sumber FDI "*memberikan insentif fiskal dan pajak kepada perusahaan asing yang berinvestasi dalam sektor-sektor strategis dapat memotivasi FDI berupa pembebasan pajak atau pemotongan tarif pajak untuk periode tertentu. Vietnam sebaiknya mencari diversifikasi sumber FDI dengan menarik investasi dari berbagai negara dan sektor industri sehingga membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada investasi dari satu atau beberapa negara tertentu*".

Strategi Vietnam dalam meningkatkan surplus ekspor-Impor menurut informan A1 menyatakan "*Vietnam menghasilkan produk sesuai perubahan jaman berupa barang produksi yang ramah lingkungan. Misalnya ketika investor Eropa sedang mempertimbangkan akan berinvestasi di suatu negara dengan pertimbangan sumber energinya menggunakan energi terbarukan atau energi fossil sehingga Vietnam lebih kompetitif dan memiliki daya saing yang lebih tinggi*".

Strategi Vietnam dalam meningkatkan surplus ekspor-Impor menurut informan B1 menyatakan "*memposisikan Vietnam sebagai pemain penting dalam industri manufaktur global, menarik perusahaan-perusahaan untuk berproduksi di Vietnam dan mengekspor ke mitra dagangnya. Berpartisipasi aktif dalam kerangka kerja sama ekonomi dan terus mengeluarkan peraturan untuk menginternalisasikan komitmen*

internasionalnya. Vietnam memiliki lebih dari 90 perjanjian perdagangan bilateral dan hampir 60 perjanjian promosi dan perlindungan investasi bilateral, yang berkontribusi terhadap daya tariknya sebagai perekonomian ekspor. sehingga secara keseluruhan, strategi masa depan vietnam dalam menghadapi perang perdagangan AS-Tiongkok adalah dengan memanfaatkan kebijakan perdagangan internasional yang ada, menarik penanaman modal asing, dan secara aktif berpartisipasi dalam kerangka kerja sama ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing ekonomi".

Strategi Vietnam dalam meningkatkan surplus ekspor-Impor menurut informan C1 menyatakan *"menetapkan standar barang produksi Vietnam yang tinggi; meningkatkan perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan tetap berusaha menjadi negara yang menarik bagi investor demi meningkatkan nilai ekspor".*

Strategi Vietnam dalam meningkatkan infrastruktur menurut informan A1 menyatakan "*melakukan investasi skala besar untuk membangun infrastruktur berupa pengembangan tol dari utara ke selatan dan modernisasi kereta api. Vietnam memperkuat hubungan maritimnya dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks Jalur Sutra Maritim (MSR) dan inisiatif Belt and Road (BRI) yang diusulkan oleh China*". Informan D4 mengungkapkan strategi yang **serupa** "*investasi dalam infrastruktur berupa pelabuhan, jalan raya, dan sistem transportasi sehingga akan meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang guna menarik FDI dan meningkatkan efisiensi produksi*".

Strategi memenuhi bahan baku bagi industri di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*pemerintah Vietnam mendorong perusahaan menggandeng UMKM untuk supply sparepart*". Hal **serupa** juga disampaikan informan D1 yang menyatakan "*mendorong pengembangan industri bahan baku di dalam negeri dibutuhkan oleh industri manufaktur sehingga mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan ekonomi*".

Strategi Vietnam meningkatkan kualitas SDM menurut informan A1 menyatakan "*melakukan reformasi pendidikan kejuruan untuk memastikan bahwa kurikulumnya relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan dan bisnis untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja*". Informan D1 juga menyampaikan strategi yang serupa "*menciptakan pendidikan yang berkualitas dan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Melakukan kolaborasi dengan investor dalam program-program pelatihan*".

Strategi Vietnam dalam menjaga integritas menurut informan A1 menyatakan "*melakukan reformasi gaji untuk memastikan pejabat publik bertindak sesuai ketentuan*" selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah*". Strategi Vietnam dalam memberantas korupsi menurut informan A1 menyatakan "*penerapan hukum yang ketat serta memberikan hukuman sesuai dengan tindak kejahatannya"* selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*melakukan penyitaan dan pengembalian harta yang diperoleh dari kejahatan korupsi sehingga memberikan efek jera kepada pelaku*".

Strategi Vietnam dalam mempermudah birokrasi menurut informan A1 menyatakan "*mengoptimalkan digitalisasi segala prosedur secara online*" selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*proses perizinan dan administratif yang efektif dan efisien untuk mengurangi biaya waktu dan tenaga, dan meningkatkan kepercayaan investor*".

Strategi Vietnam untuk memperkuat sektor keuangan menurut informan A1 menyatakan "*Vietnam memiliki berbagai jenis bank yaitu bank militer, bank pertanian dll. Memperkuat tata kelola perbankan dan memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa bank-bank mengikuti standar uang ditetapkan. Potensi merger dan akuisisi di sektor perbankan Vietnam semakin meningkat karena bank-bank domestik mencari modal asing untuk mengatasi tantangan berupa meningkatnya kredit bermasalah;*

batas pertumbuhan kredit; memitigasi paparan sektor perbankan terhadap obligasi real estat di pasar obligasi Vietnam yang masih baru".

Strategi Vietnam untuk memperkuat sektor ekspedisi menurut informan A1 menyatakan "*meningkatkan investasi dalam dalam infrastruktur maritim berupa perluasan pelabuhan; peningkatan kapasitas; dan sistem informasi yang canggih. Vietnam memperkuat hubungan maritimnya dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks Jalur Sutra Maritim (MSR) dan inisiatif Belt and Road (BRI) yang diusulkan oleh China*". Hal tersebut selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan memperkuat konektivitas dengan pelabuhan negara lainnya*".

4.3 Hasil Pengolahan Data

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti, tahap pengumpulan data primer telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai narasumber yang memiliki perspektif dan informasi yang beragam. Namun demikian, data yang berhasil terhimpun pada tahap awal ini masih berupa bahan mentah yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan dapat dipahami dengan baik, data dari berbagai sumber akan disatukan dan diproses melalui tahap kategorisasi yang sistematis.

4.3.1 Pertahanan Negara

Suatu negara mengimplementasikan pertahanan guna menjaga kedaulatan dan stabilitas negara tersebut. Pertahanan tidak hanya terkait dengan militer, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial (Boulding, 2018).

4.3.1.1 Pertahanan Militer

Pertahanan militer suatu negara yang bertanggung jawab untuk melindungi wilayah, kepentingan nasional, serta kedaulatan dari ancaman internal maupun eksternal. Pertahanan militer negara Vietnam menurut informan A1 menjelaskan *pertahanan militer Vietnam dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2019 jelas mencermin kebijakan pertahanan Vietnam dengan prinsip "4 No" menyatakan bahwa Vietnam tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun; tidak memihak satu negara untuk melawan negara lain; tidak mengizinkan negara asing mendirikan pangkalan militer atau menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara ketiga; serta tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Kebijakan "4 No" ini merupakan sebuah pesan perdamaian, yang secara mendalam mengungkapkan aspirasi perdamaian rakyat Vietnam kepada semua negara di dunia. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa Vietnam memang tidak membentuk aliansi dengan negara manapun, dan Vietnam juga tidak menentang Tiongkok. Kebijakan pertahanan Vietnam adalah menjaga netralitas yang hingga saat ini paling menguntungkan bagi Vietnam. Vietnam juga menerapkan kebijakan "One depend" digambarkan sebagai tergantung pada kondisi tertentu, dimana negara akan mempertimbangkan pengembangan hubungan pertahanan dan militer yang diperlukan dengan negara lain pada tingkat yang sesuai, sehingga memberikan ruang untuk manuver militer. Strategi ini menunjukkan keteguhan Vietnam dalam perlindungan teritorial, menjaga stabilitas keamanan regional dan diversifikasi kerja sama pertahanan internasional.*

Informan B1 juga memberikan informasi yang selaras mengenai pertahanan militer Vietnam yang menyatakan

> *Menurut Buku Putih Pertahanan Vietnam pada tahun 2019, Vietnam menerapkan kebijakan non-blok yang dikenal sebagai empat tidak dan satu ketergantungan/ tidak ada aliansi militer, tidak memihak satu negara terhadap negara lain, tidak ada pangkalan*

militer asing atau tidak menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara lain, tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Pada keadaan tertentu vietnam akan mempertimbangkan terkait pengembangan hubungan pertahanan dan militer yang di perlukan dengan negara lain pada tingkat tertentu, hal ini merupakan strategi untuk memberikan manuver militer dan keteguhan Vietnam dalam perlindungan teritorial, menjaga stabilitas keamanan regional dan internasinal.

Informasi mengenai pertahanan militer Vietnam selaras dengan Buku Putih Pertahanan Vietnam tahun 2019 yang menyatakan Vietnam menerapkan kebijakan non-blok yang dikenal sebagai empat tidak yaitu tidak ada aliansi militer; tidak memihak satu negara terhadap negara lain; tidak ada pangkalan militer asing atau tidak menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara lain; dan tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Kebijakan ini menyampaikan pesan perdamaian yang mendalam Vietnam kepada seluruh dunia. Vietnam berkomitmen pada netralitas yang menguntungkan dan tidak menentang negara manapun, termasuk Tiongkok. Strategi pertahanan ini memungkinkan Vietnam mempertimbangkan hubungan pertahanan dengan negara lain sesuai kebutuhan, menunjukkan ketegasan dalam menjaga wilayahnya, menjaga stabilitas regional, dan memperluas kerja sama pertahanan internasional.

4.3.1.2 Pertahanan Nirmiliter

Selain pertahanan militer yang melibatkan kekuatan bersenjata, suatu negara juga memiliki pertahanan nirmiliter yang merupakan bagian integral dari strategi keamanannya. Pertahanan nirmiliter bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman non-militer seperti ancaman ekonomi, keamanan siber, kesehatan, lingkungan, dan kestabilan sosial. Pertahanan

nirmiliter ini memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kestabilan suatu negara. Dalam era kompleksitas ancaman yang terus berkembang, keseimbangan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sangat penting untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan suatu negara.

Pertahanan nirmiliter Pemerintah Vietnam menurut informan A1 menjelaskan *Kebijakan pertahanan nirmiliter negara Republik Sosialis Vietnam di bidang ekonomi adalah dengan mengembangkan zona-zona pertahanan-ekonomi untuk mengkonsolidasikan situasi pertahanan-keamanan di daerah-daerah strategis, khususnya wilayah perbatasan, laut dan kepulauan, yang bertujuan untuk membantu membentuk benteng yang kuat untuk melindungi negara. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan No.22/2021/ND-CP tentang pembangunan zona pertahanan-ekonomi yang ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam, mengenai penataan ulang kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, laut, dan kepulauan yang berperan penting dalam pertahanan dan keamanan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk setempat. Pembangunan zona pertahanan ekonomi akan menjadi landasan yang kokoh bagi masyarakat lokal dan kekuatan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan, laut, dan kepulauan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa infrastruktur penting harus dibangun di wilayah-wilayah tersebut untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, sekaligus menstabilkan pertahanan-keamanan negara. Keputusan tersebut menekankan bahwa pengembangan zona ekonomi-pertahanan bertujuan untuk bekerja sama dengan kekuatan lokal untuk membangun postur pertahanan seluruh rakyat yang dikombinasikan dengan postur keamanan berbasis kerakyatan dan kebersamaan. Berikut daftar Zona Ekonomi-Pertahanan Vietnam:*

Tabel 4.4 Daftar Zona Ekonomi-Pertahanan Vietnam

No	*Name*	*Location*
1	*Mau Son Economic - Defence Zone*	*Lang Son Province*
2	*Bao Lac-Bao Lam Economic - Defence Zone*	*Cao Bang Province*
3	*Muong Cha Economic - Defence Zone*	*Dien Bien Province*
4	*Vi Xuyen Economic - Defence Zone*	*Ha Giang Province*
5	*Xin Man Economic - Defence Zone*	*Ha Giang Province*
6	*Bat Sat Economic - Defence Zone*	*Lao Cai Province*
7	*Song Ma Economic - Defence Zone*	*Son La Province*
8	*Phong Tho Economic - Defence Zone*	*Lai Chau Province*
9	*Bac Hai Son Economic - Defence Zone*	*Quang Ninh Province*
10	*Binh Lieu-Quang Ha-Mong Cai Economic - Defence Zone*	*Quang Ninh Province*
11	*Khe Sanh Economic - Defence Zone*	*Quang Tri Province*
12	*Aso-Aluoi Economic - Defence Zone*	*Thua Thien-Hue Province*
13	*Ky Son Economic - Defence Zone*	*Nghe An Province*
14	*Muong Lat Economic - Defence Zone*	*Thanh Hoa Province*
15	*Cumga Economic - Defence Zone*	*Dak Lak Province*
16	*Tay Giang Economic - Defence Zone*	*Quang Nam Province*
17	*Bu Gia Phuc-Bu Gia Map Economic - Defence Zone*	*Binh Phuoc Province*
18	*Bac Lam Dong Economic - Defence Zone*	*Lam Dong Province*
19	*Tan Hong Economic - Defence Zone*	*Dong Thap Province*
20	*Quang Son Economic - Defence Zone*	*Dak Lak Province*
21	*Economic - Defence Zone of the 15th corps*	*Gia Lai, Kontum, Dak Lak (Central Highland Province)*
22	*Economic - Defence Zone of the 16th corps*	*Dak Lak, Binh Phuoc Province*

Sumber: Atase Pertahanan Kedubes Indonesiadi Hanoi, Vietnam (2023)

Sedangkan pertahanan nirmiliter Pemerintah Vietnam menurut informan B1 menjelaskan

> *"Dalam white paper resmi berjudul 2019 Vietnam National Defence, dijelaskan tentang strategi nasional Vietnam yang disebut The Strategy to Safeguard the Homeland. Strategi tersebut terfokus*

pada mempertahankan lingkungan yang damai dan stabil bagi perkembangan sosio-ekonomi Vietnam; serta menggabungkan dua tugas strategis dalam pertahanan dan konstruksi nasional yang akan bermuara pada kekuatan internal sebagai faktor penentu yang kemudian akan mengutamakan pembangunan ekonomi dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional sebagai bagian tugas yang penting.

Kebijakan pertahanan nirmiliter di bidang ekonomi di Vietnam mencakup sejumlah inisiatif dan tindakan yang dirancang untuk mengamankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, seperti:

a. *Perlindungan Sumber Daya Maritim serta Perlindungan Perbatasan dan Keamanan*

   Vietnam memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok dan negara-negara lain. Dalam hal ini, pertahanan nirmiliter diarahkan untuk melindungi sumber daya alam di perairan tersebut. Menurut white paper Vietnam National Defence 2019, Vietnam bermaksud untuk mengatur dan mempercepat pembangunan sebuah negara makmur yang dipadukan dengan pembangunan sebuah pertahanan negara yang kuat secara sinkron dan seragam, yang dijamin oleh pedoman dan kebijakannya, ditetapkan melalui langkah-langkah khusus dari pemerintah Pusat hingga daerah. Vietnam mempunyai rencana untuk berinvestasi dalam mempertahankan dan meningkatkan otonomi dan ketahanan ekonominya serta menggabungkan pembangunan sosial-ekonomi dan budaya dengan penguatan pertahanan dan keamanan negara, penyesuaian master rencana kawasan strategis yang selaras dengan pertahanan negara dan keamanan, sekaligus

mengembangkan ekonomi maritim dengan menjaga kedaulatan laut dan pulau.

b. *Pengembangan Infrastruktur Terkait Maritim*

Vietnam menginvestasikan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas maritim untuk mendukung perdagangan dan transportasi, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Vietnam diperkirakan memerlukan biaya sekitar 80 triliun-100 triliun dong, atau senilai US$3,44 miliar-US$4,31 miliar untuk mengembangkan pelabuhannya. Untuk meminimalisir dampak merugikan dari hambatan di pelabuhan, pemerintah Vietnam perlu melakukan investasi besar-besaran untuk pengadaan gudang, pelabuhan, terminal kereta api, dan depo peti kemas darat, sebagai permulaan. Vietnam bertekad untuk mengembangkan negara yang berorientasi sosialis pada potensi ekonomi pertahanan negara dan mempercepat industrialisasi serta modernisasi negara. Vietnam juga secara aktif dan secara proaktif berintegrasi ke dalam perekonomian dunia. Ini berusaha untuk melakukan multilateralisasi dan mendiversifikasi hubungan ekonomi internasional menghindari ketergantungan pada pasar atau mitra tertentu. Vietnam mengambil inisiatif dalam persiapan untuk menangani secara efektif dampak buruk serta tekanan ekonomi eksternal.

c. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Kebijakan nirmiliter juga melibatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi dikaitkan dengan penyediaan sosial kemajuan dan keadilan serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan dan sumber daya

manusia yang dipersiapkan untuk mobilisasi pertahanan negara. Dengan membangun kekuatan APF (All People Forces) yang terdiri dari membangun kekuatan penuh waktu, kekuatan paruh waktu, dan kekuatan massa di semua cabang dan sektor sesuai dengan mekanisme ekonomi pasar yang berorientasi sosialis serta bentuk organisasi sosial ekonomi dan kondisi wilayah tertentu. Kegiatan pendidikan dan komunikasi yang teratur diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan misi pertahanan negara. Selain itu, VPA (Vietnam People Army) juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di hubungan dengan pertahanan nasional, dengan mempromosikan perdagangan pertahanan kerjasama dan meningkatkan investasi untuk menghasilkan sumber daya untuk membangun VPA. Ia juga melaksanakan program-program besar dan proyek, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknis. VPA mendukung penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dan penguasaan teknologi di bidang manufaktur beberapa modern senjata dan peralatan, maju ke arah perancangan dan memproduksi beberapa senjata mutakhir, platform dan peralatan".

Pemerintah Vietnam menunjukkan komitmen sumber daya keuangan dalam mendukung keamanan dan pertahanan nasioal sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan negara Vietnam No. 22/2018/QH14 pasal 30 ayat 1 menyatakan "*Negara menjamin anggaran pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN; memprioritaskan investasi di kawasan perbatasan, pulau-pulau, kawasan strategis, kawasan utama, kawasan kunci untuk pertahanan*

negara dan sebagian kekuatan Tentara Rakyat menuju modernitas" dan pasal 33 yang menyatakan "*Negara menjamin kebutuhan keuangan aset yang digunakan untuk pertahanan nasional, keamanan dan rezim serta tujuan lainnya*".

Vietnam mengeluarkan Kebijakan Maritim pada tahun 2011 yang menerangkan strategi maritim terperinci untuk tahun 2011-2020. Kebijakan tersebut menjadikan perlindungan kedaulatan maritim dan ekonomi maritim sebagai pilar utama keamanan nasional. Kemudian Resolusi 36 tahun 2018 kembali menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan ekonomi kelautan yang terkait dengan pertahanan nasional merupakan misi inti pembangunan ekonomi Vietnam pada tahun 2030-2045.

Dengan demikian, pertahanan nirmiliter Vietnam tidak hanya berfokus pada aspek keamanan konvensional, tetapi juga terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggabungkan strategi pertahanan dengan pembangunan sosial-ekonomi, Vietnam bertujuan untuk mencapai stabilitas, pertumbuhan, dan keamanan yang berkelanjutan.

4.3.2 Ekonomi Internasional

Perdagangan internasional antar negara di dunia akan dipengaruhi perjanjian perdagangan bebas (*freetrade agreement*). Perjanjian perdagangan bebas akan memberikan keuntungan dengan tarif preferensi yang disepakati negara yang terikat sehingga membuka peluang atas pangsa pasar yang lebih besar. Informan A1 menjelaskan *Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat. Vietnam belum memiliki perjanjian bilateral dengan Cina.* Hal tersebut berbeda dengan informan C1 yang menyatakan *Vietnam memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Amerika Serikat dan Cina.*

AS dan Vietnam memiliki perjanjian perdagangan yang disebut dengan Perjanjian Perdagangan Bilateral Vietnam - Amerika Serikat (US-

Vietnam Bilateral Trade Agreement/ BTA) yang berlaku pada tanggal 10 Desember 2001. BTA mencakup ketentuan mengenai perdagangan barang, perlindungan hak kekayaan intelektual, perdagangan jasa, perlindungan investasi, fasilitasi usaha, dan transparansi. Sedangkan dengan Cina, Vietnam dan Cina tergabung dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang dimulai pada tahun 2010. ACFTA bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya antara anggota-anggotanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan tersebut (Dinh, L. T., 2017).

Manfaat perjanjian perdagangan bilateral menurut informan A1 menyatakan "*kerjasama bilateral memperbesar peluang perdagangan diantara kedua negara".* Manfaat tersebut juga **selaras** dengan informan C1 yang menyatakan *"kerjasama bilateral membuat hubungan perdagangan menjadi lebih dekat dan kemudahan dalam berkompromi mengenai tarif preferensi"*.

Perjanjian perdagangan bilateral (Bilateral Trade Agreement/ BTA) memiliki manfaat peningkatan *trade interconnectedness* (TI) antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian dan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota sehingga membuka peluang pasar baru dan dapat menghasilkan peningkatan perdagangan yang lebih tinggi dari rata-rata antara negara-negara mitra (Maluck, J., Glanemann, N., & Donner, R. V., 2018).

Selain perjanjian perdagangan bilateral, Vietnam juga melakukan perjanjian perdagangan bebas secara regional dan multilateral. Informan A1 memberikan informasi bahwa *Vietnam memiliki FTA lebih strategis dibanding Indonesia sehingga membantu mempermudah ekspor ke negara-negara tersebut*. Hal tersebut **selaras** dengan informan C1 yang menyatakan *Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bebas lebih banyak daripada Indonesia.*

Vietnam telah berpartisipasi dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas regional dan multilateral untuk memperluas jaringan

perdagangan internasionalnya. Perjanjian ini memberikan akses yang lebih luas ke pasar internasional bagi produk-produk Vietnam dengan mengurangi atau menghapuskan tarif perdagangan antara negara-negara yang terlibat. Lebih dari sekadar pengurangan tarif, perjanjian-perjanjian ini juga mencakup regulasi yang berkaitan dengan investasi, hak kekayaan intelektual, standar tenaga kerja, dan aspek-aspek perdagangan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Partisipasi Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan bebas akan memberikan manfaat yaitu meningkatkan daya saing produk-produknya di pasar global; menarik investasi asing; meningkatkan ekspor; memperluas peluang akses pasar bagi produk-produknya; kesempatan untuk menggali potensi ekonomi yang lebih besar; memperkokoh posisi Vietnam dalam jejaring perdagangan internasional dan akhirnya menjadi landasan kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Vietnam National Trade Repository menampilkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani Pemerintah Vietnam dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Daftar Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam

Free Trade Agreement		Tanggal Efektif	Negara yang Berpartisipasi	Keterangan
ACFTA	Asean - Cina Free Trade Area	1 Januari 2005	Asean - Cina	
BTA	Bilateral Agreement US – Vietnam	10 Desember 2001	Amerika Serikat - Vietnam	
ACFTA	ASEAN – Cina Free Trade Area	Juli 2005	ASEAN - Cina	
AKFTA	Asean – South Korea Free Trade Area	1 Juni 2007	Asean – Korea Selatan	
AJCEP	Asean - Jepang Comprehensive Economic Partnership	1 Januari 2008	Asean - Jepang	

Free Trade Agreement		Tanggal Efektif	Negara yang Berpartisipasi	Keterangan
VJEPA	Vietnam – Japan Economic Partneship Agreement	1 Oktober 2009	Vietnam - Jepang	
AANZFTA	Asean - Australia - New Zealand Free Trade Area	1 Januari 2010	Asean - Australia - New Zealand	
AIFTA	Asean - India Free Trade Area	1 Januari 2010	Asean - India	
ATIGA	Asean Trade in Goods Agreement	5 Mei 2010	Negara-negara ASEAN	Sebelumnya AFTA
VCFTA	Cili - Vietnam Free Trade Area	1 Januari 2014	Cili - Vietnam	
VKFTA	Vietnam – Korea Free Trade Agreement	20 Desember 2015	Vietnam - Korea Selatan	
VN-EAEU FTA	Vietnam – Eurasian Economic Union Freaa Trade Agreement	5 Oktober 2015	Vietnam – Belarusia – Kazakstan – Rusia – Armenia - Kyrgyzstan	
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership	14 Januari 2019	Australia - Kanada - Jepang - Meksiko - Selandia Baru - Singapura - Brunei Darussalam - Cili - Malaysia - Vietnam - Peru	Perjanjian ini pengganti TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) yang dibatalkan AS tahun 2017 16/9 2021 Cina mengajukan proposal untuk bergabung dengan CPTPP
AHKFTA	Asean - Hongkong Cina Free Trade Area	11 Juni 2019	Asean - Hongkong Cina	Seiring dengan AHKIA (perjanjian investasi)

Free Trade Agreement		Tanggal Efektif	Negara yang Berpartisipasi	Keterangan
EVFTA	Unieropa - Vietnam Free Trade Area	1 Agustus 2020	Unieropa - Vietnam	
UKVFTA	United Kingdom - Vietnam Free Trade Area	1 Mei 2021	United Kingdom - Vietnam	
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Januari 2022	Asean - Cina - Korea - Jepang - India - Australia - Selandia Baru	
VIFTA	Vietnam - Israel Free Trade Agreement	Dittd tgl 25 Juli 2023	Vietnam - Israel	

Sumber: Vietnam National Trade Repository (2023)

Keberhasilan Unieropa - Vietnam Free Trade Area (EVFTA) United Kingdom - Vietnam Free Trade Area (UKVFTA) dibanding negara ASEAN lainnya berimplikasi peningkatan standar Vietnam karena harus memenuhi standar Uni Eropa dimana barang-barang yang masuk ke UE dibawah pengawasan dan kontrol kualitas yang ketat. Kesepakatan EVFTA (European Union-Vietnam Free Trade Agreement) adalah perjanjian perdagangan bebas yang sangat ambisius antara Uni Eropa (EU) dan Vietnam yang mulai berlaku pada Agustus 2020 dengan tujuan untuk menghapuskan 99% tarif antara kedua pihak dalam sepuluh tahun, yang diharapkan dapat membawa manfaat strategis bagi Vietnam sebagai salah satu mitra terbesar dan terpentingnya (Kam, KTM dan Anh, NTM, 2023).

Saat ini Vietnam sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, dan Swiss) dan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) bersama dengan 13 mitra lainnya di kawasan Indo-Pasifik yang mewakili sekitar 40% PDB dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa global yaitu Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan,

Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. IPEF merupakan inisiatif ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden A.S. Joe Biden pada Mei 2022. IPEF merupakan sebuah kerangka kerja ekonomi regional yang dirancang untuk mendorong kerjasama yang lebih erat di wilayah Indo-Pasifik. IPEF bertujuan untuk mendefinisikan aturan baru untuk mendorong perdagangan standar tinggi, meningkatkan ketahanan rantai pasokan, menanamkan transparansi dalam investasi, mengatur ekonomi digital, dan menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi sambil secara bersamaan menciptakan peluang untuk semua mitra terkait (Kang 2022). IPEF tidak bisa dianggap sebagai perjanjian perdagangan, namun lebih merupakan kerangka kerja sama ekonomi.

IPEF berfokus pada empat pilar utama *connected economy, resilient economy, clean economy, and fair economy* (Kang, 2022). Salah satu aspek yang menonjol dari IPEF adalah sifatnya yang fleksibel yakni mitra-mitra yang terlibat dalam IPEF tidak diwajibkan secara ketat mengikuti keempat pilar utamanya. *Connected economy* yakni memfasilitasi pertumbuhan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Indo-Pasifik. *Resilient economy* berupa meningkatkan integrasi rantai pasokan regional untuk memperkuat ketahanan ekonomi. *Clean economy* bermakna mendorong pengembangan energi bersih, mengurangi emisi karbon, dan memajukan infrastruktur yang berkelanjutan. Sedangkan *fair economy* memiliki makna memperkuat kerangka kerja pajak yang adil dan efisien serta melawan korupsi di wilayah tersebut.

Pendekatan fleksibel IPEF memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari setiap mitra dan memungkinkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan yang berbeda-beda di wilayah Indo-Pasifik. Hal ini memungkinkan negara-negara peserta untuk mengeksplorasi kerjasama lintas sektor yang lebih luas, meningkatkan integrasi ekonomi regional, dan membangun hubungan yang lebih erat di tengah perubahan dinamika global. Bagi Vietnam, IPEF memberikan peluang untuk meningkatkan prospek ekonomi dan strategisnya serta dapat memfasilitasi integrasi

ekonomi regional dan internasional sehingga bermanfaat bagi hubungan internasional dan pertumbuhan ekonomi Vietnam (Ngo T. Q., 2023).

Manfaat perjanjian perdagangan bebas secara regional dan multilateral yang dimiliki Vietnam menurut informan A1 menyatakan *negara yang memiliki lebih banyak perjanjian akan dimanfaatkan lebih baik dalam melakukan perdagangan*. Manfaat tersebut **selaras** dengan informan C1 yang menyatakan *Vietnam yang memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas akan membuka pasar yang lebih luas*. Drozdz & Miskinis (2011) perjanjian perdagangan bebas memiliki beberapa manfaat yaitu akses pasar menjadi lebih terbuka, menciptakan perdagangan yang sebelumnya tidak ada, peningkatan variasi produk, dan harga produk menjadi lebih rendah.

4.3.3 Ekonomi Pertahanan

Transaksi perdagangan internasional tentunya mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang baik akan mendorong menciptakan pertahanan demi kedaulatan dan stabilitas negara. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah memberikan dampak terhadap perekonomian Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekonomi Vietnam menurut informan A1 menyatakan

> *Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,46%. Setelah Perang Vietnam pada tahun 1975, AS dan Vietnam mengumumkan hubungan diplomatik normal pada tanggal 11 Juli 1995. Pada bulan Juli tahun ini, AS dan Vietnam memperingati 28 tahun hubungan diplomatik dan AS menegaskan kembali dukungannya terhadap Vietnam termasuk penyelesaian sengketa LTS secara damai, supremasi hukum, kebebasan bernavigasi, dan perdagangan tanpa hambatan. Vietnam terus berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan AS, melalui peningkatan hubungan ekonomi, dan bagaimana perusahaan-*

perusahaan AS dapat memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari pemindahan produksi mereka dari Tiongkok ke Vietnam. Selama dua dekade terakhir, perdagangan antara kedua negara telah berkembang pesat, dan dengan produsen dan merek dagang AS yang secara aktif mencari diversifikasi di luar Tiongkok, dimana Vietnam berada pada posisi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan perang dagang AS-Tiongkok.

Sejak meresmikan hubungan diplomatik, AS dan Vietnam telah memperkuat hubungan mereka dengan perdagangan bilateral yang meningkat dari US$450 juta pada tahun 1994 menjadi US$77 miliar pada tahun 2019, dan Pada tahun 2022, volume perdagangan bilateral antara kedua negara ini melonjak hingga mencapai US$123 miliar. AS telah menjadi pasar ekspor terbesar bagi Vietnam dan Vietnam menjadi pasar ekspor AS yang tumbuh paling cepat".

Informan B1 menjelaskan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekonomi Vietnam dilihat dari perspektif ekspor, FDI dan PDB dengan penjelasan sebagai berikut:

Ekspor Vietnam ke Amerika Serikat mencakup barang-barang konsumsi seperti pakaian, sepatu kulit, telepon, furnitur, dan makanan laut. Secara keseluruhan, ekspor Vietnam ke AS meningkat sebesar 27,3% dalam enam bulan pertama 2019, sebagai akibat dari perang dagang.

Vietnam menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) sehingga sangat memberikan banyak keuntungan dan berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi Vietnam. Dengan banyaknya investasi asing langsung, mendorong ekspor Vietnam semakin tinggi, dan pastinya membuka lapangan pekerjaan lebih banyak bagi masyarakat Vietnam.

Keuntungan yang didapat oleh Vietnam dari Perang Dagang Amerika Serikat-Cina pada bidang investasi tahun 2018, komitmen investasi asing langsung (FDI) di Vietnam mencapai US$35,46 miliar atau setara dengan 98,8% dari angka tahun 2017. Dari angka tersebut, FDI yang memperoleh lisensi baru mencapai 3,046 proyek dengan nilai US$18 miliar; penambahan modal bagi 1.056 proyek yang telah beroperasi mencapai US$7,58 miliar, dan dalam bentuk pembelian saham mencapai US$9,88 miliar. Sementara itu, realisasi investasi mencapai US$19,10 miliar yang merupakan realisasi terbesar sejak 30 tahun terakhir. Tahun 2018 terdapat 129 negara (countries and territories) yang berinvestasi di Vietnam. Negara investor terbesar adalah Jepang dengan komitmen investasi sebesar US$7,99 miliar, Korea Selatan US$6,88 miliar, Singapura US$4,16 miliar, British Virgin Islands US$1,84 miliar, Cina US$1,81 miliar; Hongkong US$ 1,72 miliar; Taiwan US$ 1 miliar; Thailand US$739,97 juta, Australia US$596,79 juta, dan Perancis US$521,68 juta.

Selanjutnya pada tahun 2019. PDB Vietnam pada tahun 2019 tetap berada pada angka 7%, tertinggi di Asia Tenggara, dan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat melonjak tinggi 34,8% pada sembilan bulan pertama tahun 2019. Akibat dari perang dagang ini, Amerika Serikat menjadi pasar ekspor terbesar bagi Vietnam diikuti Uni Eropa, dan Cina. Menurut General Statistics Office (GSO) Vietnam, pada tahun 2019 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam mencapai 7,02%. Pada kuartal I tahun 2019 PDB Vietnam tumbuh 6,82%, kuartal II 6,73%, kuartal III 7,48%, dan kuartal IV 6,97%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 2,01% dan memberikan kontribusi sebesar 4,6% terhadap pertumbuhan PDB. Sektor industri dan konstruksi tumbuh 8,90% dan memberikan kontribusi 50,4% terhadap PDB; serta sektor jasa tumbuh 7,3% dan memberikan kontribusi 45% terhadap PDB".

Informan *C1* menjelaskan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekonomi Vietnam dari perspektif peralihan perdagangan yang menyatakan

> *Negara ASEAN yang menikmati peralihan perdagangan dari AS dan Cina adalah: Vietnam (7,9% GDP), Malaysia (1,3% GDP), Singapura (0,7% GDP), Thailand (0,5% GDP), dan Filipina (0,1% GDP). Negara Asia Timur yang memiliki peluang terbesar untuk menggantikan penurunan ekspor Cina ke AS adalah Vietnam sebesar 10,9% GDP, sedangkan Indonesia hanya diperkirakan memperoleh tambahan manfaat sebesar 1,3% GDP. Salah satu alasannya karena Vietnam memiliki derajat kesamaan produk ekspor dengan Cina yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia atas produk yang dikenakan kenaikan tarif-nya oleh AS."*

World bank mencatat pertumbuhan ekonomi Vietnam pada saat perang dagang AS-Cina tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,46% dan tahun 2019 sebesar 7,36% dibanding tahun 2017 sebesar 6,94%. Psaat perang dagang AS-Cina tahun 2018 GDP per capita Vietnam meningkat menjadi sebesar USD3.267,20 dan tahun 2019 sebesar USD3.491,10 dibanding tahun 2017 sebesar USD2.992,10. GSO Vietnam mencatat projek FDI berlisensi baru pada tahun 2018 sebesar 14,8% atas 3.147 proyek dengan nilai implementasi naik sebesar 9% dengan nilai USD19.100.000.000. Kenaikan juga berlanjut di tahun 2020 dimana projek FDI lisensi pada tahun 2019 sebesar 30% atas 4.028 proyek dengan nilai implementasi naik sebesar 7% dengan nilai USD20.380.000.000. Sedangkan nilai ekspor Vietnam meningkat mencapai 220% dalam kurun watu 10 tahun dimana nilai ekspor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar USD114.159.551.730 naik hingga USD365.198.624.200 pada tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perang dagang Amerika Serikat dan Cina mempengaruhi perekonomian Vietnam yang terlihat dari peningkatan

pertumbuhan ekonomi, peningkatan GDP per capita, peningkatan *foreign direct investment* yang masuk dan peningkatan ekspor-impor.

Selain melihat dampak perang dagang AS-Cina dari sisi ekonomi, penelitian ini juga melihat dari sisi pertahanan Vietnam. Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap pertahanan Vietnam menurut informan A1 menyatakan

> *Vietnam dan Amerika Serikat telah merayakan 28 tahun hubungan diplomatik pada bulan Juli tahun ini, sebuah bukti peningkatan hubungan bilateral dan ekonomi sejak Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975. Vietnam telah muncul sebagai tujuan manufaktur alternatif yang ideal bagi bisnis AS selain Tiongkok, salah satunya karena perang dagang AS-Tiongkok dan terganggunya rantai pasokan akibat pandemi virus corona, krisis Russia-Ukraina, serta persengketaan di LTS, khususnya terkait dengan kebebasan bernavigasi di kawasan tersebut dimana Tiongkok telah menetapkan secara sepihak nine dash line.*
>
> *Pada tahun 2018, USS Carl Vinson, kapal induk Angkatan Laut AS, melaksanakan kunjungan pelabuhan bersejarah di Vietnam. Pada tahun yang sama, Vietnam juga untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam Rim of the Pacific (RIMPAC), sebuah latihan militer maritim yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh AS. AS juga telah mencabut larangan penjualan senjata legal ke Vietnam pada tahun 2016; kedua negara telah menjalin hubungan militer yang lebih erat dan pertukaran militer tingkat tinggi. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2023 yang lalu, 3 kapal perang AS, yakni kapal induk USS Ronald Reagan, kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga USS Antietam (CG 54) dan USS Robert Smalls (CG 62). Bagi Vietnam, hal ini bertujuan untuk menentang sikap assertive Tiongkok di kawasan, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.*

Bagi Vietnam yang memegang kunci keseimbangan kekuatan di kawasan, maka perang dagang antara AS-Tiongkok ini tentunya juga akan sangat menguntung baik dari segi politis, pertahanan maupun ekonomi dan perdagangan. Perselisihan perdagangan antara AS dan Tiongkok berdampak besar pada Vietnam. Eksportir Vietnam mengalami peningkatan permintaan terhadap produk mereka, khususnya garmen dan tekstil. Vietnam telah muncul sebagai alternatif selain Tiongkok bagi investor yang mendapatkan manfaat dari Tiongkok ditambah satu strategi yang melibatkan perpindahan atau perluasan investor ke negara lain untuk meningkatkan akses pasar.

Sedangkan Informan B1 menjelaskan bahwa perang dagang AS-Cina tidak berpengaruh terhadap pertahanan Vietnam namun adanya peningkatan belanja militer dengan penjelasan sebagai berikut:

Tidak ditemukan adanya data pengaruh perang dagang AS-China terhadap pertahanan militer Vietnam, namun menurut Stockholm International Peace Research Institute, Vietnam mengalami peningkatan belanja militer terbesar di Asia Tenggara antara tahun 2003 dan 2018 dimana belanja militer Vietnam meningkat hampir 700 persen, dari USD 841 juta pada tahun 2003 menjadi USD 5,5 miliar pada tahun 2018 atau 8,1% dari total belanja pemerintah dan 2,3% PDB. Selama periode 2018-2020, belanja militer Vietnam diperkirakan mengalami peningkatan tahunan rata-rata 8,78% menurut laporan yang diterbitkan oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS).

Vietnam menanggapi strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) secara positif karena kesesuaiannya dengan beberapa kepentingan nasional Vietnam, namun tetap berhati-hati terutama dalam dimensi keamanan karena pengaruh China (Tung N. C., 2022). Vietnam mengambil pendekatan yang hati-hati dan selektif terhadap kerjasama keamanan

dengan AS, sementara lebih proaktif dalam domain ekonomi. Hubungan AS-Vietnam telah menguat, khususnya dalam kerjasama militer, dengan AS yang menyediakan peralatan militer dan bantuan kepada Vietnam.

Dinamika geopolitik yang ditimbulkan oleh perang mempengaruhi keputusan strategis Vietnam dalam hal pertahanan dan keamanan. Vietnam berusaha untuk menghindari terjebak dalam persaingan antara dua kekuatan besar tersebut dimana lebih berhati-hati dalam meningkatkan kerjasama pertahanan dengan AS untuk tidak memprovokasi China. Vietnam juga telah menerima bantuan militer dari AS, termasuk peralatan yang meningkatkan kapasitas maritimnya, yang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pertahanan di tengah ketegangan di Laut China Selatan. Namun, Vietnam tetap berhati-hati dalam memperdalam kerjasama keamanan dengan AS, termasuk dalam hal pembelian senjata, yang mungkin dipengaruhi oleh kekhawatiran akan reaksi China.

Vietnam juga mencari untuk mendiversifikasi kemitraan strategisnya dan mengurangi ketergantungan ekonominya pada China sebagai akibat dari perang dagang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan strategis pertahanan dan keamanan nasionalnya (Tien N. H. et al, 2021). Hubungan antara Vietnam dan India telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang kuat, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan dimana Vietnam telah menjadi bagian dari latihan angkatan laut multinasional India, MILAN, dan telah memberikan izin kepada India untuk menggunakan pelabuhannya di Nha Trang, yang terletak strategis di Teluk Cam (Ranh Sangtam A., 2021). Angkatan Laut India melatih sekitar 500 pelaut Vietnam dalam pertempuran bawah air yang komprehensif di fasilitas kapal selamnya, INS Satavahana, sementara Angkatan Udara India menawarkan pelatihan konversi pilot kepada Angkatan Udara Vietnam. Selain itu, Vietnam telah mengizinkan India untuk mendirikan pusat pelacakan dan pencitraan satelit di tanahnya sendiri, yang memungkinkan Vietnam untuk mengakses gambar yang mencakup

kawasan tersebut yang dihasilkan oleh satelit India, memberikan Hanoi lebih banyak leverage dan kemampuan untuk memantau aktivitas China di Laut China Selatan. Dalam hal perdagangan, India kini termasuk di antara sepuluh mitra dagang teratas Vietnam.

Perang dagang AS-Cina telah mempengaruhi tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga memberikan dampak terhadap kebijakan pertahanan dan diplomasi militer. Vietnam terus berupaya mengukuhkan posisinya di kawasan dengan strategi yang hati-hati, mencoba memanfaatkan situasi geopolitik yang kompleks untuk kepentingan pertahanan dan politik luar negerinya.

4.3.4 Manajemen Pertahanan

Manajemen pertahanan merupakan kebijakan suatu negara untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negara. Manajemen pertahanan Vietnam menurut informan A1 menyatakan:

> *Doktrin dan strategi pertahanan Vietnam adalah dengan membangun kekuatan pertahanan nasionalnya berdasarkan kekuatan keseluruhan bangsa dan solidaritas massa yang besar, dengan demikian mengkonsolidasikan dan memperkuat persatuan nasional (Permesta). Kebijakan Pertahanan Nasional negara ini bersifat damai dan menekankan pembelaan diri serta kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat secara tegas, dan secara konsisten melalui cara-cara damai. Vietnam menjalin dan mengembangkan hubungan pertahanan dengan semua negara, terutama negara tetangga, mitra strategis, mitra komprehensif, membangun kepercayaan, dan menggalang dukungan serta bantuan internasional untuk mencegah dan merespons risiko perang.*

Menurut Resolusi No.129/2020/QH14 tanggal 13 November 2020, Vietnam berencana mengeluarkan dana sebesar US$6,4 miliar untuk pertahanan, atau sekitar 13,9% dari perkiraan pengeluaran negara pada tahun 2021. Laporan GlobalData pada awal tahun 2022 mengungkapkan bahwa pengeluaran militer Vietnam untuk akuisisi adalah sekitar US$1,1 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh sebesar 8,1% per tahun hingga mencapai US$1,8 miliar antara tahun 2023 – 2027. Laporan tersebut memperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat sebesar 8,5% tahun-ke-tahun, mencapai $8,5 miliar pada tahun 2027.

Vietnam memfokuskan militernya pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keamanan maritim. Upaya-upaya ini mencakup kemampuan angkatan udara, pertahanan udara, kapal permukaan, dan kapal bawah permukaan. Pemasok dan subkontraktor peralatan pertahanan diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan untuk kombatan angkatan laut, pertahanan udara, sistem intelijen, dan peralatan pengawasan dan pengintaian (ISR). Perusahaan-perusahaan industri pertahanan AS melihat adanya potensi terhadap pasar seiring dengan membaiknya kerangka peraturan untuk mengekspor peralatan dan jasa pertahanan AS ke Vietnam, sehingga membuka peluang komersial yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan AS. Perubahan kebijakan ini dicapai pada kunjungan resmi Presiden Obama ke Vietnam pada bulan Mei 2016, diaman AS secara resmi mengumumkan pencabutan embargo senjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap negara tersebut.

Vietnam memiliki garis pantai sepanjang 2.000 mil yang menghadap ke Laut Tiongkok Selatan dan kontribusi besar sektor ekonomi kelautan terhadap GDP, pemerintah Vietnam memandang maritim sebagai target pertahanan prioritasnya dalam konteks ketegangan kedaulatan yang terus-menerus di Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2011, Vietnam mengeluarkan strategi maritim terperinci untuk tahun

2011-2020, yang menjadikan perlindungan kedaulatan maritim dan ekonomi maritim sebagai pilar utama keamanan nasional. Resolusi No.36 tahun 2018 menekankan bahwa pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang terkait dengan pertahanan nasional merupakan misi inti pembangunan ekonomi Vietnam pada tahun 2030-2045.

Setelah Kongres Nasional ke-13 pada bulan Februari 2021, Vietnam telah menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya pada tahun 2030 dengan Tentara Rakyat dan Keamanan Rakyat yang kompak dan kuat dengan prioritas diberikan kepada kekuatan berikut: Angkatan Udara, Angkatan Laut, Penjaga Pantai, Sinyal, Peperangan Elektronik, Pengintaian Teknis, Perang Dunia Maya, dan Sandi. Vietnam juga membuat amandemen Undang-Undang untuk memperluas peralatan Pasukan Keamanan Publik, yang memungkinkan mereka memperoleh pesawat terbang dan kapal selain senjata, bahan peledak, peralatan pendukung, serta kendaraan taktis.

Meskipun ada upaya investasi dalam pengembangan teknologi pertahanan, Vietnam masih harus bergantung pada mitra asing untuk peralatan dan perangkat pertahanan berteknologi tinggi karena kemampuan produsen dalam negeri yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. Vietnam secara bertahap memperluas basis industri pertahanan nasionalnya melalui kemitraan luar negeri dan transfer teknologi dengan negara-negara asing termasuk Rusia, Belarusia, Ukraina, Korut, Spanyol, Perancis, Israel, Belanda, India, Jepang dan Korea Selatan".

Manajemen pertahanan Vietnam menurut informan B1 menyatakan:

Menurut Vietnam Defence White Paper 2019, Vietnam melakukan investasi selektif di beberapa perusahaan industri pertahanan yang

maju yang bertujuan untuk membentuk kelompok atau kompleks industri pertahanan yang memiliki kendali mandiri, berteknologi tinggi, dan penggunaan ganda. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sosio-ekonomi, Vietnam menentukan anggaran pertahanan nasional untuk memenuhi tuntutan penguatan potensi pertahanan nasional untuk menjaga tanah air dan memastikan tidak jatuh ke dalam perlombaan senjata atau membuat anggaran pertahanan menjadi beban ekonomi.

Unit pertahanan ekonomi Vietnam People's Army (VPA) selalu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tetap, menyediakan pekerjaan bagi ratusan ribu orang. Selain itu, telah memenuhi kewajiban finansial untuk anggaran negara dan memproduksi produk teknologi dengan nilai ganda dan tinggi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan menyelesaikan tugas menggabungkan pembangunan sosial ekonomi dengan konsolidasi pertahanan.

Anggaran pertahanan Vietnam diproyeksikan mencapai CAGR sebesar 9,43% pada tahun 2020-2024, dan mencapai US$7,9 miliar pada tahun 2024. Pemerintah Vietnam mengalokasikan US$ 5,1 miliar untuk belanja militer pada tahun 2019, dimana 32,5% dialokasikan untuk pengadaan peralatan pertahanan. Belanja pertahanan negara ini meningkat dengan CAGR sebesar 7,34% selama tahun 2015-2019.

Upaya modernisasi militer Vietnam difokuskan untuk mencegah Tiongkok mengambil alih wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Selama periode perkiraan, Vietnam diperkirakan akan membeli pesawat tempur dan pesawat multi-peran, kendaraan lapis baja, kapal angkatan laut, kapal patroli, pesawat patroli maritim, dan peralatan pengawasan. Pengeluaran pertahanan negara ini diproyeksikan meningkat dari US$5,5 miliar pada tahun

2020 menjadi US$7,9 miliar pada tahun 2024, meningkat dengan CAGR sebesar 9,43%".

Dari sejumlah informasi diterima, manajemen pertahanan Vietnam didasarkan pada prinsip membangun kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh solidaritas massa, dengan fokus pada persatuan nasional dan kebijakan pertahanan yang bersifat damai. Negara ini memiliki strategi yang menekankan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik serta menggalang dukungan internasional untuk mencegah perang.

Vietnam mengalokasikan dana yang meningkat untuk pertahanan, dengan proyeksi pengeluaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Negara ini secara khusus memprioritaskan keamanan maritim mengingat garis pantainya yang panjang dan kontribusi besar sektor ekonomi kelautannya terhadap GDP. Fokus utama investasi pertahanan meliputi kemampuan angkatan udara, pertahanan udara, serta kapal permukaan dan bawah permukaan. Pemerintah Vietnam juga telah menyetujui rencana modernisasi militer untuk meningkatkan kekuatan Angkatan Bersenjata, terutama dalam konteks konflik teritorial di Laut Cina Selatan. Meskipun demikian, Vietnam masih bergantung pada teknologi pertahanan dari mitra asing karena kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang belum memadai.

Pengeluaran pertahanan negara ini diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, dengan fokus pada pembelian peralatan dan teknologi militer yang lebih canggih guna menghadapi potensi ancaman terutama dari wilayah maritim yang disengketakan. Pendekatan Vietnam dalam manajemen pertahanan melalui investasi selektif, modernisasi militer, dan kerjasama internasional menjadi strategi penting dalam menjaga kedaulatan negara serta stabilitas keamanan regional. Dengan perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang besar, Vietnam bertujuan untuk memperkuat kekuatan pertahanannya tanpa meningkatkan ketegangan regional.

4.3.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara dalam konteks ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap pertumbuhan ekonomi Vietnam menurut informan A1 menyatakan

> "*Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,46%. Nilai Ekspor Vietnam ke dunia sebear USD400miliar lebih besar USD100miliar dibanding ekspor Indonesia ke dunia sebesar $300miliar. GDP Vietnam sama dengan nilai ekspor Vietnam. Namun impor juga banyak karena banyak bahan baku impor. Ekspor Vietnam bersumber dari FDI. Ekspor terbesar ke dunia adalah produk industri khususnya elektronik. 20% nilai ekspor Vietnam ke Dunia dari satu perusahaan yaitu Samsung (Korea Selatan) dimana 50% ekspor produk samsung ke dunia berasal dari Vietnam"*.

Informan C1 menjelaskan pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap pertumbuhan ekonomi Vietnam dilihat dari perspektif nilai GDP dan nilai GDP per Capita yakni *"GDP Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD329miliar menjadi USD428miliar pada tahun 2023. GDP per capita Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD3.415,- menjadi USD4.276,-".*

Worldbank mencatat pertumbuhan ekonomi Vietnam pada saat perang dagang AS-Cina tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,46% dan tahun 2019 sebesar 7,36% dibanding tahun 2017 sebesar 6,94%. Pada saat perang dagang AS-Cina tahun 2018 Worldbank mencatat GDP per capita Vietnam meningkat menjadi sebesar USD3.267,20 dan tahun 2019 sebesar USD3.491,10 dibanding tahun 2017 sebesar USD2.992,10 sebagaimana tercermin dalam grafik dibawah ini:

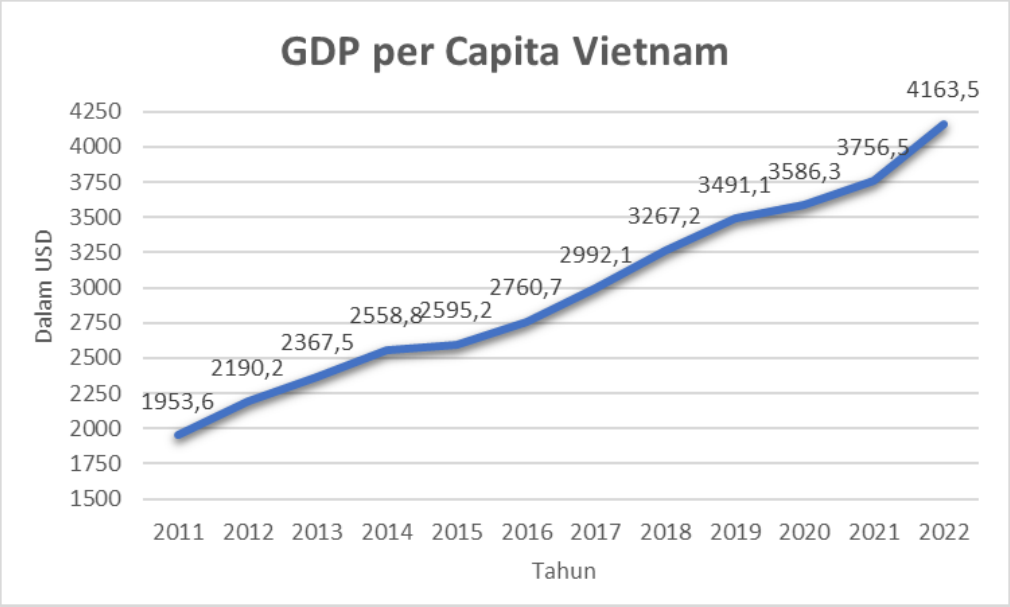

Grafik 4.11 GDP per Capita Vietnam

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

General Statistics Office mencatat persentase neraca perdagangan Vietnam pada saat perang dagang AS-Cina tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 4,18%, tahun 2019 sebesar 5,61% dan tahun 2020 sebesar 5,52% dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 2,54%. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan komposisi GDP periode 2015 sampai dengan 2020:

Tabel 4.6 Komposisi GDP Vietnam Periode 2015 sd 2020

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pembentukan Modal	1.666.878	1.789.074	2.033.265	2.244.260	2.464.760	2.567.421
Konsumsi Pemerintah	553.131	586.406	637.883	683.093	738.260	762.512
Konsumsi Rumah Tangga	3.080.149	3.312.415	3.650.335	4.000.543	4.379.853	4.502.208
Neraca Perdagangan	48.356	158.189	160.177	293.187	432.448	443.836
Perbedaan Statistik	- 157.190	- 206.683	- 187.755	- 212.042	- 308.121	- 231.591
TOTAL GDP (Bill, Dongs)	5.191.324	5.639.401	6.293.905	7.009.042	7.707.200	8.044.386

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% Neraca Perdagangan dgn GDP	0,93%	2,81%	2,54%	4,18%	5,61%	5,52%

Sumber: GSO Vietnam (2023)

Dari data yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Vietnam mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengalami peningkatan signifikan dalam neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut menunjukkan Vietnam memiliki ketahanan ekonomi yang kuat di tengah ketegangan perdagangan global antara dua kekuatan ekonomi besar.

4.3.6 Foreign Direct Investment

4.3.6.1 Nilai FDI

Foreign Direct Investment memainkan peran penting dalam sumber pendanaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Setiap tahun Vietnam selalu menerima *Foreign Direct Investment* baru yang masuk. Informan A1 dan B1 menyatakan bahwa *pertumbuhan FDI yang masuk ke Vietnam semakin meningkat*. Grafik dibawah ini menunjukkan kenaikan akumulasi FDI di Vietnam dalam kurun waktu 1988 sampai dengan 2022 berdasarkan data GSO Vietnam:

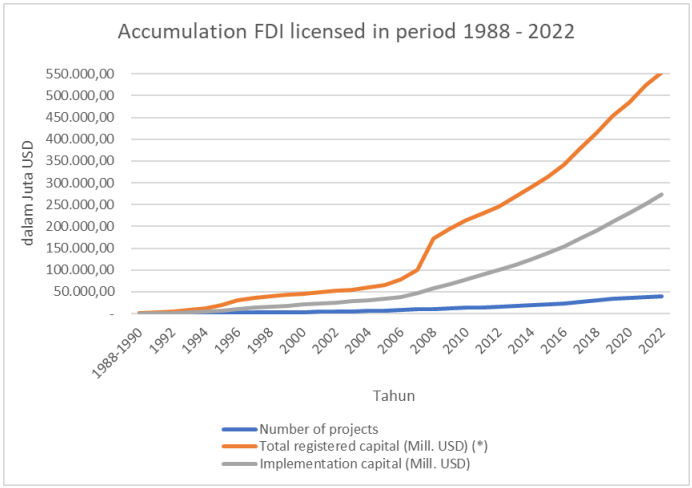

Grafik 4.12 Accumulation FDI Licenced in Period 1988 - 2022

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Pada tahun 1991 merupakan awal masuk *Foreign Direct Investment* di Vietnam dengan nilai sebesar USD428.460.000 untuk 363 proyek yang diimplementasikan. Ini menjadi langkah awal yang penting dalam membuka pintu bagi investasi asing ke negara tersebut. Seiring berjalannya 30 tahun, Vietnam telah menjadi tujuan yang semakin menarik bagi investor internasional. Akumulasi FDI tahun 2022 mengalami peningkatan yang mengesankan dengan pencapaian sebesar USD273.588.860.000 untuk 40.518 proyek yang telah direalisasikan.

Informan B1 menyatakan "*Keuntungan yang didapat oleh Vietnam dari Perang Dagang Amerika Serikat-Cina pada bidang investasi tahun 2018, komitmen investasi asing langsung (FDI) di Vietnam mencapai US$35,46 miliar atau setara dengan 98,8% dari angka tahun 2017. Dari angka tersebut, FDI yang memperoleh lisensi baru mencapai 3,046 proyek dengan nilai US$18 miliar; penambahan modal bagi 1.056 proyek yang telah beroperasi mencapai US$7,58 miliar, dan dalam bentuk pembelian saham mencapai US$9,88 miliar. Sementara itu, realisasi investasi mencapai US$19,10 miliar yang merupakan realisasi terbesar sejak 30 tahun terakhir.*

Nilai FDI yang disampaikan informan B1 kurang selaras dengan data GSO Vietnam dimana total lisensi projek baru tahun 2018 sebanyak 3.147 proyek dengan nilai implementasi sebesar USD19.100.000.000. Tabel dibawah menunjukkan perkembangan jumlah lisensi proyek FDI periode 1988 sampai dengan 2022:

Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah Lisensi Proyek FDI Vietnam periode 1988 sd 2022

Year	Number of projects	Total registered capital (Mill. USD) (*)	Implementation capital (Mill. USD)
1988-1990	211,00	1.603,50	-
1991	152,00	1.284,40	428,46
1992	196,00	2.077,60	574,85

Year	Number of projects	Total registered capital (Mill. USD) (*)	Implementation capital (Mill. USD)
1993	274,00	2.829,80	1.117,54
1994	372,00	4.262,10	2.240,58
1995	415,00	7.925,20	2.792,03
1996	372,00	9.635,30	2.938,20
1997	349,00	5.955,60	3.277,10
1998	285,00	4.873,40	2.372,40
1999	327,00	2.282,50	2.528,30
2000	391,00	2.762,80	2.398,70
2001	555,00	3.265,70	2.225,60
2002	808,00	2.993,40	2.884,70
2003	791,00	3.172,70	2.723,30
2004	811,00	4.534,30	2.708,40
2005	970,00	6.840,00	3.300,50
2006	987,00	12.004,50	4.100,40
2007	1.544,00	21.348,80	8.034,10
2008	1.171,00	71.726,80	11.500,20
2009	1.208,00	23.107,50	10.000,50
2010	1.237,00	19.886,80	11.000,30
2011	1.186,00	15.598,10	11.000,10
2012	1.287,00	16.348,00	10.046,60
2013	1.530,00	22.352,23	11.500,00
2014	1.843,00	21.921,65	12.500,00
2015	2.120,00	24.115,00	14.500,00
2016	2.613,00	26.890,46	15.800,00
2017	2.741,00	37.100,60	17.500,00
2018	3.147,00	36.368,55	19.100,00
2019	4.028,00	38.951,69	20.380,00
2020	2.610,00	31.045,33	19.980,00
2021	1.818,00	38.854,30	19.740,00
2022	2.169,00	29.288,21	22.396,00
Total	38.349,00	523.918,60	251.192,90

Sumber: GSO Vietnam (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa projek FDI berlisensi baru pada tahun 2018 sebesar 14,8% atas 3.147 proyek dengan nilai implementasi

naik sebesar 9% dengan nilai USD19.100.000.000. Kenaikan juga berlanjut di tahun 2020 dimana projek FDI lisensi pada tahun 2019 sebesar 30% atas 4.028 proyek dengan nilai implementasi naik sebesar 7% dengan nilai USD20.380.000.000.

4.3.6.2 Sektor FDI

Sektor yang menerima FDI terbesar menurut informan A1 adalah "*sektor manufaktur dengan posisi saat itu sumber negara FDI terbesar adalah Korea Selatan*". Hal tersebut selaras dengan data GSO Vietnam yang menunjukkan bahwa projek FDI lisensi sektor manufaktur merupakan sektor yang paling diminati investor dengan nilai investasi sebesar USD261.432.550.000,- atau sebesar 59% dari USD440.535.090.000,. Grafik dibawah ini merujuk data GSO Vietnam yang menunjukkan FDI berdasarkan klasifikasi aktivitas ekonomi:

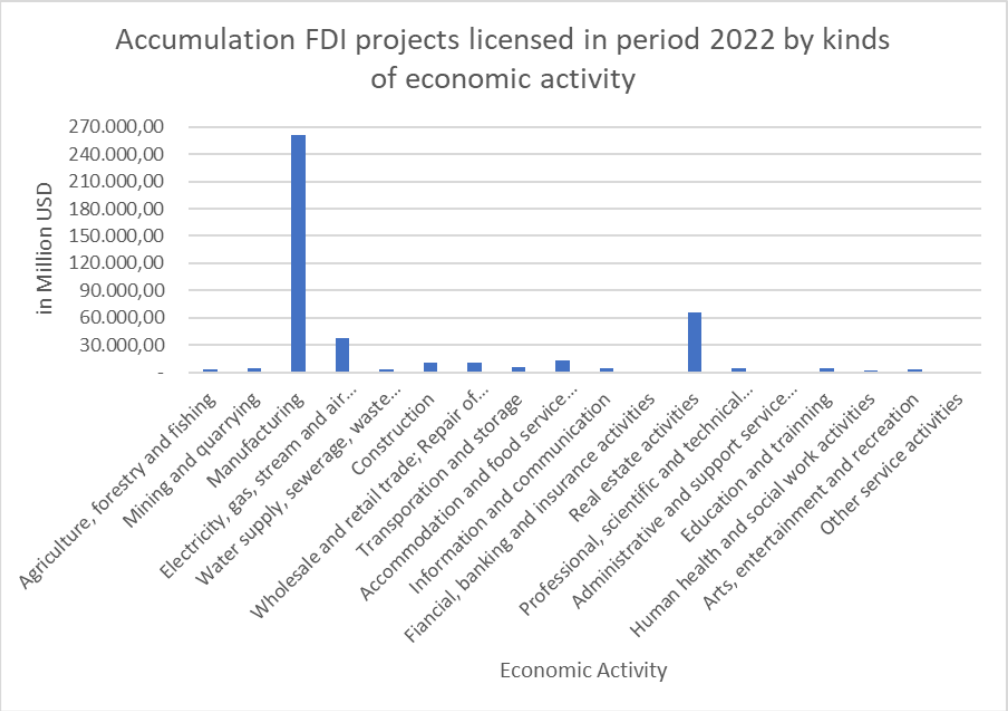

Grafik 4.13 Accumuation FDI Projects Licenced in Period 2022 by Kinds of Economyc Activity

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Projek FDI lisensi pada posisi kedua dan ketiga yang diminati investor yaitu sektor real estate sebesar 15% dengan nilai USD66.401.090.000 dan sektor listrik & gas sebesar 8% dengan nilai USD 38.313.320.000. Data diatas menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang menarik dan menguntungkan bagi investor asing. CNBC Indonesia tanggal 4 September 2019 merilis bahwa Worldbank menyatakan 33 industri Cina melakukan relokasi yaitu 23 industri merelokasi ke Vietnam dan 10 industri lainnya ke beberapa negara ASEAN lain kecuali Indonesia. Vietnam Investment Review tanggal 27 Desember 2018 merilis tiga sektor dengan investasi terbesar di Vietnam dari modal terdaftar adalah sektor manufaktur sebesar 47% dengan nilai USD16.580.000.000; sektor real estate sebesar 18,5% dengan nilai USD6.600.000.000; dan sektor ritel sebesar 10,3% dengan nilai USD3.670.000.000.

4.3.6.3 Sumber FDI

Sumber yang menerima FDI terbesar menurut informan A1 adalah "*Sumber negara FDI terbesar adalah Korea Selatan*". Hal tersebut sesuai dengan data GSO Vietnam yang menunjukkan bahwa negara yang paling banyak berinvestasi di Vietnam per 31 Desember 2022 memiliki urutan sebagai berikut Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, Taiwan dan Hongkong sebagaimana tergambarkan dalam grafik dibawah ini:

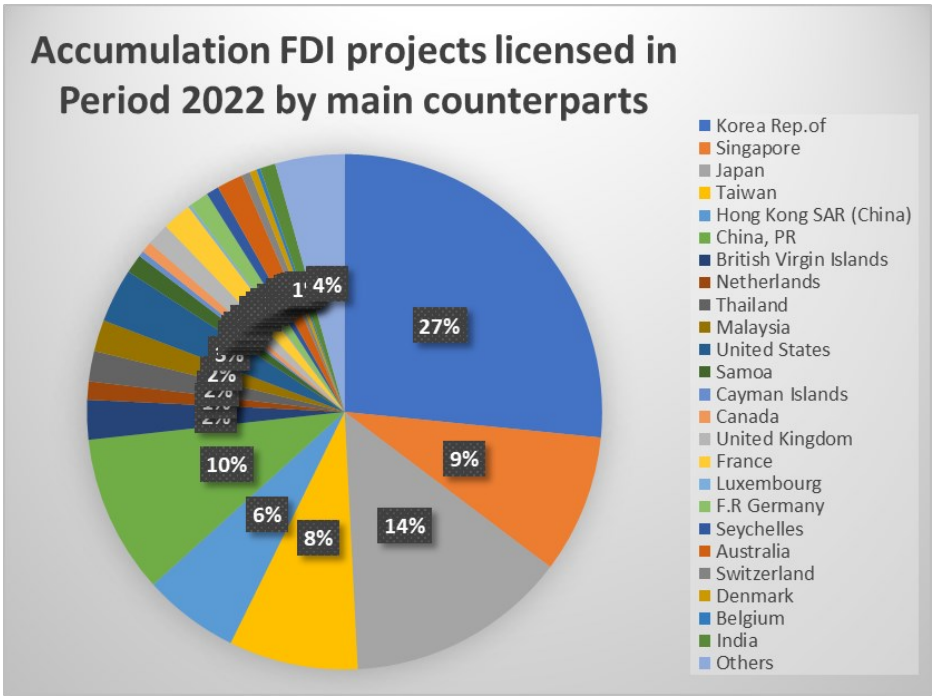

Grafik 4.14 Accumulation FDI Projects Licenced in Period 2022 by Main Counterparts

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan Korea Selatan adalah negara sumber *foreign direct investment* terbesar di Vietnam dengan persentase sebesar 27%. Hubungan diplomatik antara Vietnam dan Korea memiliki sejarah panjang hingga akhirnya saat ini memiliki hubungan yang saling menguntungkan.

Informan B1 menerangkan investasi yang diterima Vietnam pada tahun 2018 yakni t*ahun 2018 terdapat 129 negara (countries and territories) yang berinvestasi di Vietnam. Negara investor terbesar adalah Jepang dengan komitmen investasi sebesar US$7,99 miliar, Korea Selatan US$6,88 miliar, Singapura US$4,16 miliar, British Virgin Islands US$1,84 miliar, Cina US$1,81 miliar; Hongkong US$ 1,72 miliar; Taiwan US$ 1 miliar; Thailand US$739,97 juta, Australia US$596,79 juta, dan Perancis US$521,68 juta".* Ketiga negara investor terbesar tahun 2018 sesuai dengan Vietnam Investment Review, meskipun nilainya berbeda. Vietnam Investment Review tanggal 27 Desember 2018 merilis tiga negara dengan

investasi terbesar di Vietnam dengan nilai dari modal terdaftar adalah Jepang sebesar USD8.590.000.000; Korea Selatan sebesar USD7.200.000.000; dan Singapura sebesar USD5.000.000.000.

Melihat dari hubungan antara Vietnam dan Korea memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-13 ketika Pangeran Ly Long Tuong dari Dinasti Ly Vietnam pindah ke Korea untuk bergabung dengan Dinasti Goryo melawan invasi Mongolia. Sejak abad ke-16 hingga ke-19, kedua negara bertukar puisi dan buku selama misi upeti ke Tiongkok. Korea dan Vietnam menjadi korban politik negara-negara besar selama Perang Dingin. Korea terbagi menjadi Utara dan Selatan pada 1953, sementara Vietnam mengalami nasib yang serupa pada 1954, tak lama setelah dimulainya Perang Vietnam.

Perang Vietnam menjadi titik balik tragis dalam hubungan antara Republik Korea (ROK) dan Vietnam. Antara tahun 1964 dan 1973, Korea Selatan mengirim lebih dari 300.000 tentara ke Vietnam untuk berperang bersama AS melawan Vietnam Utara. Konflik berlanjut setelah perang berakhir pada 1975. Kebijakan Doi Moi tahun 1986 membuat Vietnam tertarik pada pengalaman Korea Selatan dalam pembangunan ekonomi.

Diplomasi Olimpiade Seoul tahun 1988 membantu memulihkan hubungan antara Korea Selatan dan Vietnam, memungkinkan delegasi Vietnam berinteraksi secara tidak resmi dengan rekan-rekan mereka dari Korea Selatan. Kunjungan para pejabat Vietnam ke Korea Selatan antara tahun 1987 dan 1989 juga memperkuat hubungan bilateral. Pada tahun 1990, kedua negara mulai negosiasi untuk normalisasi diplomatik. Tanggal 22 Desember 1992, Korea Selatan dan Vietnam menandatangani pernyataan bersama untuk menjalin hubungan diplomatik penuh, yang sejalan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik keduanya di era pasca-Perang Dingin. Bagi Vietnam, kepentingan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang berfokus pada diversifikasi dan multilateralisme menjadi landasan penting dalam membangun hubungan dengan Seoul.

Pada 2002, hubungan antara Korea Selatan dan Vietnam ditingkatkan menjadi "kemitraan komprehensif di abad ke-21" dan diperkuat lebih lanjut menjadi "kemitraan kerja sama strategis" pada 2009. Baru-baru ini, keduanya mengumumkan pembentukan kemitraan strategis komprehensif saat Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, melakukan kunjungan ke Seoul pada Desember 2022. Hal ini menandai peningkatan hubungan yang lebih dalam antara kedua negara.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dan Presiden Vietnam, Vo Van Thuong, bertemu di Hanoi pada 23 Juni 2023 menyepakati memperdalam kemitraan ekonomi yang berfokus pada sektor mineral dan energi dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendirikan pusat rantai pasokan bersama logam tanah jarang dan mineral seperti tungsten, serta berencana mengembangkan sumber daya energi Vietnam termasuk gas alam dan hidrogen. Sejumlah kesepakatan ditandatangani, termasuk kerjasama antara perusahaan seperti Korea Gas Corp. dan perusahaan Vietnam untuk proyek pembangkit listrik tenaga gas alam cair, serta perjanjian antara SK E&S dan PVN Vietnam untuk bisnis hidrogen. Selain itu, Kementerian Keuangan Korea Selatan menandatangani dokumen untuk meningkatkan batas kredit ke Vietnam menjadi $2 miliar selama tujuh tahun, dari 2024 hingga 2030.

Kunjungan tersebut menunjukkan pentingnya hubungan bisnis dan ekonomi antara Korea Selatan dan Vietnam, dengan kehadiran sekitar 200 eksekutif bisnis dan pejabat ekonomi Korea Selatan. Perusahaan besar seperti Samsung yang telah menjadikan Vietnam sebagai pusat utama produksi ponsel pintar, menunjukkan komitmen jangka panjang di negara tersebut. Selain kerja sama ekonomi, Yoon juga menjanjikan kerja sama industri pertahanan yang lebih erat, terutama dalam konteks kepercayaan politik yang diperkuat. Korea Selatan berupaya menjadi pemasok senjata yang lebih signifikan bagi Vietnam, mengingat Vietnam sebelumnya mengimpor sebagian besar senjatanya dari Rusia. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan ekspor senjata Korea Selatan ke negara-negara lain

yang membutuhkan. Kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan keamanan maritim Vietnam, menunjukkan dorongan untuk meningkatkan kerja sama strategis di bidang luar negeri dan keamanan. Ini menandai langkah penting dalam kemitraan antara Korea Selatan dan Vietnam yang semakin mendalam, terutama dalam hal ekonomi, energi, industri pertahanan, dan strategi keamanan.

4.3.6.4 Nilai Mata Uang

Nilai mata memilki peran penting dalam perdagangan internasional karena memfasilitasi transaksi perdagangan antar negara-negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Nilai tukar merujuk pada harga atau nilai yang dimiliki oleh mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Ilmi, 2017). Saat ini mata uang yang mudah diterima secara internasional adalah Dollar Amerika Serikat (USD). Adanya mata uang yang diterima secara internasional, perdagangan menjadi lebih lancar dan memungkinkan transaksi tanpa harus menggunakan sistem barter.

Mata uang negara Vietnam adalah Dong. Ketiga informan selaras menyatakan bahwa Dong merupakan mata *uang terlemah di ASEAN.* Nilai tukar rata-rata Dong pada tahun 2021 terhadap USD sebesar Rp23.203. Berikut tabel yang menunjukkan nilai tukar mata uang negara-negara ASEAN terhadap USD dalam periode 2013 sampai dengan 2021:

Tabel 4.8 Foreign Exchange Rate in ASEAN (Average of Period)

Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vietnam	20.933,8	21.130,5	21.620,7	21.908,8	22.343,8	22.982,3	23.050,2	23.153,7	23.203
Indonesia	10.585,9	11.884,5	13.481,8	13.327,5	13.401,0	14.481,0	13.901,0	14.105,0	14.312
Laos	7.851,6	8.045,5	8.131,1	8.134,2	8.299,4	8.422,7	8.679,4	9.381,0	9.421
Cambodia	4.029,0	4.040,9	4.058,5	4.182,0	4.037,0	4.045,1	4.061,1	4.079,3	4.068
Myanmar	935,3	980,2	1.168,2	1.232,3	1.360,3	1.428,6	1.522,6	1.377,5	1.485
Filipina	42,9	44,3	45,5	47,5	50,3	53,0	51,8	49,6	49,3
Thailand	30,7	32,5	34,2	35,3	33,9	32,3	31,0	31,3	32
Malaysia	3,2	3,3	3,9	4,2	4,3	4,0	4,1	4,2	4,1
Singapore	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4

Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brunei Darussalam	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4

Sumber: ASEAN Statistic Yearbook 2022 (2022)

Tebal diatas menunjukkan bahwa Dong merupakan mata uang terlemah di ASEAN. Nilai tukar mata uang suatu negara mempengaruhi masuknya *foreign direct investment*. Penelitian Davis & Akbar (2022), Sharifi-Renami & Mirfatah (2012) dan Sasana & Fathoni menunjukan hubungan korelasi negatif yang signifikan antara nilai tukar dengan *foreign direct investment*. Studi menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki dampak besar terhadap arus masuk FDI. Nilai tukar mata uang yang mengalami penurunan akan mendorong naiknya FDI karena perbedaan selisih nilai mata uang lokal dan asing. Penurunan nilai mata uang suatu negara akan menaikkan minat investor karena memungkinkan investasi dengan biaya yang lebih rendah dari biasanya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar (Davis & Akbar, 2022).

Negara-negara ASEAN bersatu dalam merancang integrasi pembayaran regional melalui Regional Payment Connectivity (RPC). RPC bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan menghubungkan sistem pembayaran nasional, menyelaraskan standar, dan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional (Rillo A. D., 2018). Kesepakatan tercapai dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-10 di Jakarta pada 25 Agustus 2023.

Fokus pada RPC juga melibatkan tiga prioritas utama Bank Sentral, termasuk penguatan kebijakan makroekonomi, ekspansi penerapan RPC, dan penguatan ketahanan keuangan dengan memakai mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Implementasi RPC juga melibatkan kerangka kerja konektivitas pembayaran regional, pelaksanaan pembayaran lintas batas menggunakan kode QR, dan kerangka kerja transaksi menggunakan mata uang lokal.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, mempromosikan pertumbuhan inklusif, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dalam sistem pembayaran.

4.3.6.5 Stabilitas Politik

Vietnam memiliki stabilitas politik yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi. Charin, R. O. P. and Afriandi, F. (2021) menyatakan bentuk pemerintahan Vietnam adalah komunis sama dengan pernyataan ketiga informan.

a. Kondisi Politik

Kondisi politik di Vietnam menurut informan 1 menyatakan "*Meskipun komunis, Vietnam mengikuti perkembangan perkonomian dunia. Pemerintahan komunis Vietnam dimana hanya memiliki satu partai yang berada pada semua lini pemerintahan dimulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Keputusan Strategis di Vietnam diputuskan oleh Polite Biro yang berisikan 18 orang yang terdiri dari akademisi, partai, pemerintah. Di Vietnam jabatan yang paling penting adalah sekjen partai. Sekjen partai yang memilih perdana menteri dan presiden. Pemilu tetap dilaksanakan di Vietnam dengan satu partai"*. Hal tersebut **selaras** dengan informan B1 yang menyatakan "*Vietnam adalah republik sosialis dengan sistem partai tunggal, diperintah oleh Partai Komunis Vietnam. Sistem politik negara ini dicirikan oleh dominasi Partai Komunis yang memegang peran utama dalam semua organisasi pemerintahan, politik, dan sosial. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis yang diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sekretaris Jenderal Partai Komunis adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengendalikan organisasi nasional partai dan*

perjanjian negara, serta mengawasi hukum. Situasi politik di Vietnam mencerminkan sistem partai tunggal dengan pengaruh kuat Partai Komunis di berbagai aspek pemerintahan dan Masyarakat". Informan C1 mengungkapkan hal yang **sama** bahwa "*Vietnam merupakan negara komunis yang hanya memiliki 1 partai"*.

Kondisi politik yang disampaikan ketiga informas selaras dengan Chi, N. (2022) yang menyatakan politik Vietnam ditentukan oleh kerangka republik sosialis yang pada akhirnya dikendalikan oleh satu partai dengan Presiden Vietnam adalah kepala negara dan Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, keduanya terpisah dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam yang memimpin Partai Komunis dan merupakan kepala Politbiro & amp; Komisi Militer Pusat, dengan demikian Sekretaris Jenderal adalah pemimpin tertinggi Vietnam secara de facto.

b. Kepatuhan dan Dukungan Masyarakat

Respon masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*pemerintahan komunis Vietnam berada di semua lini pemerintahan yakni kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat sehingga segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka penerapan dan pengawasannya sampai dengan kabupaten. Vietnam tidak ada ormas dan pungli"*. Hal **serupa** juga disampaikan B1 bahwa "*kebijakan pemerintah Vietnam dapat diimplementasikan di masyarakat*".

Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah di Vietnam tercermin melalui prinsip-prinsip sosialis yang menjadi landasan negara. Nilai-nilai seperti demokrasi sosialis, keadilan berbasis hukum, serta pengaruh tradisional seperti

patriotisme dan harmoni sosial memengaruhi sikap masyarakat terhadap otoritas. Pemerintah Vietnam berupaya menjaga nilai-nilai nasional dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dan organisasi internasional untuk memastikan kepatuhan yang didasarkan pada kesepakatan nilai bersama. Keseluruhan kepatuhan ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara nilai-nilai sosialis, tradisional, dan budaya yang terintegrasi dalam masyarakat Vietnam (Nguyen, Q. T. N., 2016)

c. Birokrasi

Investor akan mencari lingkungan bisnis yang stabil dan menguntungkan secara ekonomi untuk menanamkan modal. Oleh karena itu, suatu negara akan berusaha memberikan kemudahan dalam hal perizinan, regulasi yang transparan, dan proses administrasi yang efisien adalah kunci utama untuk menciptakan daya tarik bagi investor.

Kemudahan birokrasi di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah Vietnam, maka penerapan sesuai peraturan tersebut. Setiap perusahaan yang ingin berinvestasi di Vietnam, akan ditanya rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jika rencana tersebut terpenuhi maka perusahaan tersebut akan mendapatkan fasilitas yang telah ditetapkan Pemerintah Vietnam. Sebagai contoh satu perusahaan Indonesia setelah 3 tahun seharusnya tidak sewa pabrik tapi sudah membangun pabrik dikarenakan permasalahan izinnya belum keluar kemudian pabrik tersebut mau disegel oleh pemerintah daerah. Pemerintah-pemerintah daerah di Vietnam bersaing untuk mendapatkan investasi sehingga membuka banyak lapangan*

pekerjaan". Hal **selaras** juga diungkapkan informan C1 yang menyatakan "*FDI yang tinggi ditunjang dari kemudahan berinvestasi yang baik"*.

Struktur pemerintahan Vietnam yang terdiri dari dua tingkat penting yaitu garis kementerian dan struktur partai menciptakan lanskap birokrasi yang kompleks. Meskipun ada kerjasama yang baik antara departemen dan People Committees namun masih terdapat kekurangan dalam kerangka regulasi yang kuat untuk mengatasi praktik penggunaan lahan yang berbeda oleh para petani; perbedaan motivasi dan persepsi kurangnya kemampuan di pemerintah lokal dan regional (Dorien Korbee et al, 2019).

Ease of Doing Business merupakan indikator yang dikeluarkan oleh Worldbank untuk mengukur kemudahan berbisnis suatu negara. Indikator ini terdiri dari sepuluh faktor antara lain memulai sebuah bisnis, izin mendirikan bangunan, listrik, properti, kredit, perlindungan investor minoritas, pajak, perdagangan lintas negara, penegakkan kontrak, dan penyelesaian kebangkrutan. UNCTAD Worldbank merilis perkembangan easy of doing business rangking di negara-negara ASEAN periode 2015 sampai dengan 2020 yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

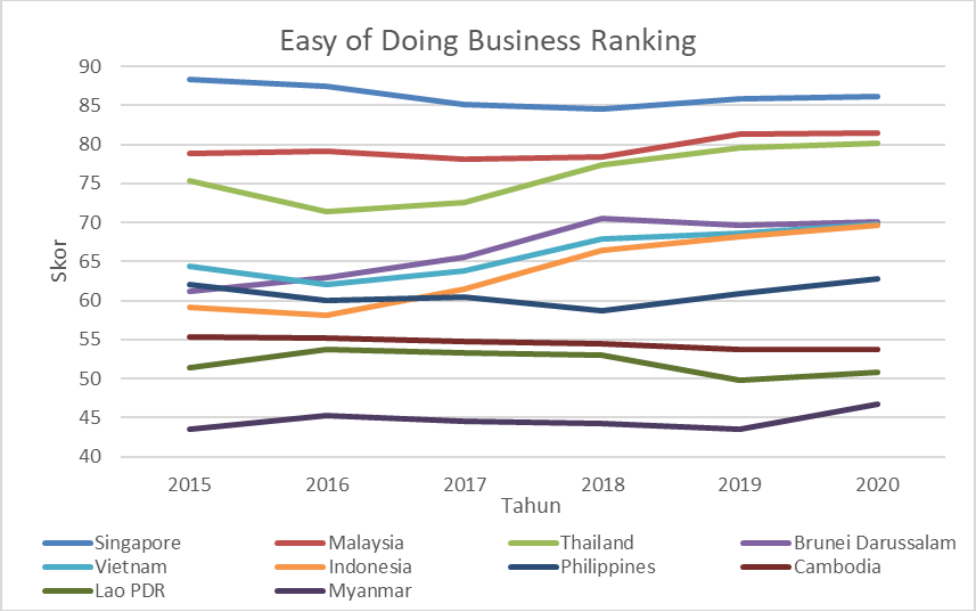

Grafik 4.15 Easy of Doing Bussiness Ranking

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Vietnam dalam laporan easy of doing business tahun 2020 menempati urutan kelima di wilayah ASEAN dengan nilai 69,8 setelah Singapura (86,2), Malaysia (81,5), Thailand (80,1), dan Brunei Darussalam (70,1). Atas rangking tersebut, menjadi tantangan bagi Vietnam untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kemudahan berbisnis dengan cara mengevaluasi terhadap indikator-indikator komponen pembentuk.

d. Korupsi

Korupsi baik di negara maju maupun negara berkembang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghalangi *foreign direct investment* karena investor enggan berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena risiko hukum dan keuangan yang lebih besar; dan membayar "lebih" untuk memasuki pasar atau memenangkan kontrak pemerintah. Korupsi di Vietnam menurut informan A1 menyatakan *korupsi masih ada. Gaji*

PNS di Vietnam masih rendah Vietnam sedang menggalakan bebas korupsi dikalangan pemerintahan.

Korupsi di Vietnam dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk yaitu korupsi administratif, yudisial, dan politik, serta korupsi kecil dan besar yang terjadi pada sektor publik maupun swasta dan menjadi endemik dalam pemerintahan dan masyarakat Vietnam (Ta Jack et al, 2021). Tingkat korupsi di Vietnam dianggap sebagai masalah nasional meskipun ada perubahan positif dalam perang melawan korupsi di ekonomi pasar Vietnam, sebagai contoh banyak kasus melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dengan lebih dari 20 perwira tinggi angkatan bersenjata yang dijatuhi hukuman (Tran T. T., 2020).

Meskipun jumlah kasus korupsi mungkin menurun namun skala dan keparahan kasus-kasus tersebut telah meningkat sehingga masih menjadi tantangan yang signifikan dan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk diberantas (Tran T. T., 2020). Corruption perceptions index tahun 2022 menempatkan Vietnam diurutan 77 dari 180 negara di dunia. Sedangkan CPI Vietnam di Kawasan ASEAN berada di posisi kempat setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Transparency International merilis perkembangan corruption perceptions index pada negara-negara wilayah ASEAN periode 2012 samai dengan 2022 yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

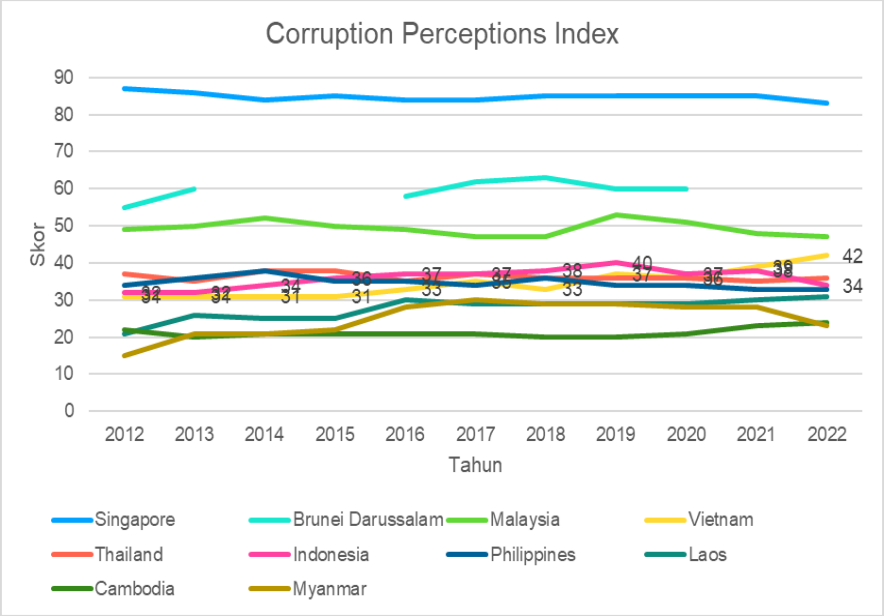

Grafik 4.16 *Corruption Perceptions Index*

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi investasi asing dalam suatu negara. Perpaduan antara kepastian hukum dan FDI memiliki hubungan yang sangat erat, karena kepastian hukum memberikan keyakinan kepada investor mengenai perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam berbisnis di suatu negara. Kepastian hukum mencakup beragam aspek, mulai dari kejelasan dalam regulasi hukum, kestabilan kebijakan, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, hingga penegakan hukum yang adil dan konsisten. Ketika suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat diandalkan, investor merasa lebih aman melakukan investasi jangka Panjang karena adanya kepastian bahwa kontrak dan hak investor akan dilindungi serta penegakan hukum yang adil.

World Justice Project mengeluarkan laporan tahunan Indeks Rule of Law yang mengevaluasi supremasi hukum di 142 negara. Laporan ini merupakan laporan independen yang

digunakan untuk menilai status hak asasi manusia dan kekuatan sistem peradilan secara global dengan delapan komponen penilaian yaitu batasan kekuasaan pemerintah, bebas Korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan Perdata, dan peradilan Pidana.

Vietnam dalam Rule of Law Index menempati peringkat ke kelima dengan skor 0,49 pada wilayah ASEAN dibawah Singapura (0,78), Malaysia (0,57), Indonesia (0,53), dan Thailand (0,50). The World Justice Project merilis perkembangan Rule of Law Index di negara-negara Kawasan ASEAN periode 2015 sampai dengan 2022:

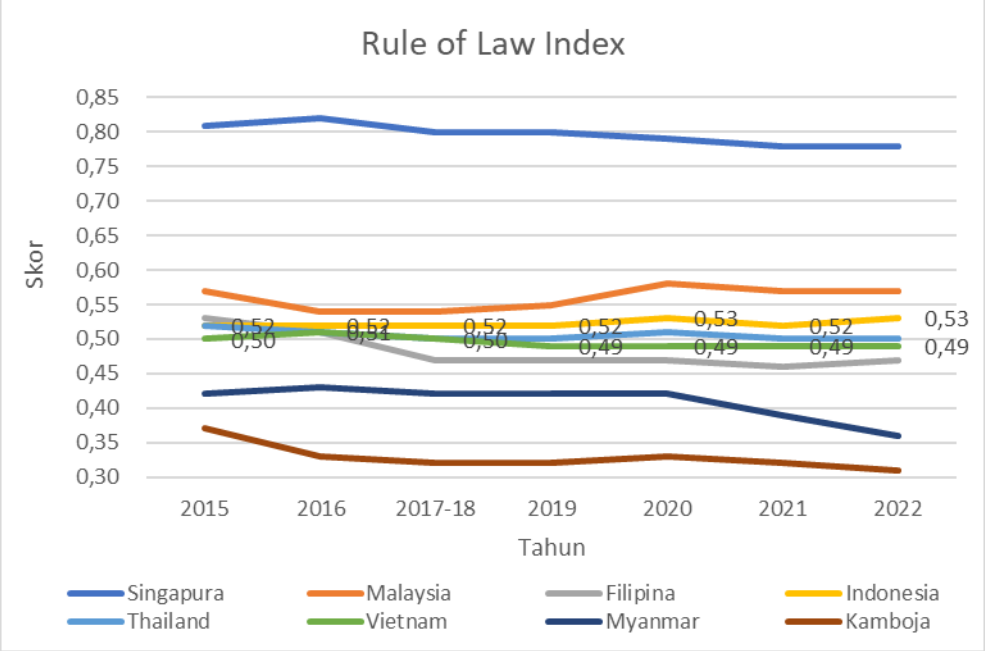

Grafik 4.17 *Rule of Law Index*

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.3.6.6 Kebijakan Insentif Pajak dan Dukungan Pemerintah

Kebijakan insentif pajak dan dukungan pemerintah memiliki peran dalam menarik Investasi Langsung Asing (FDI) ke suatu negara. Dengan menyediakan insentif yang menarik dan lingkungan yang kondusif bagi

investor asing, pemerintah dapat merangsang aliran investasi yang dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Kebijakan insentif pajak *Foreign Direct Investment* di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Pemerintah Vietnam memberikan berbagai insentif investasi antara lain insentif pajak penghasilan badan; pembebasan bea masuk; pembebasan atau pengurangan retribusi; dan penyusutan yang dipercepat*". Hal **serupa** juga diungkapkan oleh informan C1 yakni "*Pemerintah Vietnam memberikan insentif investasi berupa insentif pajak penghasilan badan yakni tarif preferensial dan tax holiday; insentif di kawasan ekonomi; insentif pajak berbasis industri; insentif industri penunjang; insentif bea masuk dan sewa tanah*".

Pada tanggal 17 Juni 2020, Pemerintah Vietnam telah menerbitkan kebijakan baru dengan menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya No. 67/2014/QH13 yaitu Undang-Undang No. 61/2020/QH14 (LOI 2020) mengenai Penanaman Modal yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021. UU menuangkan berbagai insentif investasi yang diberikan pemerintah Vietnam antara lain insentif pajak penghasilan badan; pembebasan bea masuk; pembebasan atau pengurangan retribusi; dan penyusutan yang dipercepat. Adapun subjek yang menerima insentif tersebut adalah proyek investasi di sektor perdagangan yang memenuhi syarat; proyek investasi di wilayah geografis yang memenuhi syarat; proyek investasi berkapitalisasi VND 6 triliun atau lebih dengan omset paling sedikit VND 10 triliun/tahun setelah 3 tahun atau memiliki lebih dari 3.000 pekerja; proyek investasi perumahan sosial, pedesaan dengan mempekerjakan 500 pekerja atau mempekerjakan penyandang disabilitas; perusahaan teknologi tinggi yang melibatkan transfer teknologi; proyek investasi awal yang inovatif; dan investasi yang memiliki rantai distribusi produk usaha kecil dan menengah. Namun insentif bea masuk, pembebasan/pengurangan retribusi dan penyusutan tidak diberikan pada proyek mineral, barang/jasa yang dikenakan pajak dalam UU Cukai, dan proyek rumah komensial.

Pemerintah Vietnam juga memberikan insentif dan dukungan investasi khusus dimana proyek penanamanan modal memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Dua kriteria proyek penerima insentif dan dukungan investasi khusus yaitu pusat inovasi baru/ penelitian dan pengembangan dengan modal sebesar VND 3 triliun atau lebih sesuai sertifikat keputusan Perdana Menteri; dan sektor atau perdagangan yang memenuhi syarat dengan kapitalisasi VND 30 triliun atau lebih sesuai kebijakan investasi.

Pemerintah Vietnam juga memberikan dukungan untuk mendorong FDI sesuai informan A1 yang menyatakan "*Bentuk dukungan pemerintah Vietnam terhadap investasi sebagai berikut pengembangan sistem infrastruktur teknis dan sosial proyek investasi; pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; kredit; relokasi tempat produksi dan usaha; transfer ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi; pengembangan pasar dan infromasi; dan penelitian dan pengembangan*". Hal **serupa** juga disampaikan informan C1 yang menyatakan "*Pemerintah Vietnam memberikan berbagai dukungan untuk menarik investor melakukan investasi*".

Undang-Undang No. 61/2020/QH14 (LOI 2020) juga menuangkan bentuk dukungan pemerintah Vietnam terhadap investasi berupa pengembangan sistem infrastruktur teknis dan sosial proyek investasi; pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; kredit; relokasi tempat produksi dan usaha; transfer ilmu pengetahuan, Teknik dan teknologi; pengembangan pasar dan infromasi; dan penelitian dan pengembangan.

Pada tahun 2024, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD) telah mengambil langkah bersejarah dengan mengimplementasikan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT). Perusahaan FDI yang memiliki omset tahunan 7750 miliar USD dalam waktu 2 tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% untuk perusahaan-

perusahaan multinasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar membayar bagian yang adil dari pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi.

Pajak minimum global ini dirancang untuk mengatasi masalah pengalihan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, yang sering kali memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah atau nol, yang dikenal sebagai "tax havens". Dengan adanya GMT, perusahaan-perusahaan ini akan diwajibkan untuk membayar setidaknya 15% pajak atas keuntungan mereka, tidak peduli dimana keuntungan tersebut dihasilkan. Implementasi GMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi, sementara dampaknya terhadap negara-negara non-haven akan bergantung pada bagaimana mereka menggunakan tarif pajak dan subsidi sebagai alat untuk menarik investasi (Janeba Eckhard and Schjelderup Guttorm, 2023).

4.3.6.7 Lokasi

Lokasi investasi merupakan salah satu faktor penting unutk menarik investasi asing langsung pada sebuah negara. Mendapatkan lokasi investasi yang optimal adalah kunci untuk keberhasilan investasi jangka panjang. Investor mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengevaluasi lokasi yang paling sesuai dengan tujuan bisnis mereka, termasuk potensi pertumbuhan, akses pasar, kebijakan pemerintah, serta ketersediaan sumber daya dan tenaga kerja yang mendukung. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemilihan lokasi investasi yang tepat dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi investor.

Vietnam merupakan negara yang memiliki lokasi yang strategis sesuai dengan informan A1 yang menyatakan “*Vietnam memiliki posisi geografis yang menguntungkan bagi perdagangan global dan dekat dengan rantai pasok Asia. Selain itu Vietnam dekat dengan Cina, dimana*

transportasi dari sana menggunakan trucking". Informan 2 **selaras** juga mengungkapkan bahwa "*Vietnam merupakan negara dengan posisi geografis yang menguntungkan bagi perdagangan global serta memiliki garis pantai yang panjang*".

Vietnam memiliki kondisi strategis secara geografis yang menarik bagi investasi dimana berada pada wilayah Asia Tenggara yang terletak di persimpangan antara pasar yang berkembang pesat di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Terhubung dengan jaringan transportasi yang berkembang, baik darat, laut, maupun udara sehingga memudahkan distribusi produk ke pasar-pasar penting di Asia dan dunia. Vietnam memiliki pesisir yang panjang memberikan kemudahan dalam memperoleh akses transportasi laut untuk melakukan pengiriman barang secara global.

4.3.6.8 Sumber Daya Manusia

a. Upah Tenaga Kerja

SDM yang telah bekerja tentu akan mendapatkan upah. Upah merupakan pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja dalam periode waktu atau persyaratan tertentu (Poernomo, 2019). Upah minimum merupakan gaji terendah yang harus diterima pekerja pada hari kerja. Setiap negara menetapkan upah minimum nasional dengan menggunakan periode dan metode penghitungan yang berbeda yakni upah minimum per jam, per hari kerja, minggu, bulan, dan masih banyak negara yang tidak memiliki upah minimum (Country economy, 2023).

Upah tenaga kerja Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*UMR di Vietnam dibagi menjadi 4 zona. Upah lebih murah daripada di Indonesia. Zona 1 (terbaik) nominalnya sama namun berbeda mata uang nya misalnya di Jakarta UMR Rp4.000.000 disana juga 4.000.000 Dong sehingga dirupiahkan 4.000.000 Dong dikali 0,6 sebesar*

*Rp2.400.000.*Hal tersebut juga ***selaras*** dengan yang disampaikan informan B1 dan C1 yang menyatakan *upah pekerja Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia*. Country Economy mempublikasikan data upah minimum bersifat bulanan dengan asumsi menerima gaji selama 12 bulan setiap tahun sehingga dapat dijadikan perbandingan upah minimum antar negara. Countryeconomy.com merilis upah minimum nasional di negara-negara kawasan ASEAN pada periode 2011 sampai dengan 2022 yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

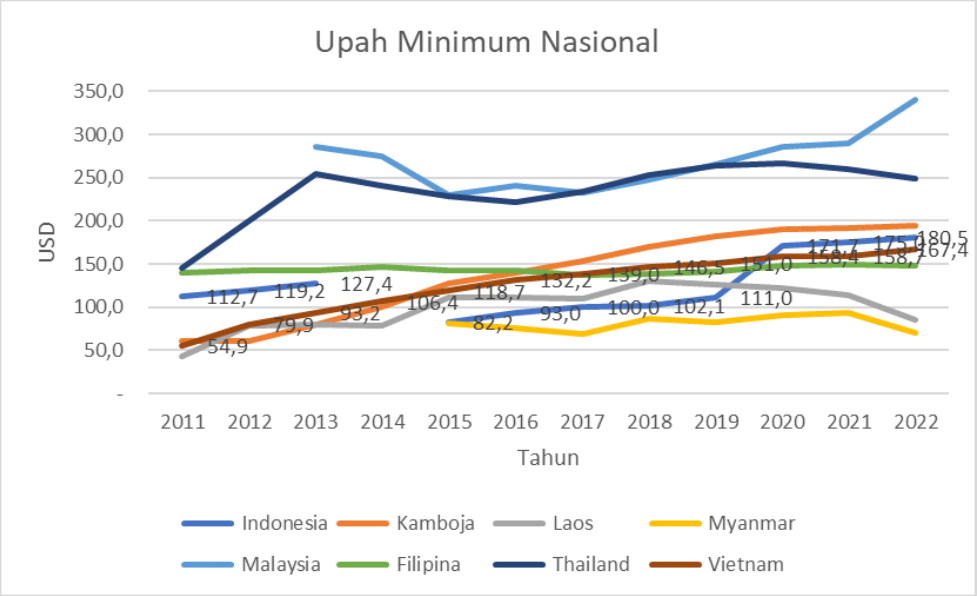

Grafik 4.18 Upah Minimum Nasional

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Meskipun diagram diatas menunjukkan perbedaan upah minimum Indonesia dengan Vietnam hanya selisih USD13 namun yang perlu diperhatikan bahwa kategorisasi penetapan upah tergantung daerah dengan yang dipengaruhi berbagai faktor lingkungannya. Vietnam menetapkan dua kategori upah minimum yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

1) Upah Minimum Umum bagi pegawai negeri dan angkatan bersenjata

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan No 24 efektif mulai 1 Juli 2023 yang menetapkan Upah Minimum Umum bagi pegawai negeri dan angkatan bersenjata menjadi VND 1.800.000 (US$78). Pengusaha dan pekerja di sektor swasta juga akan terkena dampak aturan ini karena Upah Minimum Umum digunakan untuk menghitung (i) batas gaji yang digunakan untuk menghitung premi asuransi sosial dan kesehatan ditetapkan sebesar 20 kali GMW; (ii) total iuran serikat pekerja yang disumbangkan oleh pemberi kerja harus sebesar 2% dari dana gaji pemberi kerja yang digunakan untuk iuran asuransi sosial; dan (iii) batasan kontribusi iuran bulanan serikat pekerja yang dibayarkan oleh karyawan ditetapkan sebesar 10% dari GMW. Peningkatan Upah Minimum Umum akan mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja di sektor swasta karena berhubungan dengan premi asuransi sosial dan kesehatan, serta iuran serikat pekerja yang disumbangkan oleh pemberi kerja dan pekerja.

2) Upah Minimum Regional

Pemerintah Vietnam mengeluarkan Keputusan 38 tanggal 12 Juni 2022 yang menetapkan upah minimum karyawan. Berikut upah minimum regional berdasarkan zona yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

a) Wilayah I mencakup perkotaan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh sebesar VND 4.680.000 (US$202)
b) Wilayah II meliputi pedesaan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh serta Da Nang sebesar VND 4.160.000 (US$179)

c) Wilayah III mencakup kota dan kabupaten provinsi Bac Ninh, Bac Giang, Hai Duong, Phu Tho, Binh Phuc dan provinsi lain yang tidak terdaftar di Wilayah I dan Wilayah II sebesar VND 3.640.000 (US$157)

d) Wilayah IV mencakup wilayah yang tersisa sebesar VND 3.250.000 (US$140)

Selain itu, aturan tersebut juga menetapkan upah minimum per jam untuk daerah terkait yaitu:

a) Wilayah I sebesar VND 22.500 (US$0,97)
b) Wilayah II sebesar VND 20.000 (US$0,86)
c) Wilayah III sebesar VND 17.500 (US$0,75)
d) Wilayah IV sebesar VND 15.600 (US$0,67)

b. Angkatan Tenaga Kerja

Vietnam merupakan negara ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN Asia Tenggara. Informan C1 menyatakan *Vietnam memiliki jumlah penduduk 100,10 juta jiwa (IMF)* sedangkan berdasarkan ASEAN Statistical Yearbook 2022 jumlah penduduk Vietnam tahun 2021 lebih dari 98 juta jiwa. Tabel dibawah ini menunjukkan struktur populasi yang berdasarkan *range* umur pada negara-negara di wilayah ASEAN yakni:

Tabel 4.9 Struktur Populasi ASEAN Tahun 2021

Negara	Jumlah (ribuan)						Persentase					
	0-4	5-19	20-54	55-64	65+	Total	0-4	5-19	20-54	55-64	65+	Total
Brunei Darussalam	27	94	246	36	27	430	6,2	21,9	57,1	8,4	6,4	100
Cambodia	1.547	4.770	8.021	1.233	1.021	16.592	9,3	28,8	48,3	7,4	6,2	100
Indonesia	21.892	66.217	140.402	24.673	19.066	272.249	8,0	24,3	51,6	9,1	7,0	100
Laos	761	2.237	3.562	443	334	7.338	10,4	30,5	48,5	6,0	4,6	100
Malaysia	2.446	8.040	17.131	2.670	2.290	32.577	7,5	24,7	52,6	8,2	7,0	100
Myanmar	4.991	14.823	26.985	4.739	3.756	55.295	9,0	26,8	48,8	8,6	6,8	100
Philippines	11.091	32.300	52.584	7.834	6.390	110.199	10,1	29,3	47,7	7,1	5,8	100
Singapore	178	604	1.985	581	639	3.987	4,5	15,1	49,8	14,6	16,0	100
Thailand	3.474	11.601	33.208	8.894	8.036	65.213	5,3	17,8	50,9	13,6	12,3	100
Vietnam	7.489	22.916	50.142	9.809	8.151	98.506	7,6	23,3	50,9	10,0	8,3	100
Total	**53.896**	**163.602**	**334.265**	**60.911**	**49.712**	**662.385**	**8,1**	**24,7**	**50,5**	**9,2**	**7,5**	**100**

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2022 (2022)

Tabel diatas menunjukkan angkatan kerja dengan usia 20-54 tahun di Vietnam mencapai 50.142.000 jiwa atau 50,9% dari total populasi *sesuai* dengan yang disampaikan informan A1. Angkatan kerja yang mencapai 50,9% merupakan kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan sosial. Meskipun angka ini menunjukkan potensi yang besar, kondisi angkatan kerja Vietnam juga dihadapkan pada berbagai kendala yakni restrukturisasi tenaga kerjanya termasuk kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan distribusi tenaga kerja antar sektor dan wilayah yang belum optimal (Truong DV, 2021). Selain itu kualitas tenaga kerja terampil masih terbatas yakni hanya 12 persen dari tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi; keterbatasan banyak pekerja dalam berbahasa asing, keterampilan TI, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi (Binh PTT, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi.

c. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja karena merupakan fondasi utama untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Informan A1 menyatakan *tingkat literasi di Indonesia lebih bagus dari Vietnam.* Data Worldbank menunjukkan nilai *literacy rate* Vietnam berada diurutan kelima setelah Brunei Darussalam, Singpura, Indonesia dan Malaysia sesuai yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

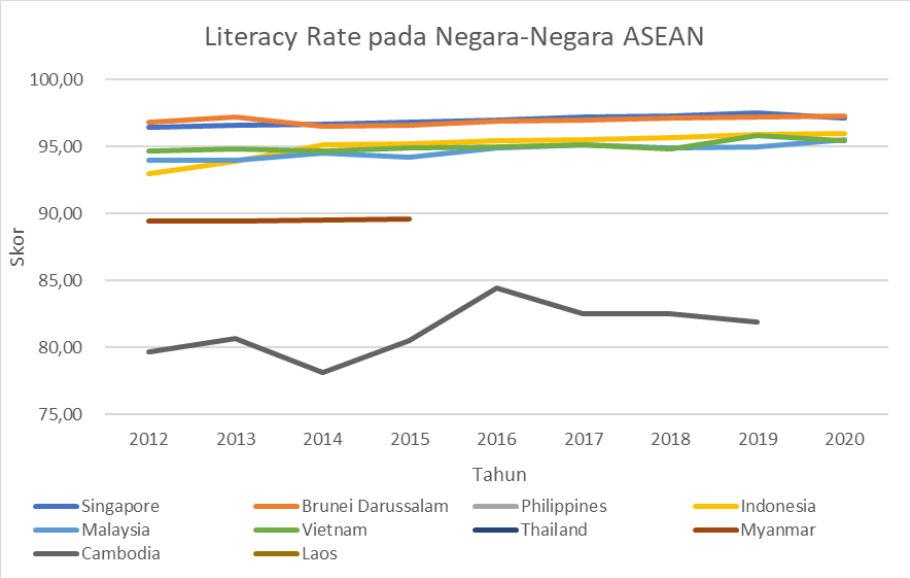

Grafik 4.19 Literacy Rate pada Negara-Negara ASEAN

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Sedangkan informan C1 melihat dari sudut pandang masuk ke perguruan tinggi yang menyatakan *tingkat persentase pendaftaran ke perguruan tinggi semakin tinggi.* Persentase pendaftaran sekolah perguruan tinggi Vietnam pada tahun 2021 di ASEAN berada diurutan kelima setelah Singapore, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Worldbank merilis perkembangan pendaftaran sekolah perguruan tinggi pada negara-negara ASEAN periode 1971 sampai dengan 2021:

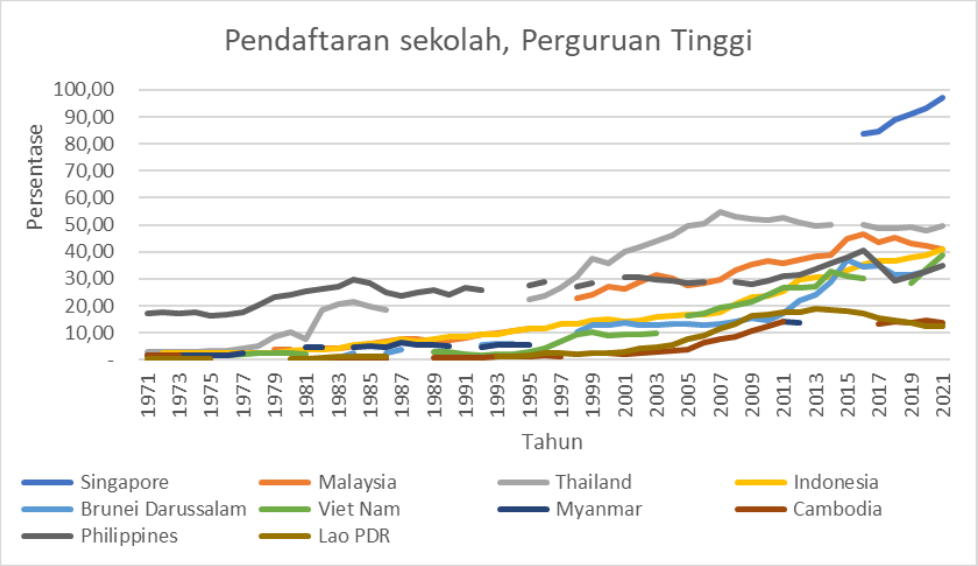

Grafik 4.20 Pendaftaran Sekolah, Perguruan Tinggi

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Sedangkan persentase pendaftaran sekolah menengah Vietnam pada tahun 2021 di ASEAN berada diurutan keempat setelah Singapore, Thailand, dan Indonesia sesuai data Worldbank yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

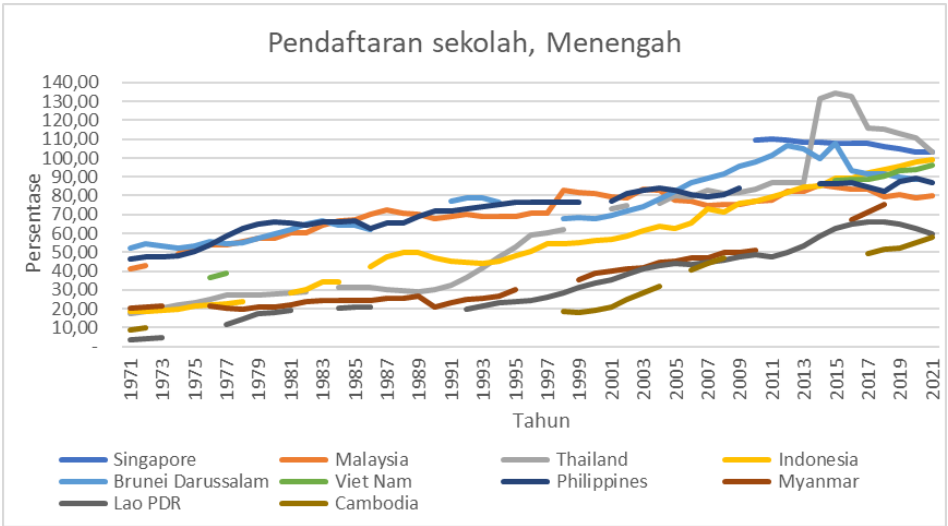

Grafik 4.21 Pendaftaran Sekolah, Menengah

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Pekerja pada sektor pelayanan yang di kota besar belum tentu bisa bahasa inggris menurut informan A1. Hal ini selaras dengan Binh PTT (2021) yang menyatakan kualitas tenaga kerja terampil masih terbatas yakni hanya 12 persen dari tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi; keterbatasan banyak pekerja dalam berbahasa asing, keterampilan TI, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi.

Kualitas pendidikan tenaga kerja di Vietnam menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja terutama Industri 4.0 dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja Vietnam (Le Quang et al, 2020). Kualitas pendidikan tenaga kerja di Vietnam masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yakni sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan sering kali tidak memenuhi keterampilan yang dibutuhkan oleh industri; kurikulum pendidikan yang ketinggalan zaman, guru yang kelebihan beban kerja dan kurangnya gaji, serta lulusan yang tidak memiliki keterampilan kerja yang dicari oleh sektor swasta; investasi dan pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan tidak memadai; fasilitas pendidikan masih jauh di bawah standar dibandingkan dengan negara di kawasan tersebut; tingkat akses terhadap pendidikan tinggi di Vietnam masih rendah; kesenjangan dalam kualitas pendidikan; dana penelitian di universitas terbatas; dan kualitas kerja sama yang masih terbatas (Binh PTT, 2021).

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan dan pelatihan di Vietnam masih memerlukan perbaikan agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar, khususnya dalam hal menghadapi perubahan-perubahan teknologi dan industri yang cepat.

d. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja (*labour productivity*) merupakan indikator yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* yang mengukur produktivitas tenaga kerja dengan menghitung total volume output (diukur dalam Produk Domestik Bruto, PDB) yang dihasilkan per unit tenaga kerja (diukur dalam jumlah orang yang dipekerjakan atau jam kerja) selama periode referensi waktu tertentu. Indikator ini memungkinkan pengguna data untuk menilai tingkat input PDB terhadap tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu, sehingga memberikan informasi umum tentang efisiensi dan kualitas sumber daya manusia dalam proses produksi untuk konteks ekonomi dan sosial tertentu, termasuk input dan inovasi pelengkap lainnya yang digunakan dalam produksi (ILO, 2023).

Informan A1 menungkapkan *produktivitas pekerja Vietnam meningkat setiap tahunnya* dan informan C1 menyatakan *produktivitas Indonesia lebih baik daripada Vietnam*. Hal tersebut selaras dengan Le Nguyen H. et al, (2019) menyatakan produktivitas tenaga kerja di Vietnam termasuk dalam kelompok terendah di kawasan Asia-Pasifik dibawah Singapura, Jepang, Korea, Malaysia, dan Thailand. Meskipun produktivitas tenaga kerja di Vietnam telah meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, masih tetap rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. ILO merilis produktivitas tenaga kerja di negara-negara ASEAN periode 2011 sampai dengan 2021 yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

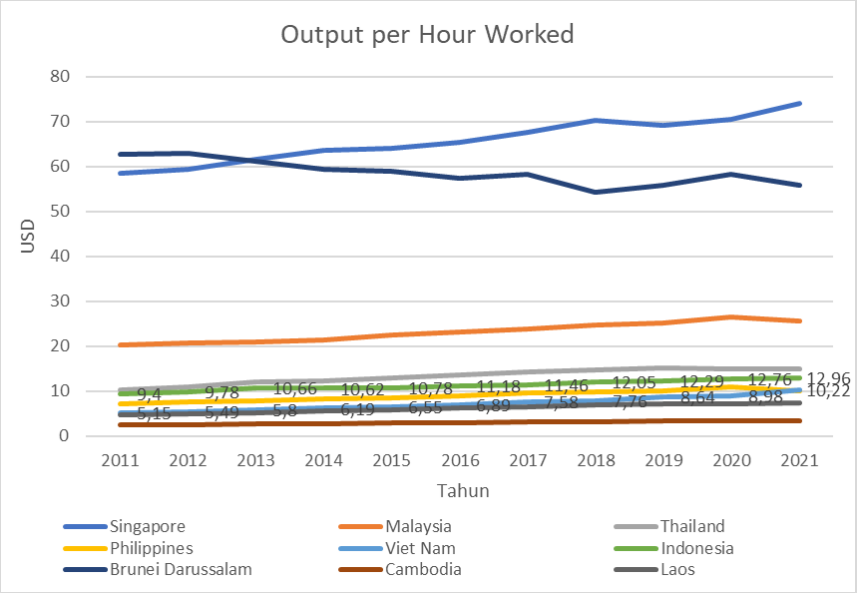

Grafik 4.22 *Output per Hour Worked*

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan Vietnam merupakan negara keenam dilihat dari produktivitas tenaga kerja setelah Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Meskipun hanya diperingkat keenam, produktivitas Vietnam dalam kurun waktu 10 tahun naik signifikan sebesar 100% dibanding menerangkan bahwa negara lain di kawasan ASEAN.

Informan A1 dan C1 menyatakan *pekerja Vietnam bekerja sesuai arahan dan SOP*. Namun yang yang menjadi kelemahan menurut A1 yakni *ketika ada masalah atau tidak sesuai SOP, mereka tidak mampu menyelesaikan masalah atau tragedi yang terjadi.*

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan produktivitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam masih berada di peringkat rendah dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya di kawasan Asia Tenggara, tetapi pertumbuhannya yang cepat memberikan harapan untuk peningkatan lebih lanjut di masa depan. Sedangkan

karakteristik etos kerja di Vietnam menyoroti kemampuan pekerja mengikuti instruksi, tetapi kurang dalam kemampuan adaptasi dan penyelesaian masalah saat dihadapkan pada situasi yang berada di luar jangkauan SOP atau arahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.3.6.9 Infrastruktur

Vietnam memerlukan sistem transportasi yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional. dan posisi geopolitiknya yang mempengaruhi strategi kekuatan dunia. Infrastruktur di Vietnam menurut informan A1 menyatakan *kondisi kereta masih lambat dan kurang memadai; cost logistik "certain" jadi bisa lebih murah sedangkan biaya logistik di Indonesia lebih uncertain; infrastruktur kurang terlalu bagus, tol antara utara ke selatan belum nyambung; Jalan OK namun tidak bagus banget; dan Vietnam memiliki kawasan industri dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan kurang lebih sama seperti di Indonesia*". Hal **serupa** juga diungkapkan informan C1 yang menyatakan "*Vietnam memiliki kawasan industri*".

Informasi A1 sesuai dengan Donski Leisuk J. (2023) yang mengungkapkan bahwa infrastruktur transportasi darat di Vietnam sangat penting untuk sistem logistik namun terdapat yakni banyak jalan yang terlalu sempit; kualitas permukaan jalan tidak memadai; kekurangan jalan tol terutama di jalur transportasi berat; jaringan kereta api yang ketinggalan zaman; kekurangan ruang gudang yang mempengaruhi operasi penanganan intermodal; kapasitas transportasi masih rendah, dengan tantangan dalam investasi dan pengembangan infrastruktur.

Worldbank melakukan pengukuran indeks infrastruktur negara-negara di dunia dalam laporan The Logistics Performace Index and Its Indicators. Laporan tersebut berguna untuk mengevaluasi kinerja infrastruktur suatu negara sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas

infrastruktur. Berikut grafik yang mencerminkan skor infrastruktur di negara-negara ASEAN periode 2007 hingga 2023 berdasarkan The Logistics Performace Index and Its Indicators:

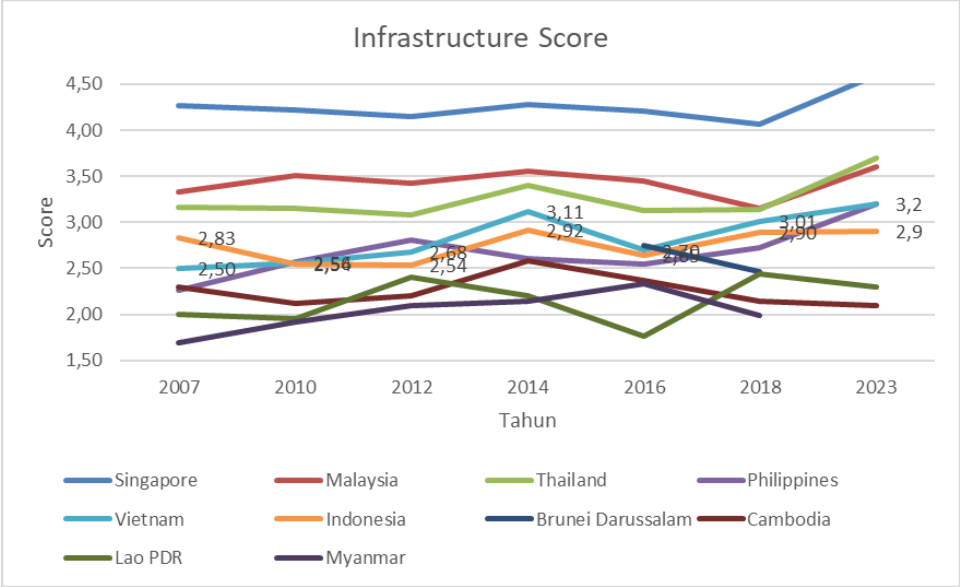

Grafik 4.23 Infrastructure Score

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

The Logistics Performace Index and Its Indicators menempatkan infrastruktur Vietnam peringkat 54 di dunia, masih dibawah negara ASEAN lainnya yaitu Singapura (5), Thailand (41) dan Malaysia (33). Infrastruktur yang masih berkembang di Vietnam menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Prioritas Vietnam untuk perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur agar menarik minat dan kepercayaan investor asing sehingga Vietnam memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan investasi yang menarik, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi serta daya saing globalnya.

a. Kinerja Logistik

Logistics Performance Index (LPI) merupakan salah satu indikator yang dikeluarkan Worldbank untuk melihat dan membantu negara-negara mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam kinerja logistik perdagangan suatu negara dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja negara tersebut.

Survey LPI dengan pendekatan kuesioner dimana hingga tahun 2018 kuesioner memiliki dua bagian yaitu internasional dan domestic, sementara tahun 2023 hanya internasional dikarenakan mengatasi kelelahan survei dan survei domestik dapat diperoleh lebih mudah dan akurat. Indikator LPI dibagi menjadi dua kategori utama yaitu regulasi kebijakan yang dinilai dalam tiga komponen antara lain bea cukai, infrastruktur, dan kompetensi dan kualitas pelayanan logistik; dan hasil kinerja rantai pasok yang dinilai dalam tiga komponen antara lain ketepatan waktu, harga pengiriman internasional yang kompetitif, dan kemampuan melacak dan menelesuri kiriman (Worldbank, 2023). Diagram dibawah ini mencerminkan The Logistic Performance Index (LPI) pada negara-negara ASEAN periode 2007 hingga 2023:

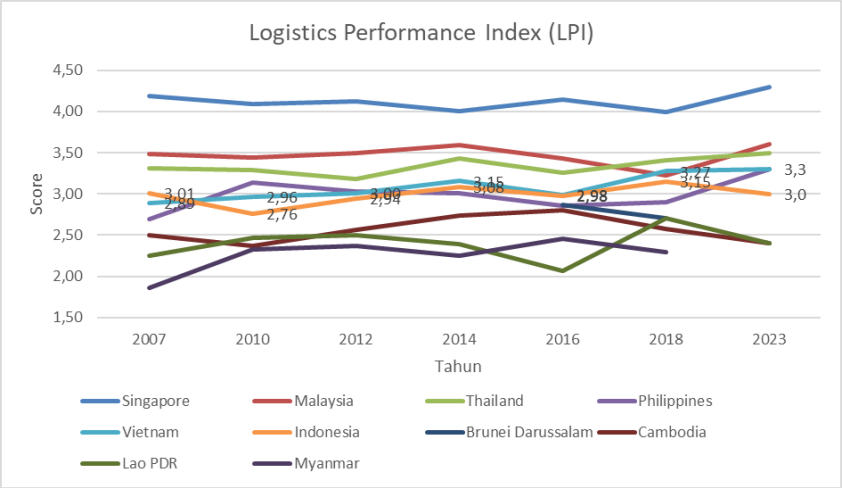

Grafik 4.24 Logistics Performance Index (LPI)

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Industri logistik di Vietnam masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi yang belum sepenuhnya (Linh & Huong, 2020). LPI Vietnam berada pada peringkat 45 di dunia, masih dibawah negara ASEAN lainnya yaitu Singapura (5), Thailand (34) dan Malaysia (35). Kinerja logistik Vietnam yang masih

berkembang akan menjadi tantangan bagi Vietnam untuk menarik minat investor asing.

b. Konektivitas Pengiriman

Konektivitas pengiriman merujuk pada seberapa baik pelabuhan atau wilayah terhubung dengan jaringan transportasi maritim global atau regional yang mencakup kemudahan dan efisiensi memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain melalui laut (Langen Peter de et al, 2016). Konektivitas transportasi merupakan faktor penentu penting dalam ekspor bilateral (Fugazza M. and Hoffmann J., (2017).

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengeluarkan Liner Shipping Connectivity Index/ LSCI (Indeks Konektivitas Pengiriman Liner) Indeks ini mengukur seberapa baik negara-negara terhubung ke jaringan pengiriman global berdasarkan status transportasi maritim mereka. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan lima komponen sektor transportasi maritim yaitu jumlah kapal, kapasitas pengangkutan kontainer, ukuran kapal maksimum, jumlah layanan, dan jumlah perusahaan yang menggunakan kapal kontainer di pelabuhan negara tersebut. UNCTAD merilis LSCI secara triwulan. Tujuan dari indeks ini adalah untuk menangkap tingkat integrasi suatu negara ke dalam jaringan pengiriman liner global, yang sangat memengaruhi akses suatu negara ke pasar dunia terutama dalam hal layanan pengiriman reguler untuk impor dan ekspor barang-barang manufaktur. UNCTAD Worldbank merilis nilai LSCI pada negara-negara di wilayah ASEAN periode 2006 sampai dengan 2023 yang tergambar dalam grafik dibawah ini:

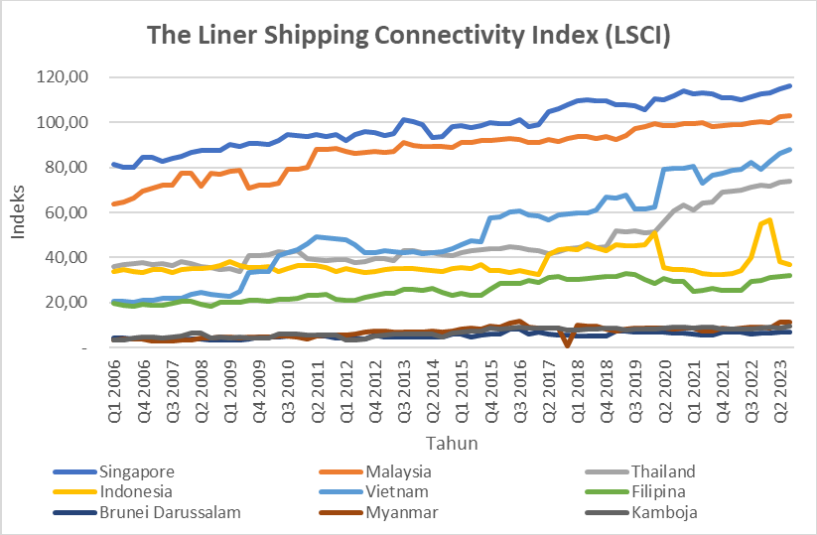

Grafik 4.25 The Liner Shipping Connectivity Index (LSCI)

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Liner Shipping Connectivity Index menempatkan konektivitas pengiriman Vietnam peringkat 3 di ASEAN, masih dibawah negara ASEAN lainnya yaitu Singapura dan Malaysia. Vietnam memiliki memiliki peran penting dalam perdagangan global dan konektivitas maritim dikarenakan *pertama,* memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan mitra ekspor terbesarnya yakni Amerika Serikat dan mitra impor serta mitra maritim terbesarnya yakni China; dan *kedua*, lokasinya yang strategis di antara dua kluster maritim besar yaitu China-Korea-Jepang dan Selat Malaka yang merupakan bagian dari Jalur Sutra Maritim atau Maritime Silk Road-MSR (Hu Z., (2019).

Vietnam telah berinvestasi dalam infrastruktur maritim yang mencakup pembangunan dan perluasan pelabuhan; peningkatan terminal kontainer untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengiriman; mengembangkan jaringan logistik mencakup gudang dan pusat distribusi untuk mendukung efisiensi pengiriman barang; dan sistem informasi yang canggih memungkinkan pelacakan dan pengelolaan

pengiriman barang secara real-time yang sangat penting untuk visibilitas dan kontrol atas rantai pasokan (Donski Leisuk J., 2023).

Selain LSCI, UNCTAD juga mengeluarkan The Port Liner Shipping Connectivity Index yang secara khusus berfokus pada pelabuhan individu, bukan negara atau wilayah secara keseluruhan. Indeks ini lebih detail dan digunakan untuk mengevaluasi daya saing dan koneksi pelabuhan individu dalam suatu wilayah atau negara. LSCI memberikan pandangan yang lebih luas tentang konektivitas suatu negara atau wilayah dalam jaringan pelayaran global, sementara The Port Liner Shipping Connectivity Index lebih fokus pada koneksi dan keterjangkauan pelabuhan individu. Berikut 10 Pelabuhan di ASEAN dengan skor tertinggi:

Tabel 4.10 The Port Liner Shipping Connectivity Index pada Pelabuhan di ASEAN

Negara	Nama Pelabuhan	Index
Singapore	Singapore	132,44
Malaysia	Port Klang	95,55
Thailand	Laem Chabang	78,15
Malaysia	Tanjung Pelepas	72,49
Vietnam	Vung Tau	60,44
Vietnam	Haiphong	53,14
Vietnam	Ho Chi Minh City	40,06
Indonesia	Jakarta	36,29
Philippines	Manila	34,78
Indonesia	Surabaya	28,85

Sumber: UNCTAD Worldbank (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Vietnam memiliki 3 pelabuhan yang termasuk dalam 10 pelabuhan terbaik di wilayah ASEAN dengan pelabuhan Vung Tau sebagai pelabuhan terbaik kelima di ASEAN. Vietnam memiliki 44 pelabuhan aktif yang terhubung dengan 3210 pelabuhan di

seluruh dunia, dengan aliran kapal yang melibatkan berbagai jenis kapal, termasuk kapal kontainer, tanker, kapal curah, dan kapal pesiar (Hu Z., (2019). Pelabuhan besar tersebut menjadi titik kunci dalam jaringan logistik, memfasilitasi perpindahan barang antara berbagai moda transportasi dan memperkuat konektivitas intermodal. Kapasitas Pelabuhan yang mencapai 550 juta ton per tahun menunjukkan kemampuan Vietnam untuk menangani volume perdagangan yang besar (Donski Leisuk J., 2023).

c. Harga Listrik

Harga listrik bervariasi pada negara-negara dunia. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yakni parameter dan pembangunan ekonomi suatu negara; tingkat konsumsi listrik; kebijakan nasional; jenis pasar energi; teknologi dan efisiensi energi; pasokan energi dan kebijakan iklim (Rokicki T. et al, 2021). Global petrolprices merilis harga listrik negara-negara di dunia tahun 2023. Dari data yang tersedia, Vietnam merupakan negara kedua dengan biaya listrik termurah sebesar USD 0,73/kwh setelah Indonesia sebesar USD 0,072/kwh. Globalpetrolprices.com merilis harga listrik negara ASEAN tahun 2023 yang tercermin dalam grafik dibawah ini:

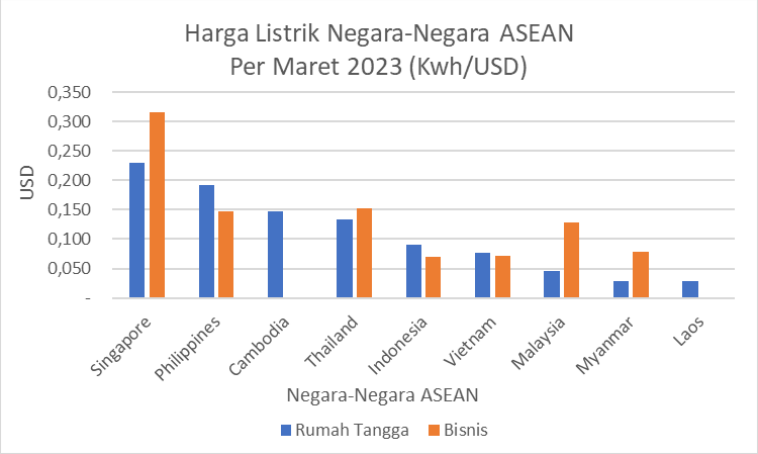

Grafik 4.26 Harga Listrik Negara-Negara ASEAN Per Maret 2023

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Sistem penentuan harga listrik di Vietnam termasuk untuk sektor industri dikendalikan oleh pemerintah dan perusahaan listrik negara/ Electricity of Vietnam (Nguyen, 2018). Pada tahun 2011, Perdana Menteri mengeluarkan Keputusan 24/2011/QD-TTg yang memungkinkan kebijakan tarif listrik berubah sesuai dengan mekanisme pasar yakni disesuaikan dengan perubahan faktor-faktor input dasar seperti harga bahan bakar dan nilai tukar mata uang asing, serta struktur output pembangkitan listrik. Namun tarif listrik yang ditetapkan seringkali bukan biaya rata-rata dan belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar, kebijakan listrik bertujuan untuk menjaga tarif tetap rendah untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi (MOIT, 2016).

d. Komitmen terhadap Energi Terbarukan

Pada era modern ini, komitmen suatu negara dalam memajukan energi terbarukan menjadi landasan bagi keberlanjutan bisnis dan menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, negara-negara semakin menyadari bahwa bergantung pada sumber energi fosil tidak hanya tidak berkelanjutan namun juga merugikan bagi lingkungan. Kebijakan negara dalam implementasi energi terbarukan menciptakan masa depan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Vietnam memiliki potensi yang signifikan dalam hal energi terbarukan antara lain Energi Surya Dimana Vietnam terletak di wilayah tropis dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun, yang memberikan potensi besar untuk pengembangan energi surya; Energi Biomassa sekitar 170 juta ton dengan kapasitas listrik sekitar 2000 MW yang berasal dari limbah produk pertanian/peternakan, limbah organik

perkotaan, dan limbah organik lainnya; Energi Angin berpotensi berkisar antara 1785MW hingga 8700MW; dan Energi Laut berupa pasang surut, arus laut, dan es terbakar di dasar laut (Nga Pham Thank, 2022).

Kebijakan energi terbarukan di Vietnam telah dikembangkan melalui serangkaian keputusan dan strategi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong penggunaan dan investasi dalam energi terbarukan. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Vietnam mengeluarkan Keputusan No. 2068/QD-TTG "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan - REDS" yang bertujuan untuk menghasilkan sumber energi untuk sistem listrik nasional dan menyediakan energi termal untuk kebutuhan pemanasan berdasarkan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga biomassa. Strategi ini menargetkan kapasitas energi terbarukan untuk menyumbang 32,3% dari total konsumsi energi primer pada tahun 2030, dan meningkat hingga 44% pada tahun 2050 (Nguyen VCN et al, 2021).

Untuk menarik investasi ke sektor energi terbarukan, Perdana Menteri mengeluarkan Keputusan No. 2068/QD-TTG tahun 2015 menetapkan tanggung jawab EVN (Perusahaan Listrik Vietnam) dalam pembelian listrik dan memberikan prioritas pada mobilisasi kapasitas dari sumber energi terbarukan. Produsen listrik dari sumber energi terbarukan diberikan prioritas untuk mengeksploitasi kapasitas penuh dan mengembangkan listrik sesuai dengan mode operasi pabrik, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan mereka dapat memobilisasi kapasitas maksimum dan menjual seluruh listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan (Nga Pham Thank, 2022).

Vietnam juga telah menerapkan kebijakan dan insentif untuk mendorong pengembangan energi surya, termasuk

mekanisme harga dukungan atau feed-in tariff (FIT) melalui Keputusan Perdana Menteri No. 11/2017/QD-TTG. Keputusan tersebut menetapkan insentif harga untuk energi surya, dimana harga pembelian listrik dari proyek energi surya ditetapkan lebih tinggi daripada harga pembelian listrik dari sumber energi konvensional (Nga Pham Thank, 2022). Pemerintah Vietnam juga mengeluarkan Keputusan No. 24/2014/QD-TTg pada April 2014 yang menetapkan tarif feed-in (FiT) untuk proyek listrik biomassa, yang kemudian diubah dan ditambahkan oleh Keputusan No. 08/2020/QD-TTg pada Maret 2020. Perubahan ini memperkenalkan peningkatan FiT yang cukup menarik bagi investor untuk proyek pembangkit listrik biomassa di negara tersebut.

Vietnam negara urutan kedua dari 10 negara berkembang berdasarkan investasi internasional dalam energi terbarukan periode 2015 sampai dengan 2022. Vietnam memiliki projek investasi dalam energi terbarukan periode 2015 sampai dengan 2022 sebesar USD106,9 miliar atau sebesar 31% dari total nilai proyek. UNCTAD merilis 10 negara berkembang berdasarkan investasi internasional dalam energi terbarukan periode 2015 sampai dengan 2022:

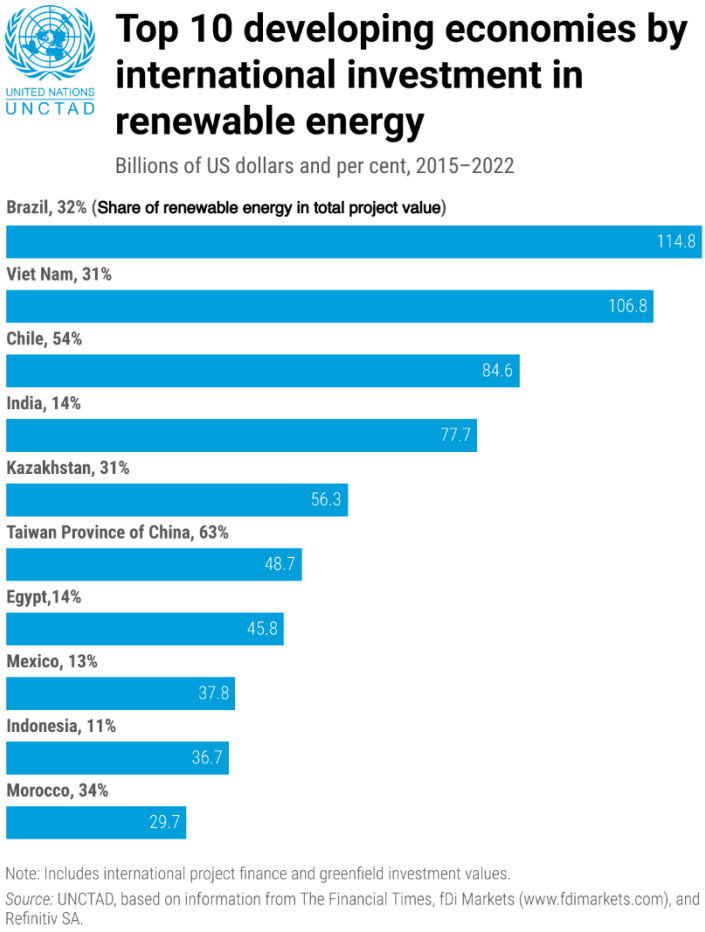

Grafik 4.27 Top 10 Developing Economies by International Investment in Renewable Energy

Sumber: UNCTAD (2023)

e. Kecepatan Internet

Era modern saat ini, kecepatan internet memiliki kontribusi terhadap dunia bisnis. Negara-negara yang mampu menyediakan infrastruktur internet yang canggih akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik investasi, memfasilitasi pertumbuhan bisnis, serta mendorong inovasi dan kolaborasi di pasar global. Ookla merupakan perusahaan yang mengevaluasi Speedtest Global Index 2023. Speedtest Global Index memberikan informasi tentang kecepatan internet termasuk kecepatan internet tetap dan seluler negara-

negara di seluruh dunia. Indeks ini memeringkat negara-negara berdasarkan median kecepatan unduh untuk fixed broadband dan internet seluler. Tabel dibawah ini menunjukkan The Speedtest Global Index 2023 di wilayah ASEAN:

Tabel 4.11 The Speedtest Global Index 2023

Mobile			Fixed Broadband		
No Urut Dunia	**Country**	**Mbps**	**No Urut Dunia**	**Country**	**Mbps**
12	Brunei	102.82	2	Singapore	259.11
23	Singapore	85.69	5	Thailand	219.10
41	Malaysia	61.50	41	Malaysia	100.57
58	Vietnam	44.13	46	Vietnam	94.45
61	Thailand	40.67	55	Brunei	83.13
84	Laos	27.10	56	Philippines	83.09
86	Philippines	26.36	116	Laos	32.40
92	Cambodia	25.08	125	Indonesia	27.65
98	Indonesia	23.98	128	Cambodia	23.38
99	Myanmar (Burma)	23.86	137	Myanmar (Burma)	19.62

Sumber: Ookla (2023)

4.3.6.10 Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Suatu negara yang mampu mempertahankan stabilitas ekonomi cenderung lebih menarik bagi investor asing karena memberikan keyakinan, prediktabilitas, dan peluang pertumbuhan yang lebih baik dalam jangka panjang. Stabilitas ekonomi di Vietnam menurut informan A1 menyatakan *pertumbuhan GDP Vietnam tahun 2017 sebesar 6,94% naik pada tahun 2018 sebesar 7,46% dan 7,36 pada tahun 2019*.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam selama 2012-2021 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2012 hingga 2019 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai puncak tertinggi pada tahun 2019 sebesar 7,36% meskipun pada tahun 2018 telah terjadi perang dagang AS-China. Pandemi COVID-19 tahun 2020 memukul Vietnam dan dunia yang

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 2,87%. Meskipun rendah, angka ini tetap dianggap prestasi karena Vietnam berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah resesi global. Grafik dibawah ini menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi Vietnam periode 2012 hingga 2021:

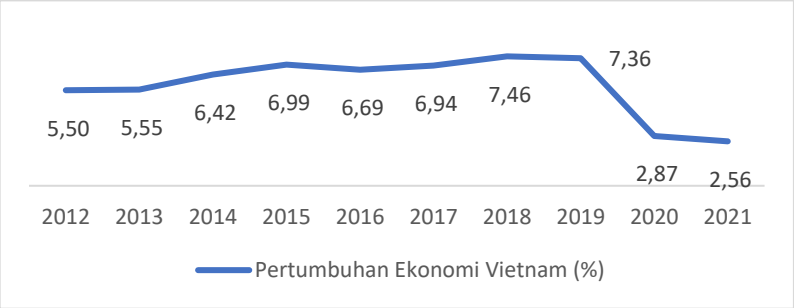

Grafik 4.28 Pertumbuhan Ekonomi Vietnam 2012-2021

Sumber: Worldbank (2023)

Sedangkan Informan C1 melihat stabilitas ekonomi dari perspektif GDP dan GDP per capita "*GDP Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD329miliar menjadi USD428miliar pada tahun 2023. GDP per capita Vietnam meningkat dimana tahun 2019 sebesar USD3.415 menjadi USD4.276*". Worldbank menunjukkan bahwa GDP Vietnam tampil mengesankan dengan semakin meningkat setiap tahun. GDP Vietnam pada tahun 2022 sebesar USD408.802.379.068 meningkat 110% dari tahun 2012 yang hanya sebesar USD195.590.647.205. Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang menunjukkan pertumbuhan GDP Vietnam dalam periode 1985 sampai dengan 2022:

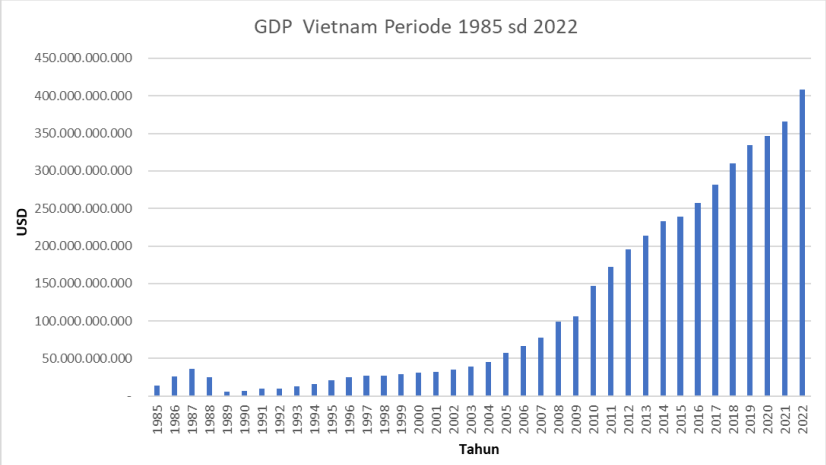

Grafik 4.29 GDP Vietnam Periode 1985 s.d 2022

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Worldbank menunjukkan bahwa GDP per capita Vietnam semakin meningkat setiap tahun. GDP Vietnam pada tahun 2022 sebesar USD4.163,50 meningkat 113% dari tahun 2011 yang hanya sebesar USD1.953,60. Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang menunjukkan pertumbuhan GDP Vietnam dalam periode 2011 sampai dengan 2022:

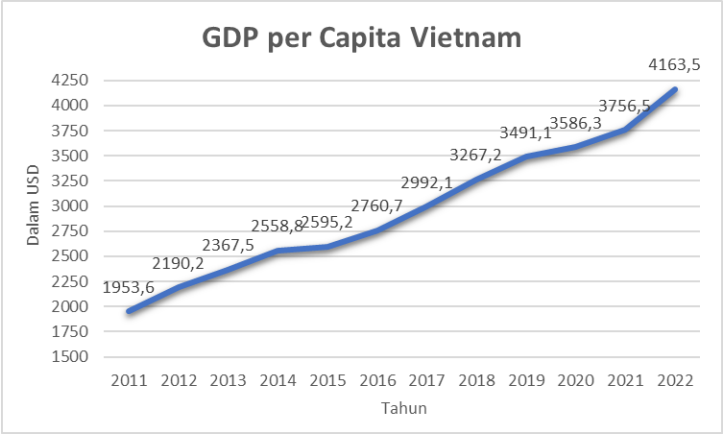

Grafik 4.30 GDP per Capita Vietnam

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Peningkatan ekonomi yang konsisten ini menunjukkan bahwa Vietnam telah berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi yang menguntungkan, menarik minat investor asing, dan memberikan peluang pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Dengan pertumbuhan yang

terus meningkat, Vietnam tetap menjadi salah satu negara yang menarik bagi investasi asing.

4.3.7 Ekspor-Impor

Vietnam, sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara, memiliki hubungan yang signifikan dalam hal perdagangan dengan Amerika Serikat dan Republik Cina. Perdagangan Vietnam dengan kedua negara ini telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Pertumbuhan ekspor Vietnam semakin meningkat setiap tahun selaras dengan pertumbuhan GDP. Worldbank mencatat bahwa Ekspor Vietnam dibandingkan dengan GDP pada tahun 2012 hanya sebesar 58% meningkat hingga menjadi 89% pada tahun 2022. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank dan Worldbank yang menggambarkan perbandingan antara ekspor dibandingkan dengan GDP:

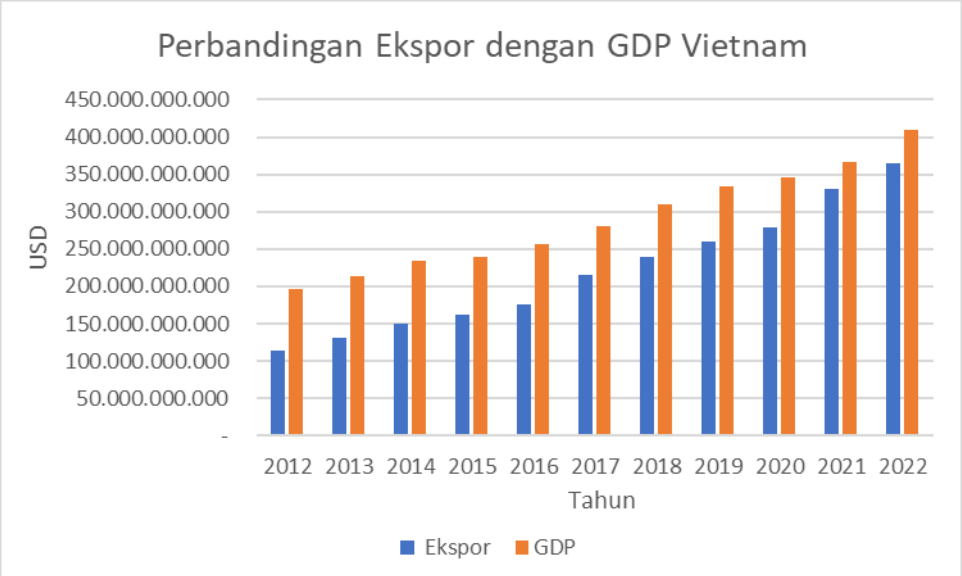

Grafik 4.31 Perbandingan Ekspor dengan GDP Vietnam

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Grafik diatas menunjukkan korelasi positif antara pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP. Ekspor yang meningkat dapat memberikan

kontribusi terhadap pendapatan nasional dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

4.3.7.1 Ekspor

Nilai ekspor Vietnam ke Amerika Serikat semakin meningkat setiap tahun. Informan C1 menyampaikan *nilai ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat sangat signifikan dimana tahun 2013 hanya sebesar USD 25.904.256.00- menjadi USD135.876.564.000 pada tahun 2022.* WITS Worldbank menunjukkan nilai ekspor Vietnam meningkat mencapai 456% dalam kurun watu 10 tahun dimana nilai ekspor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar USD19.680.920.000 naik hingga USD109.447.352.000 pada tahun 2022. Kenaikan ekspor Vietnam ke AS terlihat dalam Grafik 4.32.

Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekspor Vietnam ke AS menurut informan A1 dan C1 mengalami *kenaikan yang signifikan*. Pengaruh perang dagang AS-Cina mulai dirasakan pada tahun 2019 dimana nilai ekspor Vietnam ke Amerika Serikat mengalami kenaikan sebesar 29% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata dibawah 20%. Bahkan jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2022, nilai ekspor Vietnam ke AS naik sebesar 130% dimana tahun 2018 hanya sebesar USD47.579.533.000 menjadi USD109.447.352.000 pada tahun 2022. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat periode 2012 sampai dengan 2022:

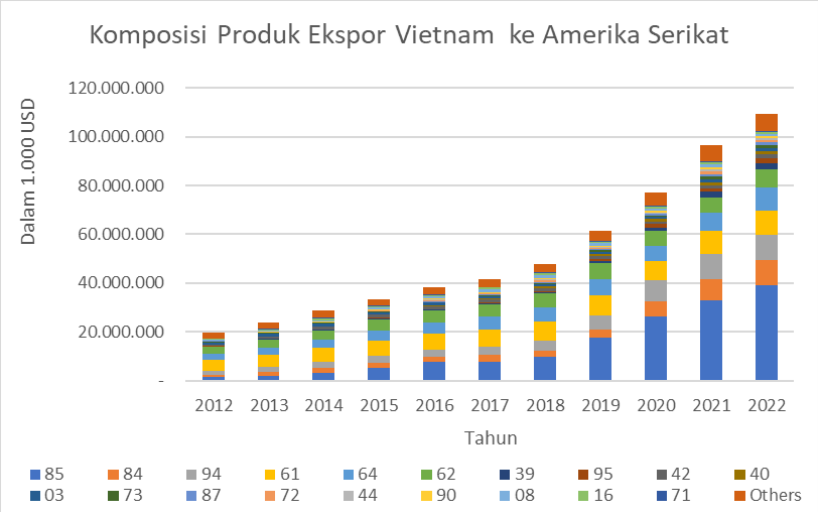

Grafik 4.32 Komposisi Produk Ekspor Vietnam ke Amerika Serikat

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat dalam klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) merupakan produk ekspor andalan Vietnam dengan nilai ekspor pada tahun 2022 sebesar USD38.969.767.000 atau 35,6% dari total nilai ekspor sebesar USD109.447.352.000. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk ekspor andalan Vietnam yaitu HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar USD10.649.621.000 dan HS Code 94 (Mebel; alas tidur, matras, penyangga matras, bantal-bantal dan boneka perabot semacam itu; lampu dan perlengkapan penerangan) USD10.037.877.000. Kedua jenis produk eskpor Vietnam ke Amerika Serikat terbesar tersebut juga sama seperti yang disampaikan informan A1 dan C1.

Nilai ekspor Vietnam ke Cina juga semakin meningkat setiap tahun. Informan C1 menyampaikan *nilai ekspor Vietnam ke Cina meningkat dimana tahun 2013 sebesar USD16.891.893.000 menjadi USD87.960.626.000 pada tahun 2022*". WITS Worldbank menunjukkan nilai ekspor Vietnam meningkat mencapai 359% dalam kurun watu 10 tahun dimana nilai ekspor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar

USD12.546.017.000 naik hingga USD57.587.972.000 pada tahun 2022. Kenaikan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat dapat terlihat dalam Grafik 4.33.

Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap ekspor Vietnam ke AS dan Cina menurut informan A1 dan C1 *mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar eskpor ke AS*. Pada tahun 2017 sebelumnya adanya perang dagang AS-Cina, ekspor Vietnam ke Cina mengalami kenaikan signifikan sebesar 61%. Untuk tahun selanjutnya, nilai ekspor Vietnam ke Cina masih cenderung naik. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan ekspor Vietnam ke Cina periode 2012 sampai dengan 2022:

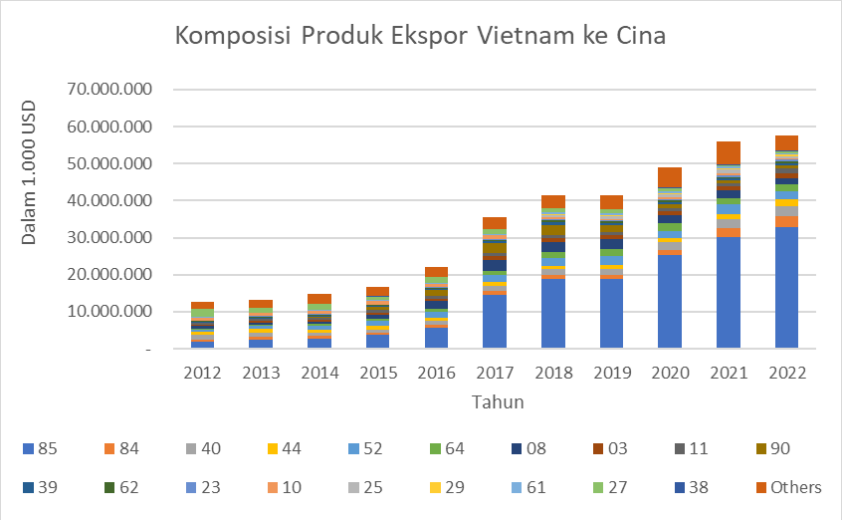

Grafik 4.33 Komposisi Produk Ekspor Vietnam ke Cina

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan ekspor Vietnam ke Cina dalam klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) merupakan produk ekspor andalan AS dengan nilai ekspor pada tahun 2022 sebesar USD38.696.733.000,- atau 56,78% dari USD57.587.972.000,-. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk ekspor andalan Vietnam yaitu HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar USD3.181.103.000,- dan HS Code 40 (karet)

USD2.478.560.000,-. Kedua jenis produk eskpor Vietnam ke Cina terbesar juga sama seperti yang disampaikan informan A1 dan C1.

4.3.7.2 Impor

Nilai impor Vietnam dari Amerika Serikat semakin meningkat setiap tahun. WITS Worldbank menunjukkan nilai impor Vietnam meningkat mencapai 200% dalam kurun watu 10 tahun dimana nilai impor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar USD4.835.434.000 naik hingga USD14.472.023.000 pada tahun 2022. Kenaikan impor Vietnam dari Amerika Serikat dapat terlihat dalam Grafik 4.34.

Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap impor Vietnam dari AS menurut informan A1 dan C1 mengalami *kenaikan*. Impor Vietnam dari Amerika Serikat pada tahun 2018 langsung mengalami kenaikan dimana nilai impor sebesar USD12.753.754.000 atau naik sebesar 37% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan tahun selanjutnya mengalami fluktuasi. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan impor Vietnam dari Amerika Serikat periode 2012 sampai dengan 2022:

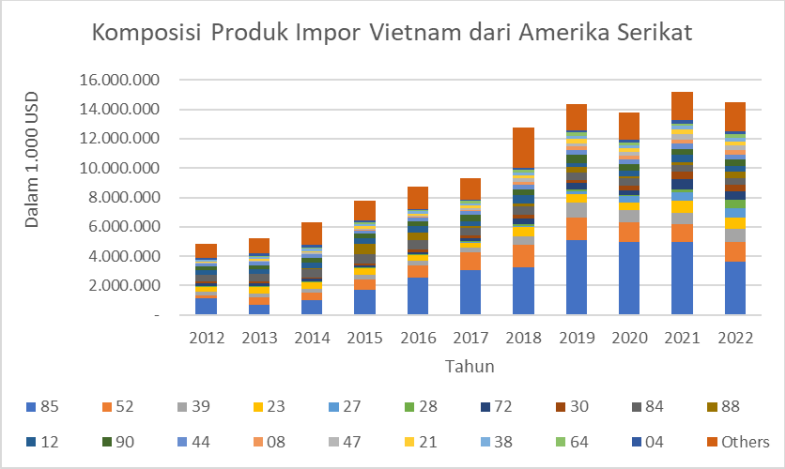

Grafik 4.34 Komposisi Produk Impor Vietnam dari Amerika Serikat

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan komposisi produk impor Vietnam dari Amerika Serikat berdasarkan klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) merupakan produk

impor terbesar dengan nilai impor pada tahun 2022 sebesar USD3.648.076.000 atau 25,2% dari total nilai impor sebesar USD14.472.023.000. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk impor Vietnam yaitu HS Code 52 (kapas) dengan nilai impor tahun 2022 sebesar USD1.312.355.000 dan HS Code 39 (plastik) USD 879.177.000. Jenis produk impor Vietnam dari Amerika Serikat terbesar yaitu HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) sama seperti yang disampaikan informan A1 dan C1.

Nilai impor Vietnam dari Cina semakin meningkat setiap tahun. Data WITS Worldbank menunjukkan nilai impor Vietnam meningkat mencapai 308% dalam kurun watu 10 tahun dimana nilai impor Vietnam tahun 2012 hanya sebesar USD28.776.499.000 naik hingga USD117.633.380.000 pada tahun 2022. Kenaikan impor Vietnam dari Cina dapat terlihat dalam Grafik 4.35.

Pengaruh perang dagang AS-Cina terhadap impor Vietnam dari Cina menurut informan A1 dan C1 mengalami *kenaikan*. Impor Vietnam dari Cina naik signifikan pada tahun 2021 dimana nilai impor sebesar USD109.831.106.000 atau naik sebesar 30% dari nilai impor tahun 2020 sebesar USD84.181.073.000. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang menunjukkan impor Vietnam dari Cina periode 2012-2022:

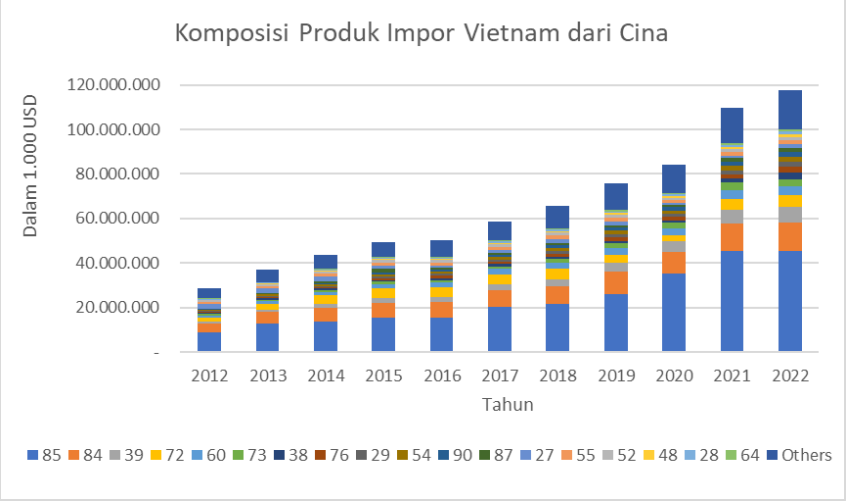

Grafik 4.35 Komposisi Produk Impor Vietnam dari Cina

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram diatas menunjukkan komposisi produk impor Vietnam dari Cina berdasarkan klasifikasi jenis produk, maka produk dengan HS Code 85 (mesin dan perlatan listrik serta bagiannya) merupakan produk impor terbesar dengan nilai impor pada tahun 2022 sebesar USD45.350.893.000 atau 38,6% dari USD117.633.380.000. Kemudian posisi kedua dan ketiga produk impor Vietnam yaitu HS Code 84 (Reaktor nuklir, ketel uap, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya) dengan nilai impor tahun 2022 sebesar USD12.914.541.000 dan HS Code 39 (plastik) USD 7.016.500.000. Kedua jenis produk impor Vietnam dari Amerika Serikat terbesar sama seperti yang disampaikan informan A1 dan C1.

4.3.7.3 Kebijakan

Kebijakan perdagangan dan perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekspor dan impor suatu negara. Dengan kebijakan dan perjanjian perdagangan yang inklusif serta memberikan akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri, negara dapat meningkatkan daya saing produk-produknya di pasar global, memperluas pangsa pasar, meningkatkan volume perdagangan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekspor-impor yang sehat dan berkelanjutan.

Kebijakan dan perjanjian perdagangan Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*Vietnam tidak memberikan karpet merah kepada Cina. Semenjak perang dagang AS-Cina, banyak perusahaan Cina pindah lokasi, salah satu negara tujuan adalah Vietnam. Vietnam telah menandatangani berbagai kerjasama perjanjian perdagangan bebas baik secara bilateral, regional maupun multilateral demi meningkatkan potensi pasar*". Hal selaras juga diungkapkan informan C1 yang menyatakan "*FDI, ekspor dan perjanjian perdagangan Vietnam memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Vietnam memiliki banyak perjanjian perdagangan yang membuka pasar secara lebih luas untuk menjual produk yang dihasilkan*".

Vietnam telah menjadi salah satu mitra perdagangan utama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. AS dan Vietnam memiliki perjanjian perdagangan yang disebut dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam - Amerika Serikat (US-Vietnam Bilateral Trade Agreement/ BTA) yang berlaku pada tanggal 10 Desember 2001. BTA mencakup ketentuan mengenai perdagangan barang, perlindungan hak kekayaan intelektual, perdagangan jasa, perlindungan investasi, fasilitasi usaha, dan transparansi. Vietnam dan Cina memiliki hubungan perdagangan yang erat. Vietnam dan Cina tergabung dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang dimulai pada tahun 2010. Tujuan utama ACFTA adalah mendorong perdagangan barang dan layanan antara ASEAN dan Cina, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih bebas, serta meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan.

Vietnam National Trade Repository menampilkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani Pemerintah Vietnam dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12 Daftar Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam

Free Trade Agreement		Tanggal Efektif	Negara yang Berpartisipasi	Keterangan
ACFTA	Asean - Cina Free Trade Area	1 Januari 2005	Asean - Cina	
BTA	Bilateral Agreement US – Vietnam	10 Desember 2001	Amerika Serikat - Vietnam	
ACFTA	ASEAN – Cina Free Trade Area	Juli 2005	ASEAN - Cina	
AKFTA	Asean – South Korea Free Trade Area	1 Juni 2007	Asean – Korea Selatan	
AJCEP	Asean - Jepang Comprehensive Economic Partnership	1 Januari 2008	Asean - Jepang	

Free Trade Agreement		Tanggal Efektif	Negara yang Berpartisipasi	Keterangan
VJEPA	Vietnam – Japan Economic Partneship Agreement	1 Oktober 2009	Vietnam - Jepang	
AANZFTA	Asean - Australia - New Zealand Free Trade Area	1 Januari 2010	Asean - Australia - New Zealand	
AIFTA	Asean - India Free Trade Area	1 Januari 2010	Asean - India	
ATIGA	Asean Trade in Goods Agreement	5 Mei 2010	Negara-negara ASEAN	Sebelumnya AFTA
VCFTA	Cili - Vietnam Free Trade Area	1 Januari 2014	Cili - Vietnam	
VKFTA	Vietnam – Korea Free Trade Agreement	20 Desember 2015	Vietnam - Korea Selatan	
VN-EAEU FTA	Vietnam – Eurasian Economic Union Freaa Trade Agreement	5 Oktober 2015	Vietnam – Belarusia – Kazakstan – Rusia – Armenia - Kyrgyzstan	
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership	14 Januari 2019	Australia - Kanada - Jepang - Meksiko - Selandia Baru - Singapura - Brunei Darussalam - Cili - Malaysia - Vietnam - Peru	Perjanjian ini pengganti TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) yang dibatalkan AS tahun 2017 16/9 2021 Cina mengajukan proposal untuk bergabung dengan CPTPP
AHKFTA	Asean - Hongkong Cina Free Trade Area	11 Juni 2019	Asean - Hongkong Cina	Seiring dengan AHKIA (perjanjian investasi)

Free Trade Agreement		Tanggal Efektif	Negara yang Berpartisipasi	Keterangan
EVFTA	Unieropa - Vietnam Free Trade Area	1 Agustus 2020	Unieropa - Vietnam	
UKVFTA	United Kingdom - Vietnam Free Trade Area	1 Mei 2021	United Kingdom - Vietnam	
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Januari 2022	Asean - Cina - Korea - Jepang - India - Australia - Selandia Baru	
VIFTA	Vietnam - Israel Free Trade Agreement	Dittd tgl 25 Juli 2023	Vietnam - Israel	

Sumber: Vietnam National Trade Repository (2023)

Partisipasi Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang strategis akan memberikan manfaat yaitu meningkatkan daya saing produk-produknya di pasar global; menarik investasi asing; meningkatkan ekspor; memperluas peluang akses pasar bagi produk-produknya; kesempatan untuk menggali potensi ekonomi yang lebih besar; memperkokoh posisi Vietnam dalam jejaring perdagangan internasional dan akhirnya menjadi landasan kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4.3.8 Strategi

Vietnam butuh merancang strategi diperlukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan *foreign direct investment* dan surplus exim. Strategi tersebut akan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal baik berupa dinamika politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi strategi tentu membutuhkan kerjasama lintas sektor, perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan evaluasi berkala terhadap kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

4.3.8.1 Kebijakan

Pengembangan strategi kebijakan yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi suatu negara. Pentingnya investasi langsung asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi faktor pendorong untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan FDI. Kebijakan yang tepat dapat memperluas lapangan kerja, mendorong inovasi, mentransfer teknologi, dan memperkuat sektor-sektor kunci dalam perekonomian. Strategi kebijakan Vietnam dalam meningkatkan *foreign direct investment* menurut informan A1 menyatakan "*pemerintah Vietnam menetapkan kebijakan investasi yang beradaptasi dan mempersiapkan dengan perubahan jaman*". Informan C1 mengemukakan strategi dari perspektif perjanjian perdagangan "*ikut serta dalam perjanjian perdagangan yang strategis dan mempengaruhi perluasan ekspor produk Vietnam. Melakukan mengevaluasi kemudahan berbisnis di Vietnam secara periodik untuk memperbaiki segala hambatan dan kekurangan".* Sedangkan informan D1 mengemukakan strategi dari perspektif insentif pajak dan diversifikasi sumber FDI "*memberikan insentif fiskal dan pajak kepada perusahaan asing yang berinvestasi dalam sektor-sektor strategis dapat memotivasi FDI berupa pembebasan pajak atau pemotongan tarif pajak untuk periode tertentu. Vietnam sebaiknya mencari diversifikasi sumber FDI dengan menarik investasi dari berbagai negara dan sektor industri sehingga membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada investasi dari satu atau beberapa negara tertentu*".

Berbagai perspektif yang diungkapkan oleh para informan, terlihat bahwa strategi kebijakan Vietnam dalam meningkatkan FDI melibatkan adaptasi terhadap perubahan, partisipasi aktif dalam perjanjian perdagangan, pemberian insentif pajak, dan diversifikasi sumber FDI. Dengan implementasi yang tepat, strategi-strategi ini diharapkan dapat mengokohkan posisi Vietnam dalam kancah investasi global serta memperkuat perekonomiannya secara berkelanjutan.

Meningkatkan ekspor suatu negara adalah salah satu aspek kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekspor bukan hanya tentang mengirimkan produk ke pasar internasional, tetapi juga tentang memperluas pangsa pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan posisi yang kuat dalam kancah perdagangan global. Strategi kebijakan yang terarah dan tepat dalam mendukung peningkatan ekspor merupakan faktor penting dalam memperkuat posisi suatu negara dalam perekonomian dunia. Strategi Vietnam dalam meningkatkan surplus ekspor-Impor menurut informan A1 menyatakan

> *Vietnam menghasilkan produk sesuai perubahan jaman berupa barang produksi yang ramah lingkungan. Misalnya ketika investor Eropa sedang mempertimbangkan akan berinvestasi di suatu negara dengan pertimbangan sumber energinya menggunakan energi terbarukan atau energi fossil sehingga Vietnam lebih kompetitif dan memiliki daya saing yang lebih tinggi*.

Strategi Vietnam dalam meningkatkan surplus ekspor-Impor menurut informan B1 menyatakan "*memposisikan Vietnam sebagai pemain penting dalam industri manufaktur global, menarik perusahaan-perusahaan untuk berproduksi di Vietnam dan mengekspor ke mitra dagangnya. Berpartisipasi aktif dalam kerangka kerja sama ekonomi dan terus mengeluarkan peraturan untuk menginternalisasikan komitmen internasionalnya. Vietnam memiliki lebih dari 90 perjanjian perdagangan bilateral dan hampir 60 perjanjian promosi dan perlindungan investasi bilateral, yang berkontribusi terhadap daya tariknya sebagai perekonomian ekspor. sehingga secara keseluruhan, strategi masa depan vietnam dalam menghadapi perang perdagangan AS-Tiongkok adalah dengan memanfaatkan kebijakan perdagangan internasional yang ada, menarik penanaman modal asing, dan secara aktif berpartisipasi dalam kerangka kerja sama ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing ekonomi"*.

Strategi Vietnam dalam meningkatkan surplus ekspor-Impor menurut informan C1 menyatakan *"menetapkan standar barang produksi Vietnam yang tinggi; meningkatkan perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan tetap berusaha menjadi negara yang menarik bagi investor demi meningkatkan nilai ekspor".*

Secara keseluruhan, strategi masa depan Vietnam dalam menghadapi perang perdagangan AS-Tiongkok mencakup pemanfaatan kebijakan perdagangan yang ada, penarikan investasi asing, dan partisipasi aktif dalam kerangka kerja sama ekonomi, semuanya bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing ekonomi Vietnam di panggung global. Dengan strategi yang terfokus dan terukur, Vietnam bertujuan untuk memperkuat posisi ekonominya dalam perdagangan internasional.

4.3.8.2 Infrastruktur

Infrastruktur yang kokoh dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang efisien tidak hanya memfasilitasi konektivitas antarwilayah di dalam negeri, tetapi juga berperan melancarkan kegitkan kegiatan ekspor yang lebih efisien, memungkinkan distribusi barang yang lebih lancar ke pasar internasional. Strategi Vietnam dalam meningkatkan infrastruktur menurut informan A1 menyatakan "*melakukan investasi skala besar untuk membangun infrastruktur berupa pengembangan tol dari utara ke selatan dan modernisasi kereta api. Vietnam memperkuat hubungan maritimnya dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks Jalur Sutra Maritim (MSR) dan inisiatif Belt and Road (BRI) yang diusulkan oleh China*". Informan D4 mengungkapkan strategi yang serupa "*investasi dalam infrastruktur berupa pelabuhan, jalan raya, dan sistem transportasi sehingga akan meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang guna menarik FDI dan meningkatkan efisiensi produksi*".

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi infrastruktur berupa merencanakan pembangunan infrastruktur secara sinkronisasi modern dan strategis; menerapkan mekanisme dan kebijakan menguntungkan bagi sektor perekonomian, termasuk sektor penanaman modal asing di bidang infrastruktur; dan mengeluarkan daftar proyek prioritas dalam infrastruktur untuk menarik investor.

Investasi dalam infrastruktur merupakan langkah yang krusial bagi Vietnam dalam menarik investasi asing, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat daya saingnya di pasar ekspor global. Dengan terus memprioritaskan dan mengimplementasikan strategi infrastruktur yang tepat, Vietnam dapat terus membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

4.3.8.3 Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya sebagai bagian integral dari upaya mereka untuk meningkatkan daya tarik bagi investasi asing dan memperluas basis ekspor. Strategi memenuhi bahan baku bagi industri di Vietnam menurut informan A1 menyatakan "*pemerintah Vietnam mendorong perusahaan menggandeng UMKM untuk supply sparepart*". Hal serupa juga disampaikan informan D1 yang menyatakan "*mendorong pengembangan industri bahan baku di dalam negeri dibutuhkan oleh industri manufaktur sehingga mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan ekonomi*".

Vietnam diharapkan mendorong pengelolaan sumber daya yang efektif dan mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Dengan menggandeng UMKM dalam penyediaan bahan baku serta dengan fokus pada pengembangan industri bahan baku dalam negeri, Vietnam berupaya menciptakan fondasi ekonomi yang tangguh,

mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika pasar global.

Strategi Vietnam meningkatkan kualitas SDM menurut informan A1 menyatakan "*melakukan reformasi pendidikan kejuruan untuk memastikan bahwa kurikulumnya relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan dan bisnis untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja*". Informan D1 juga menyampaikan strategi yang serupa "*menciptakan pendidikan yang berkualitas dan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Melakukan kolaborasi dengan investor dalam program-program pelatihan*".

Vietnam diharapkan berupaya dalam meningkatkan kualitas SDM dengan memastikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri menjadi kunci dalam memastikan adanya keterhubungan yang kuat dan kontinyu antara pendidikan dan dunia kerja. Dengan upaya ini, Vietnam berharap untuk menciptakan tenaga kerja yang siap terampil dan siap pakai bagi industri, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara di tingkat global.

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi peningkatan kapasitas internal dan keunggulan kompetitif berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja dan faktor produksi berupa membentuk Komite Produktivitas Nasional, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi pendidikan dan platihan dan memperkuat Kerjasama internasional di bidang pelatihan; pengembangan bisnis dengan produk yang memiliki keunggulan kompetitif; melakukan penelitian untuk membangun pusat keuangan daerah; meningkatkan kapasitas perusahaan dalam negeri berupa mengembangkan bisnis yang terintegrasi internasional,

mempromosikan prerusahaan dalam negeri, membangin database perusahaan dalam negeri guna sumber informasi bagi investor asing; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa memperbaiki institusi ketenagakerjaan sesuai praktik internasional, memperkuat pelatihan professional, mendorong pelatihan online, mendorong perusahaan penanaman modal asing memingkatkan kualitas pekerja lokal, menggunakan talenta pekerja yang telah bekerja atau pelatihan di luar negei, mendorong pendidikan kejuruan global, membangun sistem informasi pasar tenaga kerja.

4.3.8.4 Politik dan Birokrasi

Kebijakan politik yang stabil, peraturan yang jelas, serta dukungan birokrasi yang efisien merupakan faktor penting dalam menarik investor asing dan mengembangkan ekspor. Selain itu, kemampuan birokrasi dalam menyediakan fasilitasi, regulasi yang efisien, serta meminimalisir hambatan administratif juga sangat memengaruhi daya tarik suatu negara bagi investor asing.

Strategi Vietnam dalam menjaga integritas menurut informan A1 menyatakan "*melakukan reformasi gaji untuk memastikan pejabat publik bertindak sesuai ketentuan*" selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah*". Strategi Vietnam dalam memberantas korupsi menurut informan A1 menyatakan "*penerapan hukum yang ketat serta memberikan hukuman sesuai dengan tindak kejahatannya"* selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*melakukan penyitaan dan pengembalian harta yang diperoleh dari kejahatan korupsi sehingga memberikan efek jera kepada pelaku*".

Vietnam diharapkan melakukan reformasi gaji, kesejahteraan pegawai pemerintah, penegakan hukum yang ketat, dan tindakan tegas terhadap harta yang diperoleh dari korupsi sehingga membangun fondasi yang kokoh dalam menjaga integritas di tingkat publik. Hal tersebut akan menunjukkan keseriusan dalam upaya memerangi korupsi dan mengambil

langkah-langkah konkret untuk mencegah serta menindak pelanggaran etika dan integritas di sektor pemerintahan.

Strategi Vietnam dalam mempermudah birokrasi menurut informan A1 menyatakan "*mengoptimalkan digitalisasi segala prosedur secara online*" selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*proses perizinan dan administratif yang efektif dan efisien untuk mengurangi biaya waktu dan tenaga, dan meningkatkan kepercayaan investor*".

Kombinasi antara digitalisasi prosedur dan peningkatan efektivitas serta efisiensi administratif merupakan langkah strategis bagi Vietnam untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor. Melalui upaya mempermudah birokrasi ini, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dengan memperbaiki proses perizinan yang lebih cepat, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi di negara tersebut.

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi untuk memperkuat institusi berupa memperkuat partisipasi kementerian, cabang, dan daerah yang proaktif, kuat, seragam, dan substantif; meningkatkan prediktabilitas dan transparansi dalam pengembangan dokumen hukum; menerapkan prosedur investasi bisnis fleksibel pasca pemeriksaan; mengontrol ketat pemberlakuan persyaratan investasi bisnis; penyempurnaan peraturan hukum perselisihan penanaman modal; menciptakan koridor hukum bagi pengembangan dan pengelolaan bentuk serta metode investasi baru sesuai dengan praktik internasional; mengontrol ketat perilaku ramah terhadap investor asing dalam proyek besar dan sektor strategis dengan perhatian khusus pada risiko dampak negatif terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum; mempercepat implementasi dan pengembangan e-Government; dan mengevaluasi solusi kelembagaan unggul yang telah diujicobakan atau diterapkan.

4.3.8.5 Industri Pendukung

Industri pendukung memegang peran dalam menopang daya saing suatu negara di pasar global. Sektor keuangan dan asuransi merupakan salah satu tulang punggung ekonomi suatu negara. Peran sektor keuangan yang sehat tidak hanya memberikan layanan perbankan yang andal, tetapi juga mendukung infrastruktur keuangan yang memadai untuk mengelola investasi dalam industri-industri lain. Sementara itu, sektor asuransi memberikan perlindungan finansial bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, membantu mereka menghadapi risiko yang terkait dengan ekspor dan impor.

Strategi Vietnam untuk memperkuat sektor keuangan menurut informan A1 menyatakan "*Vietnam memiliki berbagai jenis bank yaitu bank militer, bank pertanian dll. Memperkuat tata kelola perbankan dan memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa bank-bank mengikuti standar uang ditetapkan. Potensi merger dan akuisisi di sektor perbankan Vietnam semakin meningkat karena bank-bank domestik mencari modal asing untuk mengatasi tantangan berupa meningkatnya kredit bermasalah; batas pertumbuhan kredit; memitigasi paparan sektor perbankan terhadap obligasi real estat di pasar obligasi Vietnam yang masih baru*".

Perkuatan sektor keuangan adalah salah elemen penting dalam menarik investasi asing dan mendukung aktivitas ekspor. Dengan pengaturan yang tepat dan pemantauan yang efektif, sektor keuangan yang kuat dapat memberikan jaminan bagi investor dan bisnis untuk beroperasi di lingkungan yang stabil dan andal. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat membantu Vietnam memperkuat posisinya di pasar global, memperluas akses ke pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi Vietnam untuk memperkuat sektor ekspedisi menurut informan A1 menyatakan "*meningkatkan investasi dalam dalam infrastruktur maritim berupa perluasan pelabuhan; peningkatan kapasitas; dan sistem informasi yang canggih. Vietnam memperkuat hubungan*

maritimnya dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks Jalur Sutra Maritim (MSR) dan inisiatif Belt and Road (BRI) yang diusulkan oleh China". Hal tersebut selaras dengan informan D1 yang menyatakan "*meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan memperkuat konektivitas dengan pelabuhan negara lainnya*".

Peningkatan infrastruktur pelabuhan yang diusulkan oleh para informan bertujuan untuk memperkuat konektivitas dengan pelabuhan negara lainnya, yang akan menguntungkan dalam menggalang kerjasama dan perdagangan internasional. Upaya meningkatkan sektor ekspedisi ini sangat penting dalam memfasilitasi aktivitas perdagangan dan logistik yang lebih lancar, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Dengan infrastruktur yang kokoh dan terintegrasi, Vietnam dapat memperluas konektivitasnya dengan pasar global, meningkatkan daya saingnya di kancah perdagangan internasional, dan menciptakan peluang lebih besar untuk menarik investasi asing.

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi untuk pengembangan industri pendukung dan terkait berupa mengembangkan industri pendukung guna menghindari investasi yang stagnan, menyebar dan tidak efektif; mengembangkan mekanisme insentif investasi untuk meningkatkan hubungan antara investasi asing dan investasi dalam negeri; peningkatan hukum untuk teknologi tinggi.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Analisis Hasil Wawancara dengan Aplikasi Nvivo

Penelitian ini menggunakan aplikasi NVivo sebagai tools untuk menganalisis data hasil wawancara beberapa narasumber. NVivo merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti maupun profesional diberbagai bidang untuk mengelola, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Nvivo dikembangkan oleh QSR International

dimana NVivo dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap data kualitatif. Perangkat lunak ini menawarkan berbagai fitur, termasuk kemampuan untuk melakukan pencarian teks yang canggih, mengidentifikasi pola dan tema, serta melakukan klasifikasi dan pengindeksan data dengan mudah.

Tahap awal peneliti melakukan *cluster analysis* untuk melihat *word similarity* dengan hasil berupa *Pearseon Correlation Coefficient.* Word similarity merupakan sebuah fitur NVivo yang memungkinkan peneliti menemukan kata-kata yang memiliki makna atau konteks yang serupa dalam dokumen atau kumpulan data yang sedang diteliti sehingga dapat mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang lebih dalam di antara kata-kata yang mungkin berbeda secara langsung namun terkait secara makna. Dibawah ini gambar yang menunjukkan *items clustered by word similarity* sebagai berikut:

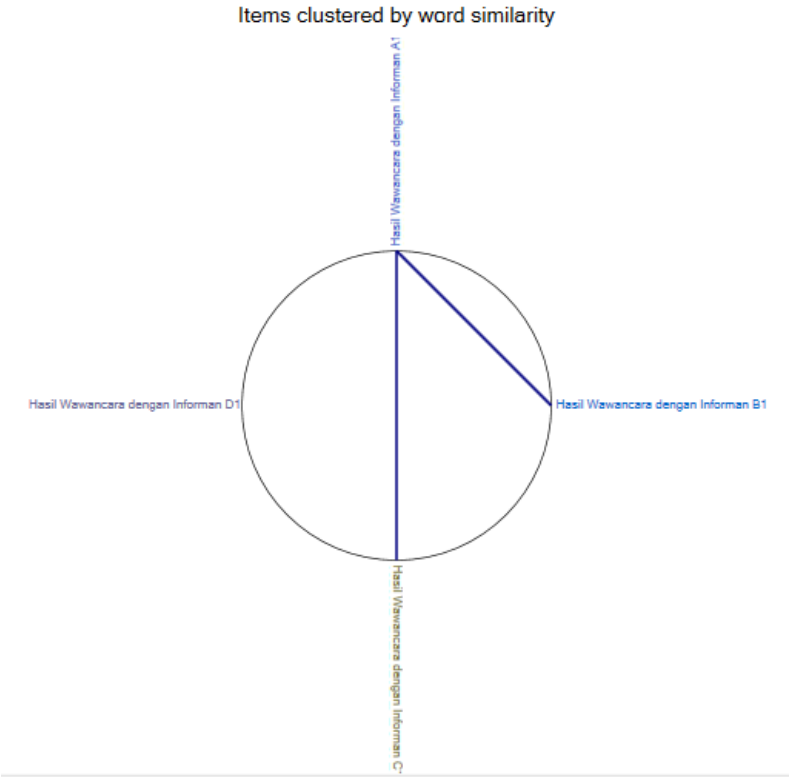

Gambar 4.4 Items Clustered by Word Similarity

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Garis koneksi antar narasumber menunjukkan bahwa kesamaan makna telah diatas 70%, jika tidak ada garis koneksi berarti kesamaan makna dibawah 70%. Gambar diatas menunjukkan bahwa informan yang memiliki kesamaan makna adalah informan A1 dengan informan B1; dan informan A1 dengan informan C1. Sedangkan informan D1 kurang memiliki kesamaan makna dengan para narasumber yang lain dan informan B1 dan C1 juga kurang memiliki kesamaan makna. Dibawah ini tabel yang menunjukkan rincian kesamaan makna antar informan A1, B1, C1 dan D1 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Keempat Informan

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Hasil Wawancara dengan Informan B1	Files\\Hasil Wawancara dengan Informan A1	0,874362
Files\\Hasil Wawancara dengan Informan C1	Files\\Hasil Wawancara dengan Informan A1	0,732806
Files\\Hasil Wawancara dengan Informan C1	Files\\Hasil Wawancara dengan Informan B1	0,687304
Files\\Hasil Wawancara dengan Informan D1	Files\\Hasil Wawancara dengan Informan B1	0,614747
Files\\Hasil Wawancara dengan Informan D1	Files\\Hasil Wawancara dengan Informan A1	0,547397
Files\\Hasil Wawancara dengan Informan D1	Files\\Hasil Wawancara dengan Informan C1	0,460629

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Informan A1 adalah informan berupa tim Kedubes Indonesia di Hanoi Vietnam yang menjawab semua pertanyaan penelitian sehingga lebih memiliki kesamaan makna dengan informan yang lain. Sedangkan informan D1 merupakan akademisi yang hanya menjawab pada fokus strategi sehingga kurang keterkaitan dengan informan lainnya.

4.4.1.1 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Pertahanan

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Pertahanan, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan B1 memiliki kesamaan makna sebesar 44,36% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Pertahanan

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Pertahanan\\Informan B1 -	Files\\Pertahanan\\Informan A1	0.443645

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.2 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Ekonomi Internasional

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Ekonomi Internasional, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 54,55% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.15 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Ekonomi Internasional

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficien
Files\\Ekonomi Internasional\\EI - Informan C	Files\\Ekonomi Internasional\\EI - Informan A1	0.545479

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.3 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Ekonomi Pertahanan

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Ekonomi Pertahanan, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan B1 memiliki kesamaan makna sebesar 58%; informan A1 dengan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 30%; dan informan B1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 28,68% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.16 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Ekonomi Pertahanan

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Ekonomi Pertahanan\\Informan B1	Files\\Ekonomi Pertahanan\\Informan A1	0.579216
Files\\Ekonomi Pertahanan\\Informan C1	Files\\Ekonomi Pertahanan\\Informan A1	0.303249
Files\\Ekonomi Pertahanan\\Informan C1	Files\\Ekonomi Pertahanan\\Informan B1	0.28683

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.4 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Manajemen Pertahanan

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Manajemen Pertahanan, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan B1 memiliki kesamaan makna sebesar 68,57% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.17 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Manajemen Pertahanan

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficien
Files\\Manajemen Pertahanan\\Informan B1	Files\\Manajemen Pertahanan\\Informan A1	0.685768

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.5 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Pertumbuhan Ekonomi

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Pertahanan, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan C1 memiliki tidak kesamaan makna yang memiliki nilai sebesar -0,06% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.18 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Pertumbuhan Ekonomi

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Pertumbuhan Ekonomi\\Informan C1	Files\\Pertumbuhan Ekonomi\\Informan A1	-0.069292

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.6 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai FDI

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori *Foreign Direct Investment*, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan B1 memiliki kesamaan makna sebesar 48,32%; informan A1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 57,94%; dan informan B1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 40,58% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.19 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara FDI

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\FDI\\Informan A1	Files\\FDI\\Informan B1	0.483242
Files\\FDI\\Informan A1	Files\\FDI\\Informan C1	0.57941
Files\\FDI\\Informan B1	Files\\FDI\\Informan C1	0.405823

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.7 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Ekspor-Impor

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Ekspor-Impor, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 55,06% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.20 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Ekspor-Impor

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Ekspor-Impor\\Informan C1	Files\\Ekspor-Impor\\Informan A1	0.550578

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.1.8 Persentase Kesamaan Wawancara Mengenai Strategi

Peneliti menganalisis *word similarity* dalam Teori Pertahanan, hasil Pearson Correlation Coefficient menunjukkan bahwa jawaban dari informan A1 dengan informan B1 memiliki kesamaan makna sebesar 51,68%;

informan B1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 56,8%; informan A1 dengan informan C1 memiliki kesamaan makna sebesar 50,56%; informan A1 dengan informan D1 memiliki kesamaan makna sebesar 50,06%; informan C1 dengan informan D1 memiliki kesamaan makna sebesar 49,71%; informan B1 dengan informan D1 memiliki kesamaan makna sebesar 47,17% sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.21 Pearson Correlation Coefficient Hasil Wawancara Strategi

Items clustered by word similarit

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Strategi\\Informan C1	Files\\Strategi\\Informan B1	0.568045
Files\\Strategi\\Informan B1	Files\\Strategi\\Informan A1	0.516751
Files\\Strategi\\Informan C1	Files\\Strategi\\Informan A1	0.505636
Files\\Strategi\\Informan D1	Files\\Strategi\\Informan A1	0.500632
Files\\Strategi\\Informan D1	Files\\Strategi\\Informan C1	0.497094
Files\\Strategi\\Informan D1	Files\\Strategi\\Informan B1	0.47168

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.4.2 Analisis Strategi Vietnam dalam Menghadapi Perang Dagang Amerika Serikat-Cina

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah menciptakan gelombang ketegangan ekonomi yang merambat ke seluruh dunia. Vietnam sebagai salah satu negara yang berada di tengah dua kekuatan ekonomi terbesar ini, memainkan peran dalam menghadapi dinamika persaingan global. Strategi Vietnam dalam menghadapi persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Cina menjadi penelitian dalam mengeksplorasi suatu negara kecil menyesuaikan diri dan merumuskan taktik dalam menghadapi konflik kekuatan besar. Strategi yang diterapkan oleh Vietnam untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya, tetapi juga memberikan pandangan dalam hal dampaknya terhadap stabilitas regional dan hubungan internasional secara keseluruhan.

Peneliti manganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Vietnam dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats). Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor-faktor internal berupa Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan); dan faktor eksternal berupa Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT membantu dalam merencanakan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengantisipasi atau mengurangi dampak dari ancaman yang mungkin timbul. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut menjadi landasan dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan.

4.4.2.1 Analisa Faktor Internal

Faktor internal dalam analisis SWOT mengacu pada keadaan yang mempengaruhi negara secara langsung dari dalam entitas itu sendiri yang terdiri dari kekuatan (strengths) yakni elemen positif yang memberikan keunggulan kompetitif dan kelemahan (weaknesses) yakni faktor internal yang menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan memahami kedua faktor ini, suatu negara dapat mengoptimalkan aset dan mengatasi kelemahan internal untuk meningkatkan daya saing.

Hasil analisis faktor-faktor internal yang memberikan gambaran kondisi Vietnam yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sebagaimana yang terperinci dibawah ini:

a. Kekuatan (strengths)

   Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan daya saing dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Vietnam adalah sebagai berikut:

   1) Nilai tukar mata uang Dong terhadap USD terlemah di ASEAN
   2) Stabilitas politik yang relatif terjaga dengan baik

3) Nilai-nilai demokrasi sosialis, tradisi dan solidaritas yang kuat dalam mendukung stabilitas sosial
4) Pemberian fasilitas insentif investasi dan dukungan pemerintah
5) Memiliki kondisi strategis secara geografis
6) Upah tenaga kerja yang tergolong rendah
7) Jumlah angkatan kerja yang melimpah
8) Kepatuhan pekerja terhadap Standart Operation Procedure (SOP)
9) Biaya listrik yang rendah
10) Memiliki komitmen yang tinggi untuk investasi ke sektor energi terbarukan
11) Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten

b. Kelemahan (weaknesses)

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan daya saing dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Vietnam adalah sebagai berikut:

a) Struktur pemerintahan (kementerian dan partai) yang kompleks serta kurangnya pemahaman di tingkat lokal dan regional
b) Korupsi yang masih menjadi masalah nasional
c) Kualitas tenaga kerja terampil yang masih terbatas
d) Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak memenuhi kebutuhan keterampilan industri
e) Kualitas dan fasilitas pendidikan tidak memadai
f) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah
g) Infrastruktur jalan yang masih kurang memadai
h) Kinerja logistik yang masih kurang memadai
i) Konektivitas dalam jaringan pengiriman liner global yang belum maksimal

j) Koneksivitas pelabuhan individu dalam wilayah Vietnam yang belum maksimal

k) Kecepatan internet yang belum maksimal

Faktor-faktor internal yang telah diuraikan diatas kemudian dianalisis dalam matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dimana faktor-faktor internal tersebut dimasukkan dalam kolom (*b*). Analisis faktor-faktor internal tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Vietnam dengan cara pemberian bobot pengaruh faktor internal organisasi dari skala penting (1,0) hingga tidak penting (0,0) dengan total nilai sebesar 1,0 pada kolom (*c*). Pada kolom (*d*) berisikan skala nilai 1-4 untuk menilai setiap faktor dengan ketentuan yaitu faktor-faktor internal sebagai kekuatan dengan nilai 4 mencerminkan kekuatan yang sangat baik dan faktor-faktor internal sebagai kelemahan dengan nilai 4 mencerminkan kelemahan yang sangat buruk. Selanjutnya pada kolom (*e*) merupakan total skor pembobotan hasil pengalian bobot (kolom c) dengan skala nilai (kolom d). Tabel dibawah menunjukkan matriks IFAS:

Tabel 4.22 Matriks IFAS

No	Faktor	Bobot (1-100%)	Skala Nilai	Bobot Nilai
a	*b*	*c*	*d*	*e*
Kekuatan (Strenghs)		0,575		1,980
1	Nilai tukar mata uang Dong terhadap USD terlemah di ASEAN	0,045	3	0,14
2	Stabilitas politik yang relatif terjaga dengan baik	0,060	4	0,24
3	Nilai-nilai demokrasi sosialis, tradisi dan solidaritas yang kuat dalam mendukung stabilitas sosial	0,065	4	0,26
4	Pemberian fasilitas insentif investasi dan dukungan pemerintah	0,050	3	0,15
5	Memiliki kondisi strategis secara geografis	0,050	3	0,15
6	Upah tenaga kerja yang tergolong rendah	0,075	4	0,30
7	Jumlah angkatan kerja yang melimpah	0,040	3	0,12
8	Kepatuhan pekerja terhadap *Standart Operation Procedure* (SOP)	0,055	4	0,22
9	Biaya listrik yang rendah	0,055	3	0,17
10	Memiliki komitmen yang tinggi untuk investasi ke sektor energi terbarukan	0,040	3	0,12
11	Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten	0,040	3	0,12

No	Faktor	Bobot (1-100%)	Skala Nilai	Bobot Nilai
a	*b*	*c*	*d*	*e*
Kelemahan (Weakness)		0,425		1,510
1	Struktur pemerintahan (kementerian dan partai) yang kompleks serta kurangnya pemahaman di tingkat lokal dan regional	0,045	4	0,18
2	Korupsi yang masih menjadi masalah nasional	0,045	4	0,18
3	Kualitas tenaga kerja terampil yang masih terbatas	0,045	4	0,18
4	Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak memenuhi kebutuhan keterampilan industri	0,040	3	0,12
5	Kualitas dan fasilitas pendidikan tidak memadai	0,035	3	0,11
6	Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah	0,035	3	0,11
7	Infrastruktur jalan yang masih kurang memadai	0,040	3	0,12
8	Kinerja logistik yang masih kurang memadai	0,050	4	0,20
9	Konektivitas dalam jaringan pengiriman liner global yang belum maksimal	0,050	4	0,20
10	Koneksivitas pelabuhan individu dalam wilayah Vietnam yang belum maksimal	0,020	3	0,06
11	Kecepatan internet yang belum maksimal	0,020	3	0,06
Jumlah		1,000		3,490

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Perhitungan diatas menunjukkan bobot nilai untuk Faktor Kekuatan sebesar 1,98 sedangkan Faktor Kelemahan sebesar 1,51. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa faktor kekuatan Vietnam lebih dominan mengatasi faktor kelemahannya.

4.4.2.2 Analisa Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam analisis SWOT mengacu pada keadaan eksternal yang mempengaruhi negara secara langsung yang terdiri dari peluang (opportunities) yakni potensi yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan dan ancaman (threat) yakni faktor eksternal yang dapat menyebabkan kerugian atau menjadi masalah. Dengan memahami peluang dan ancaman ini, akan membantu suatu negara dalam mengevaluasi kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih baik dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya.

Hasil analisis faktor-faktor eksternal yang memberikan gambaran kondisi Vietnam yaitu peluang (opportunities) dan ancaman (threat) sebagaimana yang terperinci dibawah ini:

a. Peluang (opportunities)

Faktor-faktor eksternal yang menjadi potensi untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Vietnam adalah sebagai berikut:

a) Vietnam memiliki perjanjian perdagangan internasional yang strategis
b) Peningkatan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan menjadi Comprehensive strategic partnership yang menambah fokus pada sektor mineral dan energi serta kerjasama pertahanan dan keamanan maritim
c) Peningkatan status kejasama menjadi AS-Vietnam menjadi Comprehensive strategic partnership
d) Dukungan Vietnam dalam inisiatif Belt and Road (BRI)
e) Integrasi pembayaran regional melalui Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN

b. Ancaman (threat)

Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman dan akan menyebabkan kerugian atau masalah bagi Vietnam adalah sebagai berikut:

a) Ketergantungan ekspor yang pada produk eletronik
b) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Pajak minimum global (Global Minimum Tax/ GMT) sebesar 15% pada tahun 2024
c) Konsistensi pemimpin Vietnam karena tidak adanya pihak oposisi pemerintah
d) Ketergantungan impor dari Cina
e) Ketegangan geopolitik Laut Cina Selatan

Faktor-faktor eksternal yang telah diuraikan diatas kemudian dianalisis dalam matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*) dimana faktor-faktor eksternal tersebut dimasukkan dalam kolom (*b*). Analisis faktor-faktor eksternal tersebut untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi Vietnam dengan cara pemberian bobot pengaruh faktor internal organisasi dari skala penting (1,0) hingga tidak penting (0,0) dengan total nilai sebesar 1,0 pada kolom (*c*). Pada kolom (*d*) berisikan skala nilai 1-4 untuk menilai setiap faktor dengan ketentuan yaitu faktor-faktor eksternal sebagai kekuatan dengan nilai 4 mencerminkan peluang yang sangat baik dan faktor-faktor eksternal sebagai ancaman dengan nilai 4 mencerminkan ancaman yang sangat buruk. Selanjutnya pada kolom (*e*) merupakan total skor pembobotan hasil pengalian bobot (kolom c) dengan skala nilai (kolom d). Tabel dibawah menunjukkan matriks EFAS:

Tabel 4.23 Matriks EFAS

No	Faktor	Bobot (1-100%)	Skala Nilai	Bobot Nilai
a	*b*	*c*	*d*	*e*
Peluang (Opportunity)		0,54		1,68
1	Vietnam memiliki perjanjian perdagangan internasional yang strategis	0,13	4	0,52
2	Peningkatan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan menjadi Comprehensive strategic partnership yang menambah fokus pada sektor mineral dan energi serta kerjasama pertahanan dan keamanan maritim	0,11	3	0,33
3	Peningkatan status kejasama menjadi AS-Vietnam menjadi Comprehensive strategic partnership	0,12	3	0,36
4	Dukungan Vietnam dalam inisiatif Belt and Road (BRI)	0,11	3	0,33
5	Integrasi pembayaran regional melalui Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN dan penggunaan mata uang lokal di kawasan (Local currency transaction/LCT)	0,07	2	0,14
Ancaman (Threats)		0,46		1,52
1	Ketergantungan ekspor yang pada produk eletronik	0,08	4	0,32
2	Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menerapkan minimum global (Global Minimum Tax/ GMT) sebesar 15% pada tahun 2024	0,09	3	0,27

No	Faktor	Bobot (1-100%)	Skala Nilai	Bobot Nilai
a	*b*	*c*	*d*	*e*
3	Konsistensi pemimpin Vietnam karena tidak adanya pihak oposisi pemerintah	0,07	2	0,14
4	Ketergantungan impor dari Cina	0,09	3	0,27
5	Ketegangan geopolitik Laut Cina Selatan	0,13	4	0,52
Jumlah		1,00		3,20

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Perhitungan diatas menunjukkan bobot nilai untuk Faktor Peluang sebesar 1,68 sedangkan Faktor Ancaman sebesar 1,52 sehingga dapat diasumsikan bahwa faktor peluang Vietnam lebih dominan mengatasi faktor ancamannya. Oleh karena itu, Vietnam harus dapat menggunakan peluang yang tersedia dengan menerapkan strategi yang tepat.

4.4.2.3 Perumusan Strategi

Tahap awal dalam perumusan strategi adalah menganalisi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menggambarkan kondisi saat ini sebagai landasan untuk merumuskan strategi penelitian ini. Selanjutnya menganalisis persilangan antara faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) sehingga dapat diambil keputusan terkait strategi serta kebijakan organisasi yang terkait atas faktor-faktor tersebut. Matriks IFAS dan matriks EFAS yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menetapkan diagram analisis SWOT sebagaimana yang tergambar dibawah ini:

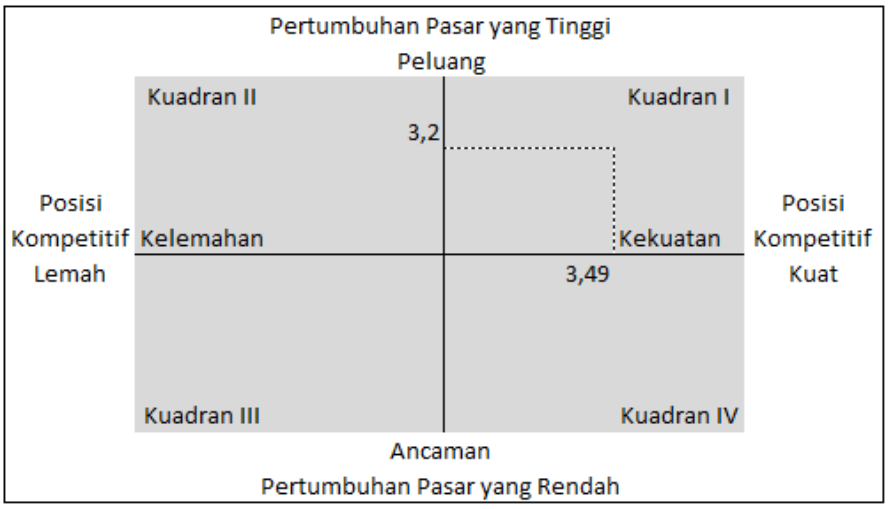

Gambar 4.5 Diagram Analisis SWOT

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Diagram di atas menunjukkan bahwa titik pertemuan antara nilai IFAS sebesar 3,49 dan nilai EFAS sebesar 3,2 berada pada Kuadran I. Berikut penjelasan mengenai kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV sebagai berikut:

a. Kuadran I (Agresif)

   Kuadran ini menunjukkan kondisi yang sangat menguntungkan sehingga strategi yang direkomendasikan berupa kebijakan yang mendorong pertumbuhan yang meningkat.

b. Kuadran II (Competitive)

   Kuadran ini menunjukkan entitas mempunyai kekuatan saat menghadapi ancaman sehingga strategi yang disarankan berupa diversifikasi produk/pasar.

c. Kuadran III (Konservatif):

   Kuadran ini menunjukkan kondisi peluang yang besar bertabrakan dengan kelemahan internal yang signifikan sehingga. Strategi yang perlu diterapkan adalah mengurangi masalah internal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

d. Kuadran IV (Defensif)

Kuadran ini menunjukkan kondisi yang merugikan entitas sehingga srategi yang bisa diambil secara defensif.

Posisi entitas dalam masing-masing kuadran tersebut dapat memberikan panduan bagi pengambilan keputusan strategis untuk menyesuaikan arah dan fokus strategi yang tepat guna memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan risiko. Vietnam berada dalam kuadran I yakni dalam posisi yang menguntungkan sehingga Vietnam dapat menerapkan strategi pertumbuhan yang agresif dan juga bisa menerapkan strategi pada kuadran II, III dan IV.

Hasil evaluasi faktor internal dan eksternal selanjutnya dilakukan pembobotan ke dalam matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary). Penilaian matriks IFAS menunjukkan skor yang tercatat sebesar 3,49 yang berasal dari hasil akumulasi skor faktor kekuatan sebesar 1,98 dan skor faktor kelemahan sebesar 1,51. Skor kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelemahan mengimplikasikan bahwa kekuatan entitas mampu mengesampingkan kelemahan yang ada. Poin terkuat bagi Vietnam adalah upah tenaga kerja yang tergolong rendah. Sedangkan kelemahan utamanya terletak pada kinerja logistik yang masih kurang memadai dan konektivitas dalam jaringan pengiriman liner global yang belum maksimal.

Sementara itu, hasil evaluasi matriks EFAS menunjukkan skor sebesar 3,2. Skor tersebut dihitung dari akumulasi skor faktor peluang sebesar 1,68 dan skor faktor ancaman sebesar 1,52. Skor peluang yang lebih besar dibandingkan ancaman mengimplikasikan bahwa entitas dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi ancaman. Peluang tertinggi adalah Vietnam yang memiliki perjanjian perdagangan internasional strategis sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, ancaman utama yang harus diwaspadai adalah

ketegangan geopolitik Laut Cina Selatan karena akan mempengaruhi kesektor ekonomi dan pertahanan.

Korelasi antara evaluasi IFAS dan EFAS dengan analisis SWOT mengilustrasikan potensi strategi yang cocok dengan kemampuan dan situasi lingkungan yang kompleks serta multidimensional sebuah entitas. Metode analisis SWOT digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang secara simultan mengurangi kelemahan dan ancaman. Empat kategori strategi alternatif yakni strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT tergambar dalam matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 4.24 Matriks SWOT

IFAS	Kekuatan (Strenghs)	Kelemahan (Weakness)
	Nilai tukar mata uang Dong terhadap USD terlemah di ASEAN	Struktur pemerintahan (kementerian dan partai) yang kompleks serta kurangnya pemahaman di tingkat lokal dan regional
	Stabilitas politik yang relatif terjaga dengan baik	Korupsi yang masih menjadi masalah nasional
	Nilai-nilai demokrasi sosialis, tradisi dan solidaritas yang kuat dalam mendukung stabilitas sosial	Kualitas tenaga kerja terampil yang masih terbatas
	Pemberian fasilitas insentif investasi dan dukungan pemerintah	Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak memenuhi kebutuhan keterampilan industri
	Memiliki kondisi strategis secara geografis	Kualitas dan fasilitas pendidikan tidak memadai
EFAS	Upah tenaga kerja yang tergolong rendah	Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah
	Jumlah angkatan kerja yang melimpah	Infrastruktur jalan yang masih kurang memadai
	Kepatuhan pekerja terhadap SOP	Kinerja logistik yang masih kurang memadai
	Biaya listrik yang rendah	Konektivitas dalam jaringan pengiriman liner global yang belum maksimal
	Memiliki komitmen yang tinggi untuk investasi ke sektor energi terbarukan	Konektivitas pelabuhan individu dalam wilayah Vietnam yang belum maksimal
	Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten	Kecepatan internet yang belum maksimal
Peluang (Opportunity)		
Vietnam memiliki perjanjian perdagangan internasional yang strategis	- Melakukan ekspansi pangsa pasar ekspor - Meningkatkan promosi Vietnam sebagai tempat investasi yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif	- Melakukan pengembangan digitalisasi pada prosedur investasi sehingga memudahkan masuknya investasi asing - Melakukan peningkatan infrastruktur secara sinkronisasi modern dan strategis, termasuk transportasi, telekomunikasi, dan logistik - Meningkatkan standar dan regulasi teknis produk berkualitas tinggi

IFAS	**Kekuatan (Strenghs)**	**Kelemahan (Weakness)**
	Nilai tukar mata uang Dong terhadap USD terlemah di ASEAN	Struktur pemerintahan (kementerian dan partai) yang kompleks serta kurangnya pemahaman di tingkat lokal dan regional
	Stabilitas politik yang relatif terjaga dengan baik	Korupsi yang masih menjadi masalah nasional
	Nilai-nilai demokrasi sosialis, tradisi dan solidaritas yang kuat dalam mendukung stabilitas sosial	Kualitas tenaga kerja terampil yang masih terbatas
	Pemberian fasilitas insentif investasi dan dukungan pemerintah	Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak memenuhi kebutuhan keterampilan industri
	Memiliki kondisi strategis secara geografis	Kualitas dan fasilitas pendidikan tidak memadai
Peningkatan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan menjadi Comprehensive strategic partnership yang menambah fokus pada sektor mineral dan energi serta kerjasama pertahanan dan keamanan maritim	- Mendorong komitmen implementasi Korea Selatan dalam peningkatan investasi pada sektor mineral dan energi - Mendorong komitmen Korea Selatan sebagai landasan kuat untuk kerjasama bidang pertahanan dan keamanan	- Mendorong kesepakatan transfer teknologi dengan investor - Mendorong kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan dengan investor
Peningkatan status kejasama menjadi AS-Vietnam menjadi Comprehensive strategic partnership	Mendorong komitmen implementasi Amerika Serikat berinvestasi pada sektor semikonduktor; mineral, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi digital	- Meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat pada sektor pertahanan dan keamanan
Dukungan Vietnam dalam Inisiatif Belt and Road (BRI)	- Meningkatan akses dalam ekspansi pangsa pasar ekspor - Mempromosikan Vietnam sebagai tempat investasi yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif	- Menjaga perlindungan kepentingan nasional dalam perspektif pertahanan dan ekonomi - Mendorong komitmen impementasi Cina berinvestasi pada sektor infrastruktur sehingga terintegrasi dengan proyek BRI
Integrasi pembayaran regional melalui Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN dan penggunaan mata uang lokal di kawasan (Local currency transaction/LCT)	Mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan regional untuk mengurangi ketergantungan pada USD	Peningkatan infrastruktur dan kapasitas lembaga keuangan untuk memastikan kompatibilitas dan integrasi dengan sistem pembayaran regional ASEAN
Ancaman (Threats)		

IFAS	Kekuatan (Strenghs)	Kelemahan (Weakness)
	Nilai tukar mata uang Dong terhadap USD terlemah di ASEAN	Struktur pemerintahan (kementerian dan partai) yang kompleks serta kurangnya pemahaman di tingkat lokal dan regional
	Stabilitas politik yang relatif terjaga dengan baik	Korupsi yang masih menjadi masalah nasional
	Nilai-nilai demokrasi sosialis, tradisi dan solidaritas yang kuat dalam mendukung stabilitas sosial	Kualitas tenaga kerja terampil yang masih terbatas
	Pemberian fasilitas insentif investasi dan dukungan pemerintah	Sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak memenuhi kebutuhan keterampilan industri
	Memiliki kondisi strategis secara geografis	Kualitas dan fasilitas pendidikan tidak memadai
Ketergantungan ekspor yang pada produk eletronik	Melakukan promosi produk ekspor unggulan lainnya.	Mendukung pengembangan bisnis produk berkeunggulan kompetitif;
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menerapkan Pajak minimum global (Global Minimum Tax/ GMT) sebesar 15% pada tahun 2024	Melakukan penyesuaian kebijakan pajak domestik yang berkompetitif atas standar internasional terbaru	Meningkatkan insentif non-pajak yakni kemudahan akses ke lahan, dukungan infrastruktur, kemudahan perizinan bisnis, dan lainnya
Konsistensi pemimpin Vietnam karena tidak adanya pihak oposisi pemerintah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.	Memperkuat lembaga yudikatif
Ketergantungan impor dari Cina	- Berupaya mendiversifikasi negara pengimpor lain yang menghasilkan produk sejenis. - Mendorong investasi lokal maupun asing untuk membangun kapasitas produksi dalam negeri yang menghasilkan produk impor sejenis dari Cina.	- Melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi untuk mengembangkan sumber daya lokal - Pengembangan rantai pasokan dalam negeri dan pemberdayaan industri domestik dan usaha kecil dan menengah (UKM).
Ketegangan geopolitik Laut Cina Selatan	Melakukan kerjasama investasi dengan perusahaan internasional dan negara lain untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi di Laut Cina Selatan dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional.	- Meningkatkan kemampuan pertahanan nasional untuk melindungi kedaulatan di Laut Cina Selatan. - Membangun infrastruktur yang memadai di daerah perbatasan

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

4.5 Interpretasi Data

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah menciptakan gelombang ketegangan ekonomi yang merambat ke seluruh dunia. Vietnam sebagai salah satu negara yang berada di tengah dua kekuatan ekonomi terbesar ini, memainkan peran dalam menghadapi dinamika persaingan global. Strategi Vietnam dalam menghadapi persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Cina menjadi penelitian dalam mengeksplorasi suatu negara menyesuaikan diri dan merumuskan taktik dalam menghadapi konflik kekuatan besar. Strategi yang diterapkan oleh Vietnam untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya, tetapi juga memberikan pandangan dalam hal dampaknya terhadap stabilitas regional dan hubungan internasional secara keseluruhan.

Peneliti manganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Vietnam dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats). Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor-faktor internal berupa Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan); dan faktor eksternal berupa Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT membantu merencanakan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengantisipasi atau mengurangi dampak ancaman yang mungkin timbul. Pemahaman yang mendalam atas faktor-faktor tersebut menjadi landasan dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan.

Korelasi antara evaluasi IFAS dan EFAS dengan analisis SWOT mengilustrasikan potensi strategi yang cocok dengan kemampuan dan situasi lingkungan yang kompleks serta multidimensional sebuah entitas. Metode analisis SWOT digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang secara simultan mengurangi kelemahan dan ancaman.

4.5.1 Strategi SO

Strategi Kekuatan-Peluang (Strengths-Opportunities) adalah pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan keunggulan internal yang dimiliki untuk mengeksploitasi peluang eksternal yang ada. Strategi SO yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan ekspansi pangsa pasar ekspor

   Pemerintah Vietnam dapat melakukan strategi ekspansi pangsa pasar ekspornya dengan memanfaatkan serangkaian perjanjian perdagangan internasional yang strategis yakni CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP dan lainnya. Keikutsertaan dalam perjanjian ini memberikan Vietnam akses luas ke pasar Asia-Pasifik dan Uni Eropa, selain itu meningkatkan standar produk sesuai regulasi Uni Eropa. Ini memberikan keuntungan berupa akses preferensial, penghapusan tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya, serta memfasilitasi ekspansi perdagangan produk unggulan. Strategi ini bertujuan memperkuat posisi Vietnam dalam rantai pasok global, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

b. Mempromosikan Vietnam sebagai tempat investasi yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif

   Pemerintah Vietnam dapat mengambil strategi dengan selalu mempromosikan negaranya sebagai tujuan investasi yang menawarkan daya saing yang tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan internasional dan dukungan terhadap Inisiatif Belt and Road (BRI) mendukung daya tarik investasi berkualitas. Vietnam menawarkan lingkungan investasi stabil, kebijakan perdagangan terbuka, dan akses preferensial ke pasar-pasar penting.

Dengan aktif mendukung BRI, Vietnam melihat potensi kerja sama dalam pengembangan infrastruktur dan investasi proyek strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Keunggulan kompetitif seperti upah tenaga kerja rendah, stabilitas sosial dan politik, serta nilai tukar mata uang yang lemah, meningkatkan daya saing Vietnam dalam menarik investor berkualitas. Ini diharapkan akan membawa produk ekspor Vietnam ke posisi yang lebih baik dalam rantai produksi global.

c. Mendorong komitmen implementasi Korea Selatan dalam peningkatan investasi pada sektor mineral dan energi

Korea Selatan merupakan negara investor terbesar di Vietnam terutama dari industri elektronik yaitu Samsung, kemudian akan merambah pada sektor lain yakni sektor mineral dan sektor energi. Pada tahun ini telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pada sektor mineral untuk mendirikan pusat rantai pasokan bersama logam tanah jarang dan mineral seperti tungsten; dan pada sektor energi berupa gas alam dan hydrogen. Kesepakatan pada sektor energi bahkan sudah ditandatangani antar perusahaan yakni Korea Gas Corp. dan perusahaan Vietnam untuk proyek pembangkit listrik tenaga gas alam cair; dan perjanjian antara SK E&S dan PVN Vietnam untuk proyek hidrogen.

Pemerintah Vietnam perlu mendorong komitmen implementasi atas nota kesepahaman tersebut, karena berdasarkan data GSO Vietnam rata-rata nilai implementasi FDI di Vietnam hanya 55% dari total nilai yang telah terregistrasi. Upaya mendorong komitmen implementasi diharapkan bahwa nilai proyek yang terregistrasi akan sama dengan nilai implementasinya.

d. Mendorong komitmen Korea Selatan sebagai landasan kuat untuk kerjasama bidang pertahanan dan keamanan

Selain komitmen merambah investasi ke sektor mineral dan energi, Korea Selatan juga menjanjikan kerjasama dalam industri pertahanan dan penguatan keamanan maritim Vietnam. Saat ini Vietnam menghadapi tantangan terkait konflik dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, tentunya membutuhkan sistem pertahanan yang tangguh dan keamanan maritim yang. Kerjasama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Korea Selatan dengan kemajuan teknologi dan pengalaman dalam industri pertahanan, dapat memberikan dukungan yang substansial kepada Vietnam dalam hal pengembangan sistem pertahanan yang modern dan efektif. Selain meningkatkan pertahanan nasional, kerjasama ini juga akan memperkuat hubungan strategis kedua negara, mengurangi ketegangan di kawasan, dan membuka peluang kerjasama lebih lanjut.

e. Mendorong komitmen implementasi Amerika Serikat berinvestasi pada sektor semikonduktor; mineral, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi digital.

Amerika Serikat merupakan mitra ekspor terbesar Vietnam dengan 29% dari total ekspor 2021, namun FDI AS hanya berada di posisi sebelas. Setelah Perjanjian Perdagangan Bilateral AS-Vietnam pada 10 Desember 2001, hubungan keduanya meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership dengan komitmen memperkuat kerjasama politik, diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Amerika Serikat berkomitmen untuk berinvestasi di sektor semikonduktor dan mineral Vietnam, menguatkan rantai

pasokan termasuk kecerdasan buatan, penyimpanan baterai, dan chip. Mereka juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi digital melalui pelatihan tenaga kerja berteknologi tinggi, laboratorium pelatihan Open Radio Access Network (O-RAN), dan penerapan 5G di Vietnam. Pemerintah Vietnam perlu mendorong implementasi komitmen tersebut, mengingat rata-rata nilai implementasi FDI di Vietnam hanya mencapai 55% dari total nilai yang terregistrasi. Upaya ini diharapkan akan menyamakan nilai proyek yang terregistrasi dengan nilai implementasinya.

f. Mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan regional untuk mengurangi ketergantungan pada USD

   Vietnam sebagai anggota aktif ASEAN mendukung integrasi pembayaran regional di ASEAN melalui konsep RPC dan LCT guna mengurangi ketergantungan pada USD dengan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas dan membangun infrastruktur keuangan yang efisien. Tujuan RPD dan LCT adalah menciptakan saluran pembayaran yang cepat, murah, dan terjangkau di wilayah ASEAN, mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dan memperkuat kerjasama ekonomi di ASEAN.

4.5.2 Strategi ST

Strategi Kekuatan-Ancaman (Strengths-Threats) adalah pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan keunggulan internal suatu organisasi untuk menangani atau merespons ancaman dari lingkungan eksternal. Strategi ST yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan promosi produk ekspor unggulan lainnya

   Vietnam telah berhasil dalam ekspor produk elektronik, terutama ponsel dan komponen elektronik lainnya. Meskipun

terbilang sukses, Vietnam menghadapi ancaman ketergantungan ekspor tunggal pada sektor elektronik dimana mencapai 39% dari nilai total ekspor pada tahun 2022. Untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar global, Vietnam perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mendiversifikasi portofolio produk ekspornya. Produk unggulan dengan potensi pertumbuhan termasuk reactor nuklir, alas kaki, pakaian, mebel, besi dan baja, serta plastik. Pemerintah Vietnam perlu gencar mempromosikan dan mengembangkan pasar produk ini dengan langkah-langkah pemasaran yang agresif untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan permintaan global.

b. Melakukan penyesuaian kebijakan pajak domestik yang berkompetitif atas standar internasional terbaru

Pemerintah Vietnam sedang menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan pajak domestiknya agar tetap kompetitif dengan standar internasional terbaru yang dikeluarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pada tahun 2024, 139 negara berkomitmen memberlakukan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) sebesar 15%. Implementasi GMT ini merupakan upaya OECD untuk mengurangi praktik perpajakan yang agresif dan menghindari pemindahan laba perusahaan multinasional ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Vietnam diharapkan menyesuaikan kebijakan pajak, termasuk tarif pajak perusahaan dan insentif fiskal, untuk memenuhi standar internasional dan menjaga daya tarik sebagai destinasi investasi. Penyesuaian ini bertujuan mendukung stabilitas ekonomi global, tetapi pemerintah perlu hati-hati agar tidak merugikan pertumbuhan ekonomi dan daya saing

bisnis di dalam negeri. Mencapai keseimbangan antara kepatuhan internasional, daya tarik investasi, dan stabilitas ekonomi menjadi prioritas dalam proses penyesuaian kebijakan pajak.

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah

Tantangan utama bagi pemimpin Vietnam adalah konsistensi, karena tidak adanya oposisi dalam pemerintahan. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Sistem politik Partai Komunis membatasi pluralitas politik dan variasi pandangan. Solusinya melibatkan peningkatan transparansi melalui informasi publik dan forum dialog inklusif, serta peningkatan akuntabilitas melalui praktik audit publik dan lembaga pengawas independen. Meskipun menghadapi tantangan struktural, langkah-langkah ini diharapkan membawa manfaat jangka panjang dengan meningkatkan legitimasi pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

d. Berupaya mendiversifikasi negara pengimpor lain yang menghasilkan produk sejenis

Cina adalah mitra impor terbesar Vietnam yang mencapai 33% dari nilai impor Vietnam. Ketergantungan yang tinggi pada Cina akan menyebabkan kekhawatiran akan risiko ketergantungan Tunggal. Vietnam perlu mengambil langkah strategis dalam mendiversifikasi negara pengimpor produk sejenis untuk mengurangi risiko pasokan dan stabilitas harga. Pemerintah harus mencari pemasok alternatif yang menawarkan produk serupa, dengan evaluasi cermat terhadap kualitas, keandalan pasokan, ketersediaan, dan ketepatan harga. Proses diversifikasi sumber impor

memerlukan waktu, sumber daya, dan penyesuaian dalam rantai pasok. Keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan pada satu negara importir dapat meningkatkan keamanan pasokan dan menyeimbangkan risiko ekonomi terkait dengan perubahan pasar.

e. Mendorong investasi lokal maupun asing untuk membangun kapasitas produksi dalam negeri yang menghasilkan produk impor sejenis dari Cina.

   Selain mencari pemasok alternatif dari negara lain, Vietnam juga perlu mendorong investasi domestik dan asing untuk membangun kapasitas produksi dalam negeri. Ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor dari Cina dan meningkatkan produksi dalam negeri. Pembangunan fasilitas produksi memerlukan investasi besar, dukungan pemerintah, dan ketersediaan produk lokal yang bersaing. Pemerintah Vietnam dapat memberikan insentif investasi, kemudahan regulasi, infrastruktur, dan dukungan kebijakan lain untuk menarik investor.

   Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam LOI 2020 negara tidak memaksakan memakai produk dalam negeri sebagai mana tercantum dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa "*Negara tidak boleh memaksa investor: memprioritaskan pembelian dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri atau membeli barang dan jasa dari produsen barang atau penyedia jasa dalam negeri mencapai tingkat lokalisasi tertentu untuk barang-barang produksi dalam negeri…*"

f. Melakukan kerjasama investasi dengan perusahaan internasional dan negara lain untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi di Laut Cina Selatan dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional.

Laut Cina Selatan adalah kawasan yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya energi seperti minyak dan gas alam. Namun wilayah ini juga menjadi sumber ketegangan geopolitik karena klaim sengketa kedaulatan yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan. Untuk mengatasi ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan, Pemerintah Vietnam dapat menerapkan strategi kerjasama investasi dengan perusahaan internasional untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi di kawasan tersebut. Langkah ini selain memperoleh akses ke sumber energi, juga bertujuan memperkuat klaim kedaulatan dan integritas wilayah nasional Vietnam. Langkah ini juga menghadapi tantangan politik dan geopolitik dari negara-negara yang memiliki klaim sengketa di Laut Cina Selatan. Pemerintah Vietnam perlu membangun dialog konstruktif dengan negara tetangga untuk mencapai kemitraan berkelanjutan dan mengurangi ketegangan di kawasan. Strategi ini, selain menangani kebutuhan energi, juga mencakup aspek kedaulatan, integritas wilayah, dan stabilitas regional yang lebih luas.

4.5.3 Strategi WO

Strategi Kelemahan-Peluang (Weaknesses-Opportunities) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi kelemahan internal suatu organisasi dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di lingkungan eksternal. Strategi WO yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengembangan digitalisasi pada prosedur investasi sehingga memudahkan masuknya investasi asing
   Pemerintah Vietnam perlu meningkatkan efisiensi proses investasi bagi investor asing, mengakui pentingnya prosedur

investasi yang mudah. Langkah awal yang diperlukan adalah meluncurkan serangkaian digitalisasi investasi, termasuk platform digital yang mengintegrasikan seluruh tahap investasi yang dimulai dari pengajuan, persetujuan investasi (The National Assembly/ The Prime Minister's/ and Provincial-level People's Committees), pelaksanaan hingga pengawasan investasi. Digitalisasi ini menggunakan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, analisis big data, dan cloud platform untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, dan mudah dipahami bagi investor asing. Meskipun menghadapi tantangan seperti integrasi sistem kompleks, keamanan data, dan penyesuaian kebijakan, komitmen kuat dari pemerintah diperlukan untuk terus mengembangkan infrastruktur digital dan keamanan sistem guna mendukung proses investasi yang efektif dan efisien.

b. Melakukan peningkatan infrastruktur secara sinkronisasi modern dan strategis termasuk transportasi, telekomunikasi, dan logistik

   Infrastruktur di Vietnam perlu ditingkatkan secara modern dan strategis untuk mengatasi kekurangan seperti jalan, kereta api, logistik, dan konektivitas internet. Peningkatan ini menjadi kunci dalam menghadapi peluang perjanjian perdagangan internasional. Investasi diperlukan pada peningkatan kualitas jalan raya, moda kereta api, konektivitas pelabuhan, dan sektor telekomunikasi. Strategi ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi produk, dan meningkatkan daya saing internasional. Namun, Pemerintah Vietnam harus mengatasi tantangan seperti alokasi dana, kesesuaian dengan perencanaan strategis, dan manajemen proyek yang efisien.

c. Meningkatkan standar dan regulasi teknis produk berkualitas tinggi

Pemerintah Vietnam perlu meningkatkan standar produk untuk memenuhi persyaratan perjanjian perdagangan internasional seperti EVFTA dan UKVFTA. Strategi peningkatan standar ini melibatkan koordinasi dengan industri, regulator, dan lembaga pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut juga memerlukan investasi dalam infrastruktur teknis, laboratorium pengujian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan penerapan sesuai standar yang berlaku.

Perbaikan standar dan regulasi teknis ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung dalam meningkatkan daya saing produk Vietnam, tetapi juga akan memperkuat reputasi Vietnam dalam perdagangan internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

d. Mendorong kesepakatan transfer teknologi dengan investor

Korea Selatan merupakan negara sumber investasi terbesar bagi Vietnam terutama melalui produk-produk dari perusahaan global seperti Samsung. Vietnam mengalami peningkatan kemitraan strategis komprehensif dengan Korea Selatan. Atas peluang tersebut maka Vietnam dapat mendorong peningkatkan kerjasama ekonomi melalui transfer teknologi. Mendorong kesepakatan transfer teknologi dengan Korea Selatan menjadi prioritas bagi Vietnam guna memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Tantangan dalam mendorong kesepakatan tersebut melibatkan keuntungan bersama, regulasi hukum, dan infrastruktur yang memadai. Komitmen pemerintah Vietnam

membutuhkan langkah-langkah strategis, koordinasi efektif, dan perhatian pada aspek hukum serta keamanan. Penerapan kesepakatan transfer teknologi ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Mendorong kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan dengan investor

Selain melakukan strategi transfer teknologi dengan investor, Pemerintah Vietnam dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat aspek kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi para tenaga kerja.Kolaborasi dengan investor menjadi penting dalam menyusun program-program pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pendidikan yang relevan untuk menghadapi tuntutan perkembangan jaman.

Kerjasama ini membutuhkan komitmen jangka panjang, koordinasi efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan swasta. Langkah-langkah tersebut melibatkan pembentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, program pelatihan khusus, dan dukungan dalam mendirikan pusat penelitian bersama. Vietnam harus memperhatikan penyesuaian kebijakan pendidikan, meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja berkualitas, serta memastikan transfer pengetahuan yang efektif dan adil. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi asing, perlindungan kepentingan nasional, dan pengembangan sumber daya manusia lokal.

f. Meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat pada sektor pertahanan dan keamanan

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Vietnam saat ini terjalin dengan baik terlebih larangan penjualan senjata AS ke Vietnam dicabut pada tahun 2016. Hal tersebut tercermin pada tahun 2018, kapal induk Angkatan Laut AS, USS Carl Vinson, melakukan kunjungan bersejarah ke Vietnam. Tahun yang sama, Vietnam juga mengambil bagian dalam latihan militer maritim yang disebut Rim of the Pacific (RIMPAC) untuk pertama kalinya, acara yang biasa diadakan oleh AS setiap dua tahun. Pada tanggal 25 Juni 2023, tiga kapal perang AS—kapal induk USS Ronald Reagan, kapal penjelajah USS Antietam (CG 54) dan USS Robert Smalls (CG 62)—tiba di Vietnam. Langkah ini dilakukan oleh Vietnam dengan tujuan untuk menanggapi sikap Tiongkok yang tegas di kawasan tersebut, terutama di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian kerjasama Vietnam dan Amerika Serikat meningkat menjadi *Comprehensive Strategic Partnership* dimana telah dilakukan Kerjasama di bidang pertahanan berupa kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing 737 Max dengan nilai mencapai 7,8 miliar dolar AS.

Pengelolaan peningkatan kerjasama Vietnam dan AS akan menjadi tantangan bagi kedua negara terkait perbedaan hukum, perencanaan strategis, dan kehati-hatian antara kedua negara karena adanya perbedaan dalam kebijakan, budaya, dan kepentingan nasional dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan di bidang pertahanan dan keamanan.

g. Mendorong komitmen implementasi Cina berinvestasi pada sektor infrastruktur sehingga terintegrasi dengan proyek BRI

Inisiatif Belt and Road (BRI) merupakan proyek ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur yang luas,

menghubungkan Asia dengan Eropa, Afrika, dan bagian lainnya dari dunia. Inisiatif ini mencakup jalur darat (jalur sutera) dan jalur laut (jalur maritim), yang menjadi pilar utama dalam rencana pengembangan ekonomi, perdagangan, dan investasi lintas batas. Dukungan Vietnam atas Inisiatif Belt and Road (BRI) tentunya akan membawa peluang besar untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi Cina. Pada Desember 2023 telah ditandatangani proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kunming di Provinsi Yunnan (China) dengan Pelabuhan Haipong di Hanoi dan pengembangan jalur kereta api cepat yang menghubungkan Hanoi dan Ho Chi Minh sekitar sepanjang 1.545 kilometer dengan perkiraan biaya mencapai 62 miliar dolar AS. Kesepakatan kerjasama telah dilakukan, maka Pemerintah Vietnam perlu mendorong komitmen Cina dalam implementasi investasi infrastruktur tersebut untuk segera merealisasikan kesepakatan yang telah dijanjikan. Namun Pemerintah Vietnam perlu memastikan integrasi proyek dengan rencana nasional, mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, serta memastikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Tidak hanya itu, Vietnam harus menjaga keseimbangan dalam negosiasi dengan Cina, menjaga ketergantungan, dan memastikan kontrol terhadap pembangunan nasional. Pendekatan yang cermat dan terencana akan memungkinkan Vietnam memanfaatkan peluang BRI untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

h. Menjaga perlindungan kepentingan nasional dalam perspektif pertahanan dan ekonomi

Vietnam merupakan salah satu negara yang mendukung Inisiatif Belt and Road (BRI). Namun posisi dukungan Vietnam

dalam Inisiatif Belt and Road (BRI) tentu dihadapkan dalam tetap menjaga perlindungan kepentingan nasional baik dari perspektif ekonomi maupun pertahanan.

Pada perspektif ekonomi, BRI berpotensi meningkatkan konektivitas infrastruktur Vietnam dengan wilayah lain di Asia dan Eropa sehingga membuka peluang bagi investasi asing, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan akses ke pasar internasional. Namun BRI juga berimplikasi politik, ekonomi, dan keamanan jangka panjang untuk tetap mempertahankan kontrol dan kepentingan nasional yang kuat.

Sedangkan dalam perspektif pertahanan, Vietnam memiliki kepentingan besar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dan mempertahankan keamanan nasional di tengah lingkungan geopolitik yang kompleks. Vietnam secara historis aktif menegaskan klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan terus berupaya mempertahankan posisinya dalam persaingan regional. Oleh karena itu, menjaga keamanan perbatasan, memperkuat aspek militer, dan membangun aliansi strategis dengan negara-negara lain di kawasan menjadi prioritas utama.

Pengelolaan partisipasi Vietnam dalam BRI memerlukan strategi yang matang dari pemerintah terutamamengenai negosiasi kebijakan, pengaturan hukum, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat atas proyek infrastruktur tersebut. Selain itu Vietnam penting tetap mempertahankan kerjasama dan kemitraan ekonomi yang seimbang dengan negara-negara lain guna memitigasi risiko politik dan ekonomi yang mungkin timbul dari keterlibatan mereka dalam inisiatif tersebut.

i. Peningkatan infrastruktur dan kapasitas lembaga keuangan untuk memastikan kompatibilitas dan integrasi dengan sistem pembayaran regional ASEAN

Vietnam dan negara-negara ASEAN berkomitmen pada integrasi pembayaran regional melalui Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN dan penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT). Vietnam perlu memperkuat infrastruktur dan kapasitas lembaga keuangan untuk memastikan integrasi yang handal. Peningkatan infrastruktur pembayaran dan penggunaan mata uang lokal bertujuan memperkuat kemandirian finansial dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang seimbang.

4.5.4 Strategi WT

Strategi Kelemahan-Ancaman (Weaknesses-Threats) merujuk pada pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menangani kelemahan internal organisasi agar dapat menghadapi ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Strategi WT yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Mendukung pengembangan bisnis produk berkeunggulan kompetitif

Vietnam telah berhasil dalam ekspor produk elektronik, terutama ponsel dan komponen elektronik lainnya. Meskipun terbilang sukses, Vietnam menghadapi ancaman ketergantungan ekspor tunggal pada sektor elektronik dimana mencapai 39% dari nilai total ekspor pada tahun 2022. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah perlu mendukung diversifikasi ekonomi dengan fokus pada produk berkeunggulan kompetitif di pasar global.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah Vietnam perlu memberikan dukungan yang komprehensif bagi

pengembangan bisnis yang memproduksi produk berkeunggulan kompetitif. Dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Vietnam yakni insentif kebijakan yang mendorong inovasi, investasi dalam riset dan pengembangan, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Strategi ini memerlukan keterlibatan aktif sektor industri, akademisi, lembaga penelitian, dan dukungan pemerintah untuk memperluas pangsa pasar produk non-elektronik lokal.

b. Meningkatkan insentif non-pajak yakni kemudahan akses ke lahan, dukungan infrastruktur, kemudahan perizinan bisnis, dan lainnya

Pemerintah Vietnam menghadapi tantangan terkait rencana OECD untuk menerapkan Pajak Minimum Global (GMT) sebesar 15% pada 2024. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Vietnam dapat memprioritaskan insentif non-pajak seperti kemudahan akses lahan, dukungan infrastruktur, perizinan bisnis yang efisien, dan strategi lain di luar aspek pajak. Langkah-langkah ini melibatkan peningkatan akses lahan dengan kemudahan penggunaan dan proses perizinan transparan, dukungan infrastruktur yang kuat, digitalisasi perizinan bisnis, dan perbaikan regulasi. Pendekatan holistik ini akan meningkatkan daya tarik investasi dan mempertahankan posisi Vietnam sebagai destinasi investasi yang menarik, bahkan di tengah perubahan dalam lanskap pajak global yang ditetapkan oleh OECD.

c. Memperkuat lembaga yudikatif

Vietnam, sebagai negara sosialis dengan satu partai, menghadapi tantangan konsistensi pemimpin karena tidak adanya oposisi. Untuk mengatasi ini, pemerintah dapat memperkuat lembaga yudikatif sebagai pembatas kekuasaan dan pengawas keputusan pemerintah. Penguatan lembaga ini

diperlukan untuk menegakkan aturan hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu. Reformasi mendalam, termasuk memberikan independensi pada lembaga yudikatif, meningkatkan aksesibilitas dan keadilan peradilan, serta pelatihan sumber daya manusia di bidang hukum, diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Meskipun demikian, menciptakan iklim politik yang inklusif dengan peran oposisi yang sehat dapat melengkapi penguatan lembaga yudikatif, memperluas ruang politik, dan meningkatkan akses setara ke kekuasaan politik.

d. Melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi untuk mengembangkan sumber daya lokal

   Cina menyumbang 33% dari total impor Vietnam, menimbulkan risiko ekonomi seperti fluktuasi harga dan ketergantungan sumber daya. Vietnam dapat mengatasi ancaman ini dengan kuat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mengembangkan sumber daya lokal. Pemerintah Vietnam mendorong R&D di berbagai sektor, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, pertanian, dan manufaktur, untuk meningkatkan kapabilitas teknologi dan inovasi dalam produksi lokal. Ini bertujuan menciptakan kemampuan dalam negeri yang kuat dan berkelanjutan, memperbaiki efisiensi dan kualitas produksi, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang mendukung, memberikan insentif, dan memfasilitasi kerjasama sektor publik, swasta, dan pendidikan guna menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif.

e. Pengembangan rantai pasokan dalam negeri dan pemberdayaan industri domestik dan usaha kecil dan menengah (UKM)

Pemerintah Vietnam mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan impor dari Cina dengan strategi memberdayakan industri lokal dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memperkuat rantai pasokan domestik. Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan sektor UKM melibatkan memberikan insentif untuk produksi lokal, dukungan infrastruktur, dan pelatihan tenaga kerja. Pemerintah juga berfokus pada pemberdayaan UKM dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan integrasi dalam rantai pasokan lokal.

Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam LOI 2020 negara tidak memaksakan memakai produk dalam negeri sebagai mana tercantum dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa "*Negara tidak boleh memaksa investor: memprioritaskan pembelian dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri atau membeli barang dan jasa dari produsen barang atau penyedia jasa dalam negeri mencapai tingkat lokalisasi tertentu untuk barang-barang produksi dalam negeri…*"

f. Meningkatkan kemampuan pertahanan nasional untuk melindungi kedaulatan di Laut Cina Selatan

Peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan mendorong Vietnam untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Pemerintah dihadapkan pada modernisasi militer, perluasan kapasitas, dan infrastruktur pertahanan di sepanjang wilayah tersebut. Kerjasama dengan negara-negara mitra menjadi strategi utama untuk mencapai kemampuan pertahanan yang unggul. Di samping aspek

militer, peningkatan kerjasama regional dan internasional dianggap penting. Kolaborasi dengan tetangga dan kemitraan strategis di forum internasional membantu membangun koalisi kuat dan mendukung penyelesaian damai terhadap sengketa wilayah. Diplomasi dan dialog politik untuk menangani ketegangan, dengan pendekatan bijaksana untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi tanpa memicu eskalasi konflik.

g. Membangun infrastruktur yang memadai di daerah perbatasan

Dalam menghadapi kompleksitas ketegangan di Laut Cina Selatan dalam geopolitik global, pemerintah Vietnam tidak hanya menjalankan strategi yang berfokus pada aspek militer dan diplomasi, namun juga pada pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan harus ditingkatkan secara signifikan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dengan efektif.

Pengembangan infrastruktur melibatkan pembangunan pos perbatasan dengan teknologi canggih untuk pemantauan real-time dan pelabuhan transit bagi nelayan. Ini bertujuan meningkatkan kontrol perbatasan, mendeteksi ancaman potensial, dan memberikan dukungan kepada nelayan untuk beroperasi dengan lebih aman dan efisien. Selain aspek keamanan, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan juga berkontribusi pada pengembangan zona pertahanan-ekonomi, mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan stabilitas pertahanan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keamanan wilayah.

4.6 Pembahasan

4.6.1 *Foreign Direct Investment* dalam Menjaga Pertahanan Vietnam

Vietnam menerapkan kebijakan pertahanan non-blok yang dikenal sebagai “4 No” yaitu tidak ada aliansi militer; tidak memihak satu negara terhadap negara lain; tidak ada pangkalan militer asing atau tidak menggunakan wilayah Vietnam untuk melawan negara lain; dan tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Vietnam untuk memelihara perdamaian dan menghindari konflik militer internasional serta komitmen netralitas yang menguntungkan dan tidak menentang negara manapun.

Pertama, Vietnam memilih untuk tidak membentuk aliansi militer dengan negara manapun berarti mengambil sikap netral yang memungkinkan dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai negara di tingkat global. Kedua, Vietnam yang tidak memihak satu negara terhadap yang lain menunjukkan bahwa Vietnam mempertahankan keseimbangan dalam hubungan internasional sehingga dapat mengakses peluang ekonomi di seluruh dunia tanpa kendala politik yang berlebihan. Ketiga, Vietnam menolak pendirian pangkalan militer asing atau penggunaan wilayah Vietnam untuk melawan negara lain yang menunjukkan bahwa kedaulatan Vietnam tidak akan digunakan sebagai pangkalan atau tempat persinggahan untuk kepentingan militer asing. Kebijakan ini menunjukkan komitmen keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan stabilitas dan keamanan wilayah yang dijaga tanpa campur pihak eksternal yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Keempat, Vietnam berkomitmen untuk tidak menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional yang menunjukkan bahwa Vietnam berkomitmen melakukan diplomasi damai demi tercapainya damai keamanan dan stabilitas regional, menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan perdagangan internasional. Dengan menganut prinsip empat tidak dalam kebijakan pertahanannya, Vietnam berhasil menciptakan

lingkungan yang aman bagi investor dan tentu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertahanan nirmiliter Vietnam tidak hanya berfokus pada aspek keamanan konvensional, tetapi juga terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, serta pengembangan sumber daya manusia. Penggabungan strategi pertahanan dengan pembangunan sosial-ekonomi, Vietnam bertujuan untuk mencapai stabilitas, pertumbuhan, dan keamanan yang berkelanjutan.

Pemerintah Vietnam menetapkan kebijakan pertahanan nirmiliter bidang ekonomi dengan mengembangkan zona-zona pertahanan-ekonomi guna memperkuat situasi pertahanan dan keamanan di daerah-daerah strategis terutama di wilayah perbatasan, laut, dan kepulauan. Zona pertahanan-ekonomi Vietnam adalah wilayah yang ditetapkan khusus di sekitar perbatasan negara atau area strategis lainnya yang memiliki kepentingan penting dalam pertahanan nasional. Tujuan utama zona tersebut adalah untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan stabilitas pertahanan nasional sehingga memberikan dukungan yang lebih baik dalam mengamankan dan melindungi wilayah tersebut dari ancaman asing atau konflik. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Perdana Menteri Vietnam No. 22/2021/ND-CP yang mengatur tentang restrukturisasi pemukiman di wilayah-wilayah tersebut yang memegang peranan penting dalam pertahanan dan keamanan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Zona Ekonomi-Pertahanan Vietnam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Restrukturisasi Pemukiman

No	Name	Location
1	Mau Son Economic - Defence Zone	Lang Son Province
2	Bao Lac-Bao Lam Economic - Defence Zone	Cao Bang Province
3	Muong Cha Economic - Defence Zone	Dien Bien Province
4	Vi Xuyen Economic - Defence Zone	Ha Giang Province
5	Xin Man Economic - Defence Zone	Ha Giang Province
6	Bat Sat Economic - Defence Zone	Lao Cai Province

No	Name	Location
7	Song Ma Economic - Defence Zone	Son La Province
8	Phong Tho Economic - Defence Zone	Lai Chau Province
9	Bac Hai Son Economic - Defence Zone	Quang Ninh Province
10	Binh Lieu-Quang Ha-Mong Cai Economic - Defence Zone	Quang Ninh Province
11	Khe Sanh Economic - Defence Zone	Quang Tri Province
12	Aso-Aluoi Economic - Defence Zone	Thua Thien-Hue Province
13	Ky Son Economic - Defence Zone	Nghe An Province
14	Muong Lat Economic - Defence Zone	Thanh Hoa Province
15	Cumga Economic - Defence Zone	Dak Lak Province
16	Tay Giang Economic - Defence Zone	Quang Nam Province
17	Bu Gia Phuc-Bu Gia Map Economic - Defence Zone	Binh Phuoc Province
18	Bac Lam Dong Economic - Defence Zone	Lam Dong Province
19	Tan Hong Economic - Defence Zone	Dong Thap Province
20	Quang Son Economic - Defence Zone	Dak Lak Province
21	Economic - Defence Zone of the 15th corps	Gia Lai, Kontum, Dak Lak (Central Highland Province)
22	Economic - Defence Zone of the 16th corps	Dak Lak, Binh Phuoc Province

Sumber: Atase Pertahanan Kedubes Indonesia di Hanoi, Vietnam (2023)

Zona pertahanan-ekonomi merupakan strategi pertahanan nasional untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah penting tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi tetapi juga membantu mengamankan wilayah strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, Zona Ekonomi Pertahanan Vietnam mensinergikan aspek ekonomi dan keamanan dalam konteks pertahanan nasional dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Pembangunan zona pertahanan ekonomi akan menjadi landasan yang kokoh bagi masyarakat lokal dan kekuatan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan, laut, dan kepulauan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa infrastruktur penting harus dibangun di wilayah-wilayah tersebut untuk mewujudkan

tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, sekaligus menstabilkan pertahanan-keamanan negara. Keputusan tersebut menekankan bahwa pengembangan zona ekonomi-pertahanan bertujuan untuk bekerja sama dengan kekuatan lokal untuk membangun postur pertahanan seluruh rakyat yang dikombinasikan dengan postur keamanan berbasis kerakyatan dan kebersamaan sesuai dengan Vietnam sistem pertahanan rakyat secara menyeluruh sebagai pedoman seluruh rakyat Vietnam yaitu *Nền quốc phòng toàn dân (national defense of the whole people)* yang tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan negara Vietnam No. 22/2018/QH14 yang menjelaskan tentang pertahanan negara adalah usaha bela negara dengan gabungan kekuatan seluruh bangsa yang mencakup seluruh kegiatan organisasi, persiapan dan praktek di bidang politik, spiritualitas, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, teknologi, militer, keamanan dan hubungan luar negeri.

Dalam konteks kegiatan investasi, pemerintah Vietnam telah menegaskan pemenuhan persyaratan khusus yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara sesuai dengan Land Law on Investment (LOI) tahun 2020. Kebijakan ini menegaskan bahwa investasi asing maupun domestik harus mematuhi sejumlah aturan dan persyaratan tertentu yang disusun untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut tidak berdampak negatif pada aspek pertahanan dan keamanan nasional, memelihara ketertiban serta keselamatan masyarakat, mendukung nilai-nilai etika sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat 227 sektor dan perdagangan investasi yang harus memenuhi persyaratan khusus.

Vietnam menerapkan kontrol ketat pada sektor-sektor strategis serta memastikan bahwa kegiatan investasi tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam LOI 2020. Pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara mengundang investasi asing yang bermanfaat dengan memastikan bahwa hal tersebut tidak mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Inisiatif ini menunjukkan kesadaran

pemerintah Vietnam terhadap pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara sambil tetap membuka diri terhadap investasi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.6.2 *Lesson Learned* Strategi Vietnam dalam Menghadapai Perang Dagang Amerika Serikat - Cina

Pada era modern yang penuh dengan dinamika geopolitik, Vietnam menghadapi dan mengatasi tantangan perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar, Amerika Serikat dan Cina. Vietnam mampu menerima manfaat dan memberikan *lesson learned* bagi negara lain dalam menghadapi tantangan serupa. Berikut *lesson learned* yang dapat diambil dari fenomena ini:

4.6.2.1 Strategi, Struktur dan Persaingan

a. Kebijakan

1) Perjanjian Perdagangan

Vietnam memahami bahwa untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor dapat didukung dengan keikutsertaan bergabung dalam perjanjian perdagangan sebagai instrumen strategis. Vietnam ikut serta dalam perjanjian perdagangan yang strategis yakni Vietnam – Eurasian Economic Union Freaa Trade Agreement (VN-EAEU FTA), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP), Unieropa - Vietnam Free Trade Area (EVFTA), United Kingdom - Vietnam Free Trade Area (UKVFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). Keikutsertaan Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan yang strategis akan memberikan beberapa peluang yaitu membuka akses pasar yang lebih luas; mengurangi/ penghapusan tarif

dan hambatan perdagangan; mengharmonisasi atau saling mengakui standar dan regulasi antarnegara dan sebagainya.

2) Kerjasama Bilateral

Vietnam juga sangat baik dalam membina hubungan bilateral dengan negara yang memiliki ekonomi besar dan berpotensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pertahanan di negaranya. Hal tersebut terlihat dimana pada tahun 2023 telah terjadi peningkatan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi *Comprehensive Strategic Partnership*. Peningkatan kerjasama Vietnam dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan terlihat dengan adanya beberapa nota kesepakatan baik di sektor ekonomi maupun pertahanan. Meskipun Vietnam bersitegang dengan Cina mengenai sengketa Laut Cina Selatan, Vietnam tetap menjaga hubungan baik dengan Cina. Hal tersebut terlihat dengan adanya nota kesepakatan pembangunan proyek kereta api.

3) Kerjasama Ekonomi

Selain kerjasama ekonomi melalui perjanjian perdagangan, Vietnam juga ikut serta dalam kerjasama lainya yakni dukungan dalam Inisiatif Belt dan Road (BRI); Integrasi pembayaran regional melalui Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN dan penggunaan mata uang lokal di kawasan (Local currency transaction/LCT). Keikutsertaan Vietnam dalam BRI dapat mendukung pembiayaan untuk peningkatan infrastruktur yang saat ini belum memadai. Sedangkan keikutsertaan dalam RPC dan LCT bisa mengurangi ketergantungan Vietnam terhadap USD.

4) Landasan Hukum Investasi

Pemerintah Vietnam berusaha menciptakan menjadi tempat berinvestasi yang ramah, nyaman dan tidak membebani investor atas tekanan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari kebijakan investasi dalam Law On Investment dimana Pemerintah Vietnam menetapkan kebijakan 6 (enam) hal tidak boleh memaksa investor yakni memprioritaskan pembelian dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri; mencapai tingkat ekspor tertentu untuk membatasi ekspor atau penyediaan dalam negeri; mengimpor sesuai ekspor untuk menyeimbangkan mata uang asing; mencapai tingkat lokalisasi tertentu; mencapai tingkat tertentu dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dalam negeri; memasok barag/jasa di dalam/luar negeri; dan menempatkan kantor pusat.

Dalam konteks pertahanan, pemerintah Vietnam telah menegaskan pemenuhan persyaratan khusus yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara sesuai dengan Land Law on Investment (LOI) tahun 2020. Kebijakan ini menegaskan bahwa investasi asing maupun domestik pada 227 sektor dan perdagangan investasi harus mematuhi sejumlah aturan dan persyaratan tertentu yang disusun untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak berdampak negatif pada aspek pertahanan dan keamanan nasional, memelihara ketertiban serta keselamatan masyarakat, mendukung nilai-nilai etika sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5) Kebijakan Energi Terbarukan

Vietnam berkomitmen dalam memajukan energi terbarukan yang menjadi landasan bagi keberlanjutan bisnis dan menjaga keseimbangan lingkungan. Vietnam merupakan negara kedua dari 10 negara berkembang dalam proyek pengembangan energi terbarukan.

Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Vietnam mengenai pembelian listrik dengan memprioritaskan sumber energi terbarukan. Produsen listrik dari sumber energi terbarukan diberikan prioritas untuk mengeksploitasi kapasitas penuh dan mengembangkan listrik sesuai dengan mode operasi pabrik. Pemerintah Vietnam menetapkan mekanisme harga dukungan atau feed-in tariff (FIT) atas pembelian listrik dari proyek energi surya dan proyek listrik biomassa.

6) *Lesson learned*

Pelajaran berharga dari Vietnam adalah pentingnya melakukan diplomasi ekonomi dan pertahanan yang cermat. Vietnam berhasil membina kerjasama yang saling menguntungkan, bukan hanya dalam hal perdagangan, investasi dan pertahanan, tetapi juga menjaga hubungan diplomatik ditengah konflik geopolitik. Pemerintah Vietnam berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang ramah investor tanpa tekanan dari pemerintah dengan tetap harus memenuhi aspek pertahanan dan keamanan nasional; dan memiliki komitmen yang kuat dalam energi terbarukan. *Lesson learned* bagi Indonesia adalah peningkatan pangsa pasar ekspor dan FDI perlu didukung dengan perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral, serta

pendekatan diplomatik bilateral lebih intensif, proaktif dan adaptif terhadap perubahan dinamika global guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung pertahanan nasional. Selain tu, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah investor tanpa tekanan pemerintah dengan tetap harus memenuhi aspek pertahanan dan keamanan nasional; dan menetapkan kebijakan yang berkomitmen pada energi terbarukan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perdagangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Investasi (BKPM); Kementerian ESDM dan sejumlah Kementerian yang terkait diharapkan aktif bernegosiasi untuk keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan strategis dan melakukan pendekatan diplomatik secara bilateral yang berpotensi menguntungkan perluasan eskpor, peningkatan FDI, dan mendukung pertahanan nasional. Selain itu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan dan landasan hukum sehingga mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang ramah investor, tanpa tekanan pemerintah, dan komitmen pada energi terbarukan dengan tanpa mengesampingkan aspek pertahanan dan keamanan nasional.

b. Politik dan Birokrasi

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi untuk memperkuat institusi berupa memperkuat partisipasi kementerian, cabang, dan daerah yang proaktif, kuat, seragam, dan substantif; meningkatkan

prediktabilitas dan transparansi dalam pengembangan dokumen hukum; menerapkan prosedur investasi bisnis fleksibel pasca pemeriksaan; mengontrol ketat pemberlakuan persyaratan investasi bisnis; penyempurnaan peraturan hukum perselisihan penanaman modal; menciptakan koridor hukum bagi pengembangan dan pengelolaan bentuk serta metode investasi baru sesuai dengan praktik internasional; mengontrol ketat perilaku ramah terhadap investor asing dalam proyek besar dan sektor strategis dengan perhatian khusus pada risiko dampak negatif terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum; mempercepat implementasi dan pengembangan e-Government; dan mengevaluasi solusi kelembagaan unggul yang telah diujicobakan atau diterapkan. Pemerintah Vietnam dalam LOI 2020 mengatur persetujuan kebijakan penanaman modal dalam tiga kewenangan yaitu The National Assembly; The Prime Minister's; and Provincial-level People's Committees dengan menjelaskan secara rinci beserta nominal investasinya sehingga pembagian wewenang lebih jelas dan terukur, memberikan kepastian hukum kepada investor, mengurangi risiko saling tindih kewenangan dalam kebijakan investasi dan pemerataan pembangunan regional. Selain itu adanya kombinasi antara digitalisasi prosedur dan peningkatan efektivitas serta efisiensi administratif merupakan langkah strategis bagi Vietnam untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor.

Pelajaran berharga dari Vietnam adalah memperkuat fondasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang berkelanjutan, responsif, dan ramah bagi investor dalam rangka kesiapan Vietnam untuk beradaptasi dengan dinamika global, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat

pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor strategis lainnya. *Lesson learned* bagi Indonesia adalah pemberlakuan persyaratan investasi yang jelas dan kepastian, pengembangan E-Government dan digitalisasi prosedur menciptakan lingkungan bisnis yang efisien dan ramah bagi investor.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Investasi dan sejumlah Kementerian yang terkait diharapkan aktif berkoordinasi untuk memberikan kepastian kepada investor; dan menciptakan lingkungan bisnis ang efisien dan efektif.

4.6.2.2 Faktor Pendukung

a. Infrastruktur

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi infrastruktur Vietnam berupa merencanakan pembangunan infrastruktur secara sinkronisasi modern dan strategis; menerapkan mekanisme dan kebijakan menguntungkan bagi sektor perekonomian, termasuk sektor penanaman modal asing di bidang infrastruktur; dan mengeluarkan daftar proyek prioritas dalam infrastruktur untuk menarik investor.

Kondisi infrastruktur di Vietnam belum memadai, namun berdasarkan penelitian cost logistik “certain” dibandingkan Indonesia yang dapat dikatakan uncertain”. Salah satu cara yang ditempuh Vietnam dalam meningkatkan infrastruktur adalah ikut serta dalam Inisiatif Belt dan Road (BRI) yang dicanangkan oleh Cina. Pada Desember 2023 telah ditandatangani proyek pembangunan jalur kereta api yang

menghubungkan Kunming di Provinsi Yunnan (China) dengan Pelabuhan Haipong di Hanoi dan pengembangan jalur kereta api cepat yang menghubungkan Hanoi dan Ho Chi Minh sekitar sepanjang 1.545 kilometer. Komitmen Cina dalam Pembangunan jalur kereta api maka beban APBN Vietnam untuk investasi infrastruktur akan jauh berkurang namun target konektivitas dan kehandalan infrastruktur akan tercapai. Pelajaran berharga dari Vietnam adalah memanfaatkan peluang kerjasama internasional secara cerdas untuk menghadapi urgensi pembaharuan infrastruktur sehingga tercapainya tujuan pembangunan nasional. *Lesson learned* bagi Indonesia adalah bersikap proaktif dan berstrategi untuk memanfaatkan peluang dalam kerjasama internasional demi tercapainya tujuan pembangunan nasional dengan tetap mempertimbangkan aspek pertahanan nirmiliter sektor ekonomi; dan memastikan biaya logistik "*certain*" bagi investor. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan dan sejumlah Kementerian yang terkait diharapkan aktif berkoordinasi untuk memanfaatkan peluang kerjasama internasional untuk mengatasi permasalahan dalam peningkatan infrastruktur di Indonesia sehingga beban fiskal menjadi berkurang namun konektivitas dan mobilitas meningkat.

b. Sumber Daya

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi peningkatan kapasitas internal dan keunggulan kompetitif berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja dan faktor produksi berupa membentuk Komite

Produktivitas Nasional, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi pendidikan dan platihan dan memperkuat kerjasama internasional di bidang pelatihan; pengembangan bisnis dengan produk yang memiliki keunggulan kompetitif; melakukan penelitian untuk membangun pusat keuangan daerah; meningkatkan kapasitas perusahaan dalam negeri berupa mengembangkan bisnis yang terintegrasi internasional, mempromosikan prerusahaan dalam negeri, membangin database perusahaan dalam negeri guna sumber informasi bagi investor asing; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa memperbaiki institusi ketenagakerjaan sesuai praktik internasional, memperkuat pelatihan professional, mendorong pelatihan online, mendorong perusahaan penanaman modal asing memingkatkan kualitas pekerja lokal, menggunakan talenta pekerja yang telah bekerja atau pelatihan di luar negeri, mendorong pendidikan kejuruan global, membangun sistem informasi pasar tenaga kerja.

Pemerintah Daerah Vietnam dalam menyetujui kerjasama Foreign Direct Investment menuntut komitmen perusahaan untuk membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang sehingga komitmen tersebut menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk menuntut pelaksanaan realisasi dari komitmen diawal. Jika komitmen tersebut dilanggar, maka Pemerintah Daerah tidak sungkan-sungkan untuk menyegel perusahaan tersebut.

Terkait Upah murah di Vietnam dimana pada wilayah I (terbaik) sekitar 3jutaan, di Indonesia sebenarnya ada wilayah dengan upah minimum regional yang serupa yakni Jawa Tengah namun kondisi infrastruktur kurang mendukung dan berada jauh dengan Pelabuhan terbaik di Indonesia, Tanjung

Priok. Bahkan Pelabuhan Semarang dalam The Port Liner Shipping Connectivity Index hanya diposisi ke16 di Kawasan ASEAN. Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan konektivitas.

Pelajaran berharga dari Vietnam adalah kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah selaras dengan pengawasan yang ketat untuk menegakkan komitmen peningkatan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas SDM di Vietnam. *Lesson learned* bagi Indonesia adalah dalam perjanjian kerjasama FDI mencantumkan klausul komitmen perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang sehingga investasi tersebut berdampak positif bagi ekonomi, kualitas SDM dan transfer teknologi. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu mendukung kawasan industri dengan wilayah yang memiliki biaya upah rendah dan meningkatkan konektivitas maritim secara global karena Indonesia mengalami kemunduran dalam Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Vietnam dimana pada tahun 2009 berada di posisi ketiga menurun menjadi kelima pada tahun 2023.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Investasi; Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan sejumlah Kementerian yang terkait diharapkan aktif berkoordinasi untuk memanfaatkan peluang FDI untuk memperbaiki kualitas SDM dan kemampuan transfer teknologi.

4.6.2.3 Kondisi Permintaan

Nilai ekspor Vietnam tertinggi adalah produk elektronik yaitu Samsung dengan nilai 38%. Seperti yang kita ketahui bahwa pangsa pasar handphone sangatlah besar. Mobile World Live mengungkapkan bahwa jumlah pengguna handphone pada tahun 2022 sebesar 3 miliar jiwa atau

54 persen dari 4,6 miliar penduduk dunia. Vietnam memiliki produk ekspor yang handal dan dibutuhkan seluruh dunia sehingga sudah tentu memiliki nilai permintaan yang sangat besar.

Vietnam sangat adaptif terhadap produk yang dibutuhkan sesuai dengan kemajuan jaman, hal ini terlihat dimana Vietnam telah memproduksi mobil Listrik nasional. Vinfest adalah perusahaan otomotif swasta yang memproduksi mobil Listrik dengan hanya sedikit bantuan pemerintah. Pada tahun 2017, Vinfest mulai dalam pembuatan mobil nasionaldengan membeli paten desain mobil Eropa, karena sebelumnya berlatarbelakang properti. Karena produsen mobil terkemuka beralih ke mobil listrik, Vinfest pun pada tahun 2019 berubah haluan ke mobil Listrik dan pada tahun 2021 telah resmi dirilis. Pada kunjungan Presiden Jokowi ke Vietnam Januari 2024 menyatakan dukungan penuh atas rencana investasi Vinfest ke Indonesia.

Pelajaran berharga dari Vietnam adalah Vietnam cermat dalam menarik investasi dengan produk yang unggul dan dibutuhkan dunia; dan adaptif terhadap produk yang dibutuhkan sesuai dengan kemajuan jaman. Lesson learned bagi Indonesia adalah adaptif untuk memiliki dan menghasilkan produk yang unggul dan sangat dibutuhkan dunia saat ini maupun pada masa depan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan sejumlah Kementerian yang terkait diharapkan aktif berkoordinasi untuk mendorong produk unggulan Indonesia untuk dipasarkan dalam lingkup global.

4.6.2.4 Industri Pendukung dan Terkait

Keputusan Perdana Menteri Nomor 667/QD-TTg tanggal 2 Juni 2022 tentang Persetujuan Strategi Kejasama Penanaman Modal Asing Periode 2021-2030 mengungkapkan strategi untuk pengembangan industri pendukung dan terkait berupa mengembangkan industri pendukung guna menghindari investasi yang stagnan, menyebar dan tidak efektif;

mengembangkan mekanisme insentif investasi untuk meningkatkan hubungan antara investasi asing dan investasi dalam negeri; peningkatan hukum untuk teknologi tinggi.

Pada tahun 2009 Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Vietnam hanya diposisi kelima diantara negara-negara kawasan ASEAN kemudian meningkat menjadi ketiga pada tahun 2023. Dari data tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Vietnam dalam memperbaiki konektivitas pelabuhan dalam tingkat global. Vietnam telah berinvestasi dalam infrastruktur maritim yang mencakup pembangunan dan perluasan pelabuhan; peningkatan terminal kontainer untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengiriman; mengembangkan jaringan logistik mencakup gudang dan pusat distribusi untuk mendukung efisiensi pengiriman barang; dan sistem informasi yang canggih memungkinkan pelacakan dan pengelolaan pengiriman barang secara real-time yang sangat penting untuk visibilitas dan kontrol atas rantai pasokan.

Pelajaran berharga dari Vietnam adalah Pemerintah Vietnam sangat berkomitmen dalam meningkatkan infrastruktur maritim sehingga dapat meningkatkan konektivitas pelabuhan secara global. Sedangkan Indonesia malah mengalami kemunduran dalam Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Vietnam dimana pada tahun 2009 berada di posisi ketiga menurun menjadi kelima pada tahun 2023. *Lesson learned* bagi Indonesia adalah komitmen yang sangat tinggi dalam meningkatkan infrastruktur maritim sehingga dapat meningkatkan konektivitas pelabuhan secara global.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan; Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan sejumlah Kementerian yang terkait diharapkan aktif berkoordinasi untuk meningkatkan infrastruktur maritim.